

DIPLOMASI PERTAHANANAN MARITIM DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA.



Buku ini membahas peran penting diplomasi pertahanan maritim dalam menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara di wilayah maritim yang strategis. Dimulai dengan dasar-dasar diplomasi, buku ini membahas keterkaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri, pentingnya sinergi dalam strategi pertahanan nasional, peran diplomasi dalam memperkuat pertahanan maritim serta hubungan antarnegara. Melalui studi kasus Indonesia dan Australia, buku ini menggambarkan bagaimana Indonesia membangun model diplomasi pertahanan maritim yang strategis demi menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan. Buku ini sangat direkomendasikan untuk Anda para akademisi dan praktisi di bidang pertahanan, kebijakan luar negeri, hubungan internasional serta beragam sektor maritim. Buku ini memberikan pandangan menyeluruh mengenai bagaimana diplomasi pertahanan maritim dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkokoh pertahanan maritim serta memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Buku Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional merupakan kontribusi akademik yang sangat penting dalam mengeksplorasi dimensi strategis maritim Indonesia. Sebagai karya ilmiah hasil pengembangan disertasi di Universitas Pertahanan RI, buku ini tidak hanya memperkaya literatur Hubungan Internasional, tetapi juga memberikan perspektif komprehensif tentang peran diplomasi pertahanan maritim dalam konteks keamanan nasional dan regional. Melalui analisis mendalam dan kerangka teoritis yang kuat, karya ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi para akademisi, praktisi pertahanan, dan pemerhati hubungan internasional dalam memahami kompleksitas diplomasi pertahanan maritim di era kontemporer.

Letnan Jenderal TNI (Purn) Jonni Mahroza, S.IP, MA., M.Sc, Ph.D.
Rektor Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Yang umumnya kita ketahui, beragam jenis diplomasi dijalankan oleh Indonesia bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Namun buku ini memperkenalkan kepada kita pentingnya memahami dan meningkatkan satu jenis diplomasi yang sangat relevan dengan negara kita yang merupakan negara kepulauan dan maritim yaitu diplomasi pertahanan maritim. Sebagai buku pertama mengenai diplomasi pertahanan maritim Indonesia, penerbitan buku ini perlu mendapat apresiasi karena dapat memberikan manfaat bukan saja dalam memperkenalkan teori dan konsep tetapi juga studi kasus yang melahirkan model baru dalam perumusan dan pelaksanaan diplomasi pertahanan maritim Indonesia terhadap negara lain.

Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D.
Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Pertahanan Republik Indonesia



 www.artamedia.co
 artamediantara.co@gmail.com
 @penerbitartamedia
 @artamediantara



Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional

Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA



Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional

**Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Arta Media Nusantara
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*
Hak penerbitan pada Penerbit Arta Media Nusantara
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari Penerbit**

**Anggota IKAPI
NO.265/JTE/2023**
Cetakan Pertama: Januari 2025
15,5 cm x 23 cm

ISBN
978-634-7005-58-8

Penulis:
Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA

Editor :
Lisnawati

Desain Cover:
Dwi Prasetyo

Tata Letak:
Zidan Abid Maulana

Diterbitkan Oleh:
Penerbit Arta Media Nusantara

Jalan Kebocoran, Gang Jalak No. 52, Karangsalam Kidul,
Kedungbanteng, Banyumas, Jawa Tengah
Email: artamedi antara.co@gmail.com
Website: <http://artamedia.co/>
Whatsapp : 081-392-189-880

Prakata



Laut atau perairan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan memainkan peran penting dalam keamanan, ekonomi, dan politik internasional. Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan pun memiliki wilayah perairan yang luas bahkan melebihi luas wilayah daratannya. Dengan demikian, wilayah perairan yang berperan penting dalam keamanan, ekonomi dan politik internasional perlu selalu dipandang sebagai suatu nilai strategis. Bahkan seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan, aktivitas, dan pengelolaan laut atau dikenal dengan maritim, perlu dimanfaatkan dan dijaga agar tetap menjadi aset berharga bagi kepentingan nasional kita.

Diplomasi pertahanan maritim (DPM) dapat menjadi salah satu upaya penting yang perlu terus dilakukan dan ditingkatkan demi pengelolaan maritim suatu negara terlebih dalam dinamika hubungan internasional yang kompleks. Tentunya, tujuan DPM perlu dipahami tidak hanya terbatas menjaga kedaulatan negara tetapi juga menjadi elemen penting dalam membina hubungan baik antarnegara.

Buku *Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Hubungan Internasional* membahas pentingnya DPM sebagai bagian dari strategi negara-negara untuk menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara di wilayah perairan yang strategis. Dimulai dengan pemahaman mendasar tentang diplomasi, buku ini menjelaskan konsep, fungsi, dan sinergi diplomasi dalam hubungan internasional secara menyeluruh. Pembaca akan diajak memahami bagaimana kekuatan negara diintegrasikan dalam upaya diplomasi untuk mencapai kepentingan nasional.

Lebih jauh, buku ini menjabarkan keterkaitan antara diplomasi dan kebijakan luar negeri, serta peran diplomasi dalam memperkuat pertahanan maritim. Melalui studi kasus Indonesia dan Australia,

buku ini menggambarkan bagaimana Indonesia membangun model DPM yang strategis demi menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat pengaruhnya di kawasan.

Dengan analisis mendalam yang mencakup strategi pertahanan dipadukan dengan perspektif Ilmu Hubungan Internasional serta pendekatan studi kasus, buku ini memberikan perspektif segar bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan mengenai bagaimana DPM dapat menjadi alat yang efektif dalam memperkokoh pertahanan maritim serta memperjuangkan kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, buku ini akhirnya telah dapat dinikmati oleh pembaca. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulisan buku ini. Terimakasih atas do'a dan dukungan orang tua tercinta Ayahanda Alm. Drs. H. Sugondho, Apt. dan Ibunda H. Kusmarin, suami dan putri-putri tersayang: Febi Maulana AD, Nayla and Sheyla, saudara "kembar" dr. Astri Avianti, SpBS, keluarga R. Soetadi Prawirodirdjo dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Terimakasih penulis haturkan atas dukungan dari Bapak Rektor Universitas Pertahanan RI, Letnan Jenderal TNI (Purn) Jonni Mahroza, S.IP., MA., M.Sc., Ph.D. Buku ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan beliau.

Buku ini juga tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan luar biasa dari para narasumber yang merupakan ahli dalam bidang pertahanan maritim dan diplomasi. Terimakasih atas masukan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan dari para dosen Universitas Pertahanan Republik Indonesia yang saya hormati: Prof. Anak Agung Banyu Perwita, Ph.D, Laksma TNI (Purn) Dr. M. Adnan Madjid, S.H., M.Hum, Laksda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.M, seluruh dosen UNHAN RI yang telah membagikan banyak ilmu dan pengalamannya, rekan-rekan seperjuangan Cohort 4 Program Doktorat UNHAN RI, para senior

Program Doktoral, Bapak Dr. Hasto Kristiyanto, Dr. Eko G. Samudro, seluruh staf dan *civitas academica* Kampus Bela Negara.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Mas Bima Arya Sugiarto, Ph.D, Bapak Anies Baswedan, Ph.D, Dr. Rizki Damayanti, Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, Program Magister Hubungan Internasional, keluarga besar Universitas Paramadina Jakarta, sahabat-sahabat di *Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia (CGSI)*, *Women in Foreign Policy Fellow* pada *Foreign Policy Community Indonesia (FPCI)*, HI94 Unpar dan *Linkagers Bio 2 SMA 5 Bandung*.

Penulis memohon maaf sekiranya dalam penulisan buku ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Besar harapan penulis agar buku ini memberikan manfaat bagi pembaca.

Jakarta, 10 November 2024

Penulis

Dr. Peni Hanggarini, S.IP., MA

Daftar Isi

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 RUANG LINGKUP DIPLOMASI	21
A. Definisi Diplomasi	21
B. Fungsi dan Tujuan Diplomasi	27
C. <i>Power</i> dan Diplomasi	30
D. Sinergi dalam Diplomasi	32
E. Jenis-jenis Diplomasi	32
F. Diplomasi sebagai Alat Kebijakan Luar Negeri	43
G. Diplomasi dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional	46
BAB 3 DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM	52
A. Konsep Pertahanan Negara	52
B. Teori Keamanan Nasional	56
C. Diplomasi Pertahanan	57
D. Diplomasi Maritim	59
E. Diplomasi Pertahanan Maritim	64
F. Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional	68
BAB 4 STUDI KASUS: DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA	75
A. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Konteks Maritim ..	77
B. Perwujudan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan Maritim dengan Australia (2014- 2021)	81
C. Sinergi Aktor dalam Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dengan Australia (2014-2021)	89

D. Model Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dengan Australia untuk Penguatan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (2014-2021).....	98
BAB 5 PENUTUP.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	118
INDEKS.....	129
GLOSARIUM.....	131
PROFIL PENULIS.....	133

Daftar Gambar

Gambar 1. 1. Peta Negara Anggota <i>Quadrilateral Security Dialogue</i>	9
Gambar 1. 2. Koridor Darat dan Koridor Maritim <i>Belt and Road Initiative</i>	10
Gambar 1. 3. Peta Geostrategi AUKUS.....	12
Gambar 2. 1. <i>Power Continuum</i> Joseph Nye.....	31
Gambar 2. 2. Kerangka <i>Strategic Logic</i> Kebijakan Luar Negeri.....	45
Gambar 3. 1. Diplomasi Militer sebagai bagian dari Diplomasi Pertahanan.....	57
Gambar 3. 2. Kerangka Konseptual Diplomasi Pertahanan.....	59
Gambar 3. 3. Bentuk dan Tujuan Diplomasi Maritim <i>Co-operative</i>	60
Gambar 3. 4. Diagram Diplomasi Pertahanan Maritim	64
Gambar 4. 1. Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim.....	76
Gambar 4. 2. Konsep Kepentingan Nasional dan DPM.....	88
Gambar 4. 3. Konseptualisasi Diplomasi Pertahanan Maritim	90
Gambar 4. 4. Pola Orkestrasi Aktor DPM Indonesia dengan.....	94
Gambar 4. 5. <i>Orchestra Interlocking Capacity</i>	96
Gambar 4. 6. Model DPM Indonesia dengan Australia	103
Gambar 4. 7. Kerangka Strategi DPM Indonesia.....	106
Gambar 4. 8. Bagan Konsep Strategi Diplomasi Maritim.....	107
Gambar 4. 9. Bagan Konsep Strategi Diplomasi Pertahanan.....	107
Gambar 4. 10. Bagan Konsep Strategi DPM Indonesia 8 Arah	108
Gambar 4. 11. Enam Belas Arah Mata Angin.....	109
Gambar 4. 12. Bagan Konsep Strategi DPM Indonesia 16 Arah.....	110

Daftar Tabel

Tabel 1. 1. Diplomasi Maritim Indonesia (1998-2016)	14
Tabel 3. 1. Perbedaan Pengertian Diplomasi	65
Tabel 3. 2. Matriks DPM	67
Tabel 4. 1. Rumusan Kepentingan Nasional Indonesia	77
Tabel 4. 2. Perwujudan Kepentingan Nasional dalam DPM Indonesia.....	87
Tabel 4. 3. Konsep Kepentingan Keamanan Maritim Nasional	89
Tabel 4. 4. Sinergi para aktor dalam DPM Indonesia dengan Australia	93
Tabel 4. 5. Model DPM Indonesia dengan Australia	100
Tabel 4. 6. Pilihan Strategi dalam Model DPM Indonesia- Australia	102

Daftar Singkatan

ABF	<i>Australian Border Force</i>
ADFA	<i>Australian Defence Force Academy</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asia Nations</i>
AUKUS	Australia, United Kingdom, United States
AUSINDO HLC	<i>Australia Indonesia High Level Committee</i>
B	Barat (<i>West</i>)
BD	Barat Daya (<i>Southwest</i>)
BL	Barat Laut (<i>Northwest</i>)
BBD	Barat-Barat Daya (<i>West-southwest</i>)
BBL	Barat-Barat Laut (<i>West-northwest</i>)
BRI	<i>Belt and Road Initiative</i>
Bakamla	Badan Keamanan Laut
Basarnas	Badan Nasional Pencarian dan Perlindungan
CATWOE	<i>Actors (A), Transformation (T), Worldview (W), Owners (O), Environmental Constraints (E)</i>
CSIS	<i>Centre for Strategic and International Studies</i>
CBM	<i>Confidence Building Measures</i>
CFA	<i>Confirmatory Factor Analysis</i>
DFAT	<i>Department of Foreign Affairs and Trade</i>
DM	Diplomasi Maritim
DMM	<i>Defence Ministerial Meeting</i>
DoD	<i>Department of Defence</i>
DP	Diplomasi Pertahanan
DPM	Diplomasi Pertahanan Maritim
EAS	<i>East Asia Summit</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FOIP	<i>Free-Open Indo Pacific</i>
GMF	<i>Global Maritime Fulcrum</i>
HADR	<i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief</i>

IADSD	<i>Indonesia-Australia Defense Strategic Dialog</i>
IA-CEPA	<i>Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia)
IKAHAN	Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia
IORA	<i>Indian Ocean Rim Association</i>
KKMN	Kepentingan Keamanan Maritim Nasional
LCS	Laut Cina Selatan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDA	<i>Maritime Defense Awareness</i>
MDD	<i>Maritime Defense Diplomacy</i>
MNEX	<i>Multilateral Naval Exercise</i> Komodo
NCDD	<i>NonCoercive Defence Diplomacy</i>
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OSB	<i>Operations Sovereigns Border</i>
PoP	<i>Publish or Perish</i>
PMD	Poros Maritim Dunia
P2K-OI	Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional
QUAD	<i>Quadrilateral Security Dialogue</i>
RAN	<i>Royal Australian Navy</i>
RCEP	<i>Regional Comprehensive Economic Partnerships</i>
RD	<i>Root Definition</i>
RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSC	<i>Regional Security Complex</i>
S	Selatan (<i>South</i>)
ST	<i>Strength-Threat</i>
SO	<i>Strength-Opportunity</i>
SAG	<i>Senior Advisory Group</i>
SBD	Selatan Barat Daya (<i>South-southwest</i>)
SBY	Susilo Bambang Yudhoyono
SGS	<i>Super Garuda Shield</i>

SPC	<i>Sea Power Conference</i>
SSM	<i>Soft System Methodology</i>
STG	Selatan Tenggara (<i>South-southeast</i>)
SLOC	<i>Sea Lines of Communication</i>
SPLN	Strategi Pertahanan Laut Nusantara
SWOT	<i>Strength, Weakness, Opportunity and Threat</i>
STRAD	<i>Second Track Diplomacy</i>
T	Timur (<i>East</i>)
TG	Tenggara (<i>Southeast</i>)
TL	Timur Laut (<i>Northeast</i>)
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TTG	Timur Tenggara (<i>East-southeast</i>)
TTL	Timur-Timur Laut (<i>East-northeast</i>)
U	Utara (<i>North</i>)
UBL	Utara Barat Laut (<i>North-northwest</i>)
UNCLOS	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
US INDOPACOM	<i>United States Indo-Pacific Command</i>
UTL	Utara Timur Laut (<i>North-northeast</i>)
WO	Weakness-Opportunity
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif
3 E	3 Kriteria: <i>efficacy, efficiency</i> dan <i>effectiveness</i>
5 Cs	<i>Capacity, Concentration, Creativity, Coalition building, Credibility</i>

Persembahan untuk
Indonesia,
tanah airku tercinta

BAB 1

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelago*) terbesar di dunia yang terletak pada posisi strategis antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor geostrategis NKRI telah memberikan berbagai peluang strategis bagi kepentingan nasional Indonesia. Namun, kondisi geostrategis ini berpotensi pula menciptakan berbagai bentuk ancaman dan tantangan bagi keamanan nasional dan pertahanan negara.

Indonesia memiliki sejumlah pulau yang dibakukan ke Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 2017 sebanyak 16.056 pulau. Dari luas keseluruhan wilayah Indonesia yang mencapai 8.300.000 km², sebagian besar merupakan perairan yaitu seluas 6.400.000 km² (Pushidrosal, 2018). Pengukuhan terhadap kedaulatan wilayah kepulauan ini ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 25 A yang berbunyi: *“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayahnya batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.”*

Indonesia telah sejak dahulu memanfaatkan laut sebagai suatu kekuatan seperti yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Kedua kerajaan besar ini dikenal menguasai lautan karena memiliki pelaut-pelaut ulung serta kapal-kapal yang dapat digunakan di samudra serta melewati batas negara.

Kejayaan maritim Indonesia telah tercatat di dalam sejarah Nusantara. Masyarakat Indonesia telah berorientasi maritim jauh sebelum bangsa Barat dan penjajah menguasai wilayah Nusantara. Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Demak, serta Kesultanan Ternate merupakan kerajaan maritim yang kuat dan disegani oleh negara lain. Kekuasaan Kerajaan Majapahit menjangkau hingga China, Kamboja, Vietnam, India, Ayutia, Agor, Thailand. Sementara Panglima Pati Unus dari Kerajaan Demak pernah berupaya menyerang Portugis yang menguasai Selat Malaka dengan kekuatan 37 kapal (Ritonga, 2016).

Namun, penguasaan laut Indonesia perlu selalu ditingkatkan dan ditunjang dengan strategi yang baik dan tepat dengan memerhatikan beberapa elemen penting. Penciptaan kekuatan laut dapat diupayakan oleh negara melalui pembentukan enam karakter *sea power*. Menurut Alfred Tayer Mahan (1890) dalam bukunya “*The Influence of Sea Power Upon History*,” elemen yang dapat membentuk dasar strategi maritim suatu negara adalah kedudukan geografis, bentuk tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk yang turun ke laut, karakter penduduk, dan karakter pemerintah termasuk lembaga-lembaga nasional. Integrasi dari enam elemen tersebut dapat menjadikan suatu negara memiliki kekuatan maritim kelas dunia (Anugerah, 2022). Berdasarkan *Maritime Power Competitiveness* (MPC) Index, Indonesia pada 2008 hingga 2017 telah masuk dalam kategori *World Class Sea Power*. Akan tetapi, upaya modernisasi Indonesia masih kalah apabila dibandingkan dengan negara-negara lain (Chairil et al., 2022).

Sejak masa pemerintahan Presiden Sukarno, Indonesia telah memahami pentingnya kekuatan geostrategis khususnya pembangunan kekuatan maritim Indonesia. Presiden Sukarno menyelenggarakan Musyawarah Maritim pertama di Jakarta, pada 23 September 1963. Para *stakeholder* maritim hadir guna memberikan kontribusi pemikiran terhadap arah pembangunan maritim. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno dianugerahi gelar sebagai Nakhoda Agung NKRI yang dianggap mampu

meneruskan kejayaan maritim Sriwijaya dan Majapahit serta mampu memimpin kapal besar berupa negara kepulauan Indonesia yang bercorak bahari. Peringatan atas peristiwa sejarah tersebut kini telah diwujudkan sebagai peringatan Hari Maritim Nasional yang ditetapkan melalui Keppres Nomor 249/1964 (News, 2017).

Presiden Soekarno dalam masa pemerintahannya, memiliki visi untuk menjadikan Indonesia sebagai Mercusuar Dunia dan sektor maritim sebagai orientasi pembangunan. Hal ini tercantum dalam pernyataan beliau sebagai berikut.

“...bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara Makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawati samudra; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung....” (Presiden Soekarno, Nahkoda Agung NKRI) (News, 2017).

Selama pemerintahan Presiden Sukarno, Indonesia berhasil mendapatkan penambahan luas wilayah perairan sekitar 3 juta km persegi melalui diplomasi yang dilakukan Perdana Menteri Djoeanda pada 13 Desember 1957. Wilayah perairan yang pada awalnya dinyatakan sebagai perairan internasional dan memisahkan pulau-pulau akhirnya berhasil menjadi perairan yang menghubungkan wilayah yang menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kepemimpinan Presiden Sukarno berkarakter maritim yang diwujudkan antara lain melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 1960, tanggal 30 Agustus 1960, mengenai pembentukan Dewan Maritim. Presiden Sukarno juga menunjuk Kementerian Koordinator Bidang Maritim untuk melakukan koordinasi terhadap tugas-tugas Menteri Perhubungan, Menteri Perikanan dan Pengolah Laut serta Menteri Perindustrian. Namun selanjutnya selama 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto, fokus pemerintah Indonesia lebih ke arah daratan daripada ke arah maritim. Kemenko Bidang Kemaritiman ditiadakan sehingga fokus pemerintahan lebih kepada daratan daripada kemaritiman selama 32 tahun. Setelah Soeharto lengser dan BJ Habibie menjadi presiden, Habibie mendeklarasikan

visi pembangunan Indonesia yang berorientasi ke laut melalui *Ocean Charter* pada 26 September 1998. Deklarasi itu berisi doktrin kelautan Indonesia yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus “hidup dari dan dengan Laut” (Marsetio, 2019).

Komitmen terhadap pembangunan kelautan terlihat pada masa pemerintahan selanjutnya yaitu masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden Gus Dur mendirikan Departemen Eksplorasi Laut pada 26 Oktober 1999 didirikan yang kemudian menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau dikenal sebagai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di masa pemerintahan Presiden Gus Dur, Pemerintah membentuk Dewan Maritim Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 yang berperan dalam melakukan koordinasi dan sinergi program pembangunan kelautan di Indonesia. Mulai tahun 1999, Presiden pun menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Visi pembangunan kelautan Gus Dur kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati. Ibu Mega menyerukan kepada seluruh komponen bangsa melalui “Seruan Sunda Kelapa” agar membangun kembali maritim Indonesia. Pada Februari 2004 dirumuskan pula visi dan misi maritim Indonesia dari sudut pandang politik (Marsetio, 2019).

Fokus pada pemerintahan selanjutnya di masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode sejak 2004 hingga 2014 adalah pada pembangunan sektor nonmaritim. Meskipun demikian, pembangunan kelautan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Presiden SBY mengganti Dewan Maritim Indonesia menjadi Dewan Kelautan Indonesia. Pemerintah menyelenggarakan Konferensi Kelautan Dunia (*World Ocean Conference*) di Manado pada Mei 2009. Presiden SBY juga menetapkan Undang-undang RI tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yaitu UU Nomor 27 Tahun 2007. Selain itu, presiden mengeluarkan instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional (Marsetio, 2019).

Visi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia kemudian muncul kembali dalam visi yang digelorkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Visi Poros Maritim Dunia (PMD). Visi PMD ini sejalan dengan Strategi *Sea Power* yang dikemukakan oleh Mahan (Pudjiastuti et al., 2021). Konsep PMD disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, 13 November 2014. Terdapat lima pilar utama Visi PMD sebagai berikut (setkab.go.id, 2014):

1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia.
2. Berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama.
3. Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.
4. Pelaksanaan Diplomasi Maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan.
5. Membangun kekuatan pertahanan maritim Visi PMD yang lahir berdasarkan kondisi geostrategis dan faktor historis ini memberikan pengaruh bagi perumusan strategi Indonesia dalam hal upaya pencapaian kepentingan nasional.

Visi PMD kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden No 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia Pasal 1 Ayat 2:

Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Visi PMD dirumuskan dalam 7 pilar kebijakan yaitu (Bidang Kemaritiman RI, 2017):

1. Pilar pertama mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Pilar kedua mengenai pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut.
3. Pilar ketiga yaitu terkait tata kelola dan kelembagaan laut.
4. Pilar keempat menyangkut ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan.
5. Pilar kelima mengenai pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut.
6. Pilar keenam mengenai budaya bahari.
7. Pilar ketujuh mengenai diplomasi maritim.

Visi PMD ini dapat menjadi kebijakan Indonesia yang tepat dalam menanggapi kompetisi geopolitik serta dinamika ancaman yang ada (Perwita, 2020). Visi ini digunakan oleh Indonesia sebagai suatu strategi *middle power* dalam menghadapi *Belt Road Initiative* (BRI) dan *Free-Open Indo Pacific* (FOIP) (Pratiwi et al., 2021).

Sebagai salah satu pilar pendukung visi PMD, diplomasi maritim Indonesia telah dianggap berhasil memperjuangkan kepentingan nasional. Diplomasi maritim Indonesia telah berhasil melakukan perjanjian batas maritim Indonesia dengan beberapa negara dalam penetapan garis batas laut wilayah, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen yang dilakukan sesuai dengan aturan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) (Kusumawardhani & Arie Afriansyah, 2019). Meskipun prioritas diplomasi maritim yang telah terlaksana sejak visi PMD dicanangkan pada 2014 dapat menjadi fondasi serta *benchmarking* untuk diplomasi maritim, tetapi hingga 2019, capaian diplomasi maritim Indonesia masih belum sepenuhnya terealisasi (Hadiningrat, 2020).

Visi PMD yang sangat relevan bagi pengembangan kekuatan maritim Indonesia kurang diwujudkan dalam berbagai kebijakan

atau program nasional pada masa pemerintahan Jokowi II. Berdasarkan *actor-specific theory*, penurunan kualitas perwujudan PMD ini disebabkan oleh faktor idiosinkresi Presiden Jokowi dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Hal ini berakibat pada pendekatan yang kurang mendalam dan kurang terarah dalam pengambilan keputusan, pengembangan infrastruktur dan diplomasi yang terkait dengan aspek maritim (Agastia 2021). Penurunan intensitas program sebagai perwujudan visi PMD ini amat disayangkan terjadi padahal visi tersebut sejalan dengan pencapaian kepentingan nasional Indonesia di luar negeri melalui politik luar negeri dan diplomasi.

Kepentingan nasional Indonesia terkait dengan upaya menghadapi ancaman keamanan maritim yang muncul di perairan Indonesia yang luas. Tipe ancaman bagi keamanan yang muncul, terwujud dalam tipe ancaman keamanan tradisional dan nontradisional. Ancaman keamanan tradisional cenderung merupakan ancaman yang datang dari luar negara yang harus dihadapi dengan kekuatan militer. Sedangkan ancaman nontradisional merupakan ancaman terhadap keamanan manusia dan nonmiliteristik. Kedua jenis ancaman tersebut merupakan tantangan terhadap kedaulatan.

Ancaman keamanan maritim yang kompleks dapat berupa ancaman aktual dan potensial, dapat berupa konflik mengenai batas negara, perdagangan narkotika, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, perompakan di laut, pencurian kekayaan alam, serta terorisme. Misalnya, konsekuensi geopolitik Selat Malaka sebagai jalur perdagangan yang strategis, menimbulkan ancaman perompakan di laut serta potensi ancaman konflik batas negara antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dalam upaya mengatasi potensi ancaman tersebut maka diplomasi yang menghasilkan kolaborasi untuk menjaga wilayah laut, kontrol laut dan pertahanan militer di berbagai tingkat yaitu bilateral, trilateral, dan multilateral perlu dilakukan (Fathun, 2019).

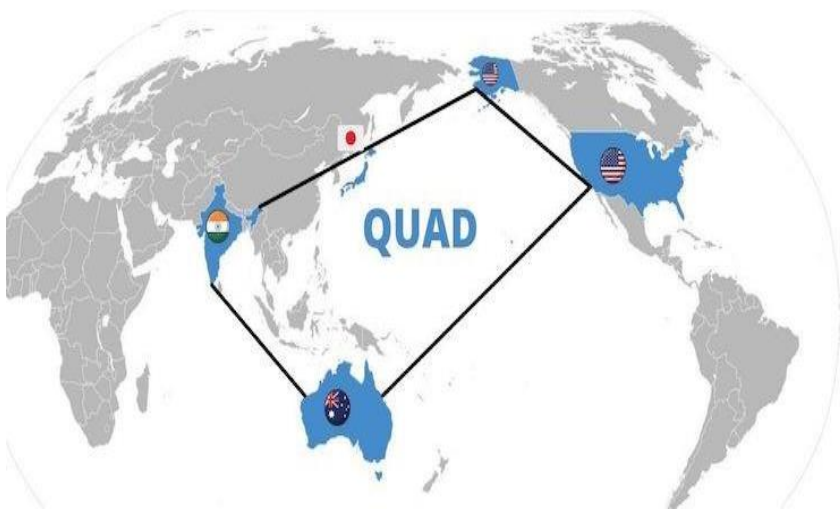
Ancaman lain yang muncul dari lingkungan eksternal NKRI di antaranya adalah dampak dari kompetisi geopolitik yang terjadi di kawasan. Konflik Laut China Selatan (LCS) merupakan salah satu contoh kompetisi geopolitik yang berpengaruh terhadap Indonesia. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pengklaim wilayah LCS tetapi dampak dari intensitas konflik dapat dirasakan dan telah ditanggapi dalam perumusan kebijakan pertahanan Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam buku *Putih Pertahanan Indonesia 2015*, peluang dan tantangan yang sangat kompleks serta faktor risiko penyebab konflik antarnegara dapat muncul dari sengketa yang terjadi di LCS. Penyebab konflik lainnya berasal dari sengketa Laut Cina Timur, Semenanjung Korea serta ketegangan di beberapa wilayah perbatasan antarnegara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Salah satu contoh upaya menghadapi ancaman keamanan maritim adalah melalui perumusan strategi perimbangan internal dan eksternal yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman di Laut Natuna Utara. Dalam hal perimbangan internal, Indonesia melakukan proses relokasi nelayan dari Pantai Utara Jawa ke Natuna, melakukan penambahan anggaran pertahanan khususnya alokasi untuk keamanan di Laut Natuna Utara dan pelaksanaan latihan militer bersama. Sedangkan dalam hal perimbangan eksternal, Indonesia melakukan kerja sama latihan bersama serta peningkatan kualitas industri pertahanan nasional melalui transfer teknologi dan pengetahuan, pertahanan dan persenjataan (Prayoga et al., 2021).

Namun, kerja sama internasional yang terjalin dapat berpotensi mendorong peningkatan kompetisi geopolitik di kawasan. Hal ini terjadi dalam format kerja sama atau aliansi antara negara-negara terutama antara Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya dan China beserta negara-negara yang berada di bawah pengaruhnya. Contohnya adalah kerja sama dalam bentuk *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad), kerja sama dalam kerangka BRI, serta aliansi AUKUS (Australia, United Kingdom, United

States). Bentuk kerja sama tersebut dapat juga memengaruhi keamanan nasional dan pertahanan negara Indonesia.

Pada awalnya, Quad yang terdiri dari AS, Jepang, India, dan Australia, seperti terlihat pada Gambar 1.1., hanya merupakan bentuk kerja sama misi kemanusiaan untuk wilayah terkena dampak Tsunami di Samudera Hindia pada 2004. Namun Quad kemudian berkembang menjadi aliansi pada 2007 dan pada Maret 2021 keempat negara anggota Quad meningkatkan komitmen mereka bekerja sama dalam diplomasi, ekonomi dan militer. Kehadiran Quad menjadi ancaman bagi China karena Quad dianggap sebagai bentuk kubu kekuatan AS. Namun, Quad dianggap lebih unggul daripada China karena forum dialog strategis ini melibatkan negara yang berlokasi strategis, memiliki sumber daya, persenjataan dan program latihan perang bersama (Alfiansyah & Prakoso, 2022).



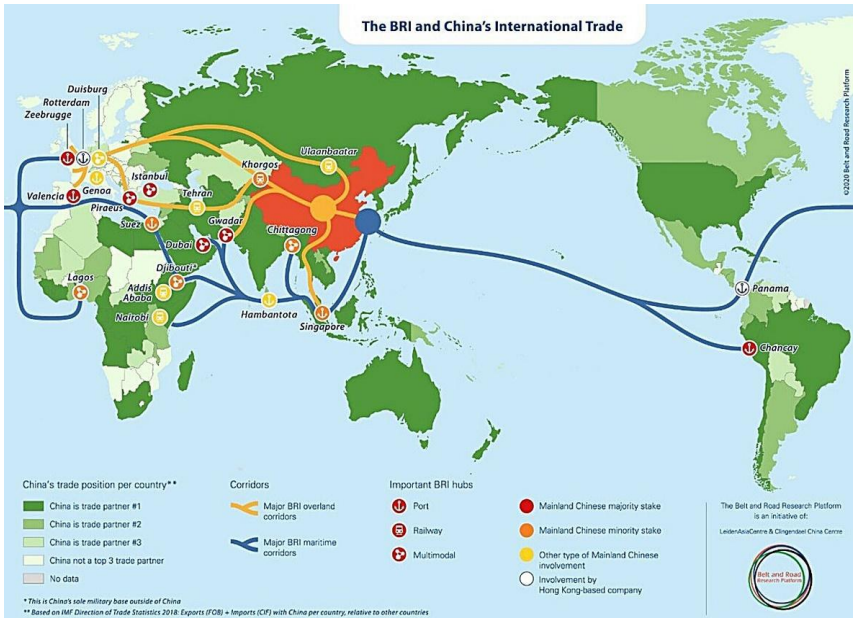
Gambar 1. 1. Peta Negara Anggota *Quadrilateral Security Dialogue*

Sumber: Zaheer (2022)

Bagi Australia sebagai salah satu anggota Quad, keberadaan kolaborasi keamanan kolektif tersebut merupakan suatu bentuk investasi bagi pembangunan kekuatan nasionalnya. Kepentingan

nasional Australia yang dikenal sebagai *Guardians of the Pacific* atau Penjaga Pasifik dapat dipenuhi oleh Quad. Aliansi tersebut dapat melindungi Pasifik dari ekspansi komunis serta ketidakstabilan keamanan kawasan (Yadav, 2022).

Sementara itu, untuk menghadapi kompetisi geopolitik ini khususnya dalam memperkuat pengaruh ekonomi dan politik internasional, China juga berupaya mengimplementasikan kebijakan BRI. Kebijakan China yang agresif ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di seluruh negara yang dilewati oleh jalur sutra ekonomi darat dan jalur sutra maritim berbasis laut. Jalur ini menghubungkan Asia, Afrika, Oseania, dan Eropa melalui pembangunan infrastruktur tersebut. Gambar 1.2 menunjukkan bagaimana China berupaya membangun jalur ini melalui koridor darat dan laut.



**Gambar 1. 2. Koridor Darat dan Koridor Maritim
*Belt and Road Initiative***

Sumber: (Belt and Road Research Platform, 2022)

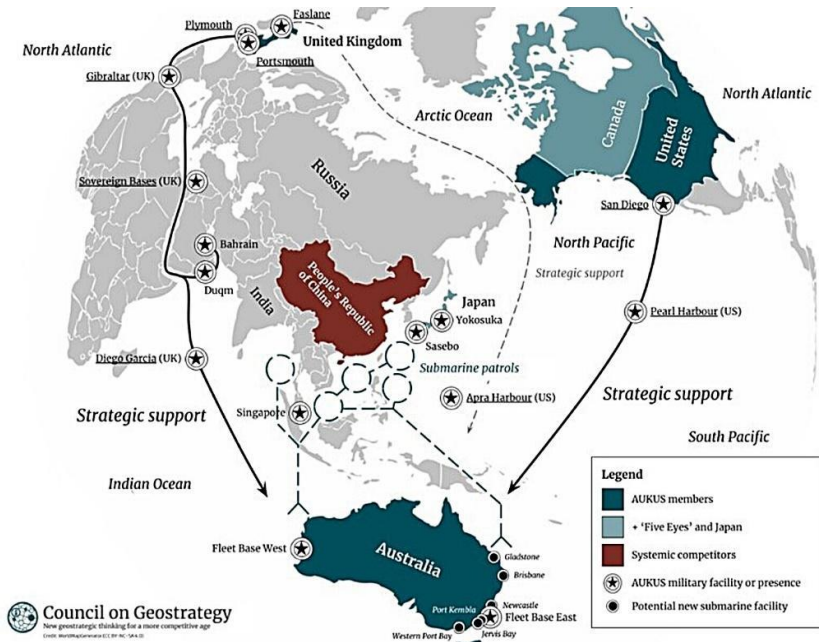
Indonesia memandang kebijakan BRI ini sebagai suatu peluang kerja sama karena Indonesia mendapatkan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur untuk realisasi Visi PMD dan China memerlukan Indonesia dalam rangka penguatan jalur sutra maritim dan jalur perdagangan darat di Kawasan Asia Tenggara. Meskipun demikian, jebakan hutang (*debt trap*) dari China dalam kerja sama ini perlu diwaspadai oleh Indonesia (Yudilla, 2019).

Sikap kontradiksi yang dilakukan China cukup menyulitkan negara-negara untuk memberikan kepercayaannya kepada China. Di satu sisi yaitu sisi geopolitik, China berusaha untuk menciptakan integrasi ekonomi di jalur sutra maritim dengan negara-negara termasuk negara-negara yang bersengketa dengannya di LCS. Di sisi lain, China bersikap asertif terkait wilayah perairan di LCS yang diklaimnya (Suropati et al., 2016).

Kompetisi geopolitik khususnya di wilayah Indo-Pasifik juga semakin memanas dengan adanya penandatanganan pakta pertahanan AUKUS pada 15 September 2021 antara Scott Morrison (Perdana Menteri Australia), Boris Johnson (Perdana Menteri Inggris (United Kingdom) dan Joe Biden (Presiden United States). AUKUS merupakan ancaman bagi kedaulatan Indonesia dan juga stabilitas keamanan di kawasan. Pakta pertahanan trilateral AUKUS ini dapat menimbulkan *security dilemma* di kawasan Indo Pasifik karena menciptakan potensi perlombaan persenjataan (*arms-race*) dan penyebaran nuklir (*nuclear proliferation*) (Choong & Storey, 2021).

Dengan adanya AUKUS, AS dan Inggris sepakat akan melakukan *transfer of technology* untuk mengembangkan dan menyediakan kapal selam bertenaga nuklir bagi Angkatan Laut Australia yang berada di Adelaide. Bagi Australia, kerja sama ini sebenarnya menempatkan kebijakannya dalam posisi dilema antara menekankan kemandirian (*self reliance*) atau ketergantungan strategis (*strategic dependence*) terhadap mitranya, AS dan Inggris (Adamy, 2022). Selain itu, dengan keterlibatan Australia di dalam AUKUS maka Australia berhadapan secara

langsung dengan China terkait ketegangan di Indo-Pasifik seperti terlihat pada Gambar 1.3. Australia juga berhadapan dengan tantangan terhadap kepercayaan mitra-mitra strategisnya khususnya ASEAN terhadap pembaharuan identitas dan pembaharuan kepentingan pertahanan Australia tersebut (Yadav, 2022).



Gambar 1. 3. Peta Geostrategi AUKUS

Sumber: (Rogers, 2022)

Karakteristik geografis Indonesia yang strategis beserta konsekuensi potensi dan dinamika ancaman yang muncul merupakan faktor yang telah memengaruhi perumusan strategi pertahanan negara dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional. Sebagai bentuk pertahanan maritim dan upaya menciptakan keamanan maritim, Indonesia menjalankan diplomasi di berbagai tingkat baik bilateral maupun multilateral. Dalam upaya pertahanan maritim, Indonesia melaksanakan DPM

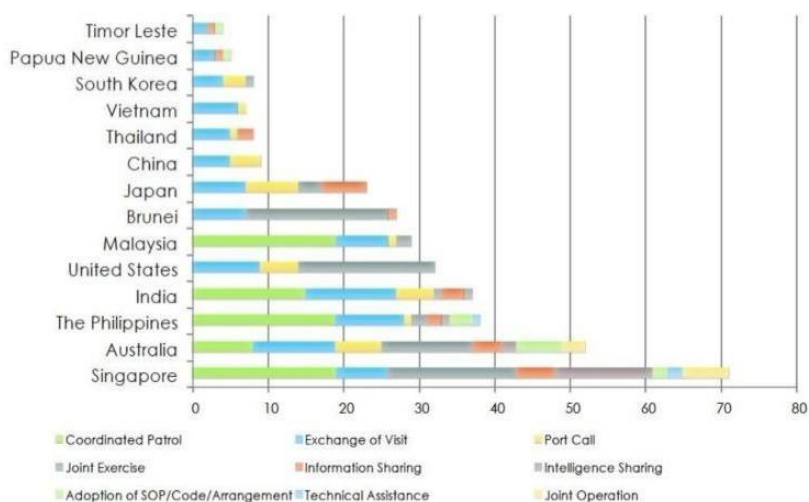
yang merupakan integrasi dari berbagai elemen eksternal yang terkandung dalam visi PMD. Strategi DPM bertujuan untuk mencapai tujuan pertahanan maritim yang mencakup keamanan dan keselamatan di laut maupun penciptaan stabilitas konflik dan ketegangan di kawasan. DPM tidak lain merupakan kegiatan diplomasi dengan tujuan memperkuat pertahanan maritim yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, dan TNI AL serta aset-aset strategis lainnya (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017).

Diplomasi di berbagai tingkat ini penting karena Indonesia merupakan negara yang memiliki keterkaitan dengan 10 negara tetangga yang berbatasan langsung di perairan yaitu dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, India, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017). Peningkatan intensitas DPM juga merupakan tindakan rasional karena kapabilitas sistem pertahanan Indonesia terbatas dalam menanggapi ancaman maritim dan ancaman nontradisional (Samy & Kusumadewi, 2021).

DPM Indonesia secara bilateral ditunjukkan dalam tabel hasil pengkajian Kementerian Luar Negeri untuk periode 1998 hingga 2016. Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Singapura, negara tetangga yang juga sama-sama merupakan negara anggota *Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN) tergolong sangat aktif dijalankan. Singapura merupakan mitra terdekat dalam kerja sama bilateral pertahanan maritim dengan Indonesia pada kurun waktu tersebut. Peringkat selanjutnya adalah Australia sebagai negara tetangga yang meskipun tidak memiliki identitas Asia Tenggara seperti Indonesia namun merupakan mitra Indonesia yang cukup baik dalam hal pertahanan maritim. Apalagi visi PMD memberikan peluang positif bagi peningkatan hubungan Indonesia dengan Australia sebagai dua negara yang merupakan *adjacent territory* atau memiliki keterhubungan geografi (Sobarini, 2021). Australia pun

menginginkan hubungan yang baik dengan Indonesia serta mengharapkan kawasan Asia yang makmur, aman dan sejahtera karena akan berpengaruh langsung terhadap Australia (Bidang Kemaritiman RI, 2019).

Tabel 1. 1. Diplomasi Maritim Indonesia (1998-2016)



Sumber: (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017)

Seperti halnya dengan Indonesia, Australia merupakan negara maritim yang meski sama-sama merupakan *middle power* tetapi memiliki kedekatan dengan negara adikuasa, AS. Berbeda dengan Singapura, Australia merupakan negara non anggota ASEAN yang tidak memiliki keterikatan norma dalam suatu kerja sama regional yang kuat seperti ASEAN.

Dilihat dari aspek historis, identitas dan *power*, hubungan bilateral Indonesia dan Australia sering kali mengalami periode pasang surut *up and down* bagaikan *roller coaster*. Hubungan bilateral Indonesia-Australia tidak selamanya berjalan harmonis karena kedua negara memiliki identitas dan kepentingan nasional yang berbeda. Berdasarkan teori *bonded and embedded*, hubungan bilateral

ini masih memerlukan penciptaan *trust* tidak saja antarpemimpin negara tetapi juga antara masyarakat. Terlebih, pergantian kepemimpinan politik Australia yang relatif berada dalam siklus yang cepat dapat memengaruhi hubungan dengan Indonesia (Troath, 2019).

Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia banyak sekali ditentukan oleh para elite politik yang ada di kedua negara tersebut. Pemerintah Australia kurang memahami kedaulatan Indonesia dan budaya sehingga hubungan bilateral pasca masa pemerintahan otoriter Soeharto merupakan hubungan yang rapuh. Hal ini dapat terjadi karena Australia melupakan *powerful strategic imperatives* yaitu *resilience and respect* (Nabbs-Keller, 2020).

Di satu sisi, beberapa insiden kurang enak menyangkut isu sensitif, kedaulatan, pernah mewarnai hubungan keduanya. Di antara insiden tersebut adalah saat terjadi referendum Timor-Timur, Bom Bali, penghinaan lambang negara Indonesia serta penolakan pengungsi (*push back policy*) pencari suaka ke Australia. Perdana Menteri Tony Abbott berdalih bahwa pengembalian “manusia perahu” oleh *Operations Sovereigns Border* (OSB) kembali ke perairan Indonesia adalah sejalan dengan kebijakan mengenai *Policy for Regional Deterrence Framework for Combat People Smuggling* sejak Agustus 2013. Selama periode 1 Desember 2013 hingga 20 Januari 2014, kapal-kapal Australia yang melakukan OSB melakukan pelanggaran sebanyak enam kali dengan memasuki perairan Indonesia (Ritonga, 2016).

Insiden lain adalah penyadapan telepon yang dilakukan oleh pihak intelijen Australia terhadap Presiden SBY serta sejumlah pejabat tinggi Indonesia pada November 2013. Indonesia bersikap tegas terhadap kejadian penyadapan sehingga menarik pulang Duta Besar Indonesia, Nadjib Riphath Kesoema, dari Canberra. Keputusan penarikan pulang Duta Besar ini dilakukan setelah terjadi perbedaan respons dalam menanggapi isu penyadapan tersebut. Panglima TNI, Moeldoko memutuskan kerja sama militer dengan Australia tanpa koordinasi terlebih dahulu. Sementara Menteri Luar Negeri, Marty

Natalegawa menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia sambil menunggu arahan selanjutnya dari Presiden SBY. Silang pendapat ini terjadi karena kurangnya koordinasi dan minimnya sinergi dalam pengambilan keputusan antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Pertahanan (Subagyo & Ginanjar, 2020).

Kekosongan pos Dubes Indonesia di Canberra berjalan selama enam bulan mengakibatkan beberapa aspek kerja sama tertunda pelaksanaannya. Penundaan terjadi di antaranya pada kerja sama pertukaran informasi dan intelijen, kerja sama latihan militer (*coordinated military operation*), kerja sama pencari suaka, patroli di lautan terkait *people smuggling*. Dua bulan setelah Australia meminta maaf atas insiden penyadapan tersebut, insiden lain pun terjadi. Insiden berikutnya adalah patroli Angkatan Laut (AL) Australia yang tidak berkoordinasi dengan TNI AL ketika menghalau pengungsi pencari suaka politik. Australia memakaikan sekoci kepada para pengungsi untuk mengirimkannya kembali ke perairan Indonesia (Ritonga, 2016).

Penarikan pulang duta besar yang merupakan contoh kegagalan diplomasi Australia, pernah pula dilakukan oleh Perdana Menteri Tony Abbott. Duta Besar Paul Grigson ditarik mundur dari Jakarta oleh PM Abbott sebagai wujud protes kepada Pemerintah Indonesia atas tindakan eksekusi terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan pengedar narkoba asal Australia di Indonesia (Alfeini, 2017).

Beberapa insiden yang tidak mengenakan memang terjadi di dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut, namun DPM Indonesia dengan Australia dianggap telah cukup berhasil. DPM dilakukan di beberapa tingkat yaitu *high level committee*, atase pertahanan, perjanjian kerja sama pertahanan bilateral, pelatihan tentara dan personel pertahanan sipil, kontak dan pertukaran antara personil militer dan satuan dan kunjungan kapal, penyediaan peralatan militer dan bantuan material lainnya, latihan militer bilateral atau multilateral untuk tujuan pelatihan (Pramitha, 2017).

Potensi ancaman terhadap pertahanan maritim Indonesia juga dapat muncul dari ancaman keamanan tradisional dan nontradisional yang ada di antara kedua negara. Setidaknya terdapat tiga bentuk ancaman terkait ancaman keamanan maritim dari Australia. Pertama, kepemilikan Pulau Pasir (*Asmohre Reef*) yang diklaim sebagai milik Australia sepenuhnya padahal nelayan Indonesia dari Pulau Rote masih banyak yang mengambil ikan di area tersebut (Widodo et al., 2023). Kedua, belum tuntasnya kesepakatan perbatasan wilayah antara Timor Leste dan Australia mengenai Celah Timor (*Timor Gap*) yang memiliki kandungan sumber daya minyak dan gas bumi. Sengketa wilayah antara kedua negara tetangga kita ini memberikan pengaruh kepada penentuan batas wilayah Indonesia dengan Timor Leste yang masih belum terselesaikan (Qunuri & Pradjoko, 2021). Ketiga, kehadiran AS, sekutu Australia, dalam *United States Indo-Pacific Command* (US INDOPACOM) di Indo Pasifik dapat menimbulkan *security dilemma* apabila tidak terjalin *confidence building measures* (CBM) dengan negara-negara di kawasan. Salah satu kegiatan yang berhasil dilakukan adalah latihan bersama US INDOPACOM dengan Indonesia dalam Latgabma *Super Garuda Shield* (SGS) pada 2022 (IndonesiaDefense, 2022)

Meskipun Indonesia dan Australia sering kali mengalami dinamika terkait keharmonisan hubungan bilateral namun dalam konteks hubungan pertahanan maritim kedua negara, diplomasi berjalan cukup baik bahkan menghasilkan kesepakatan penting. Di antara kesepakatan yang lahir adalah *Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of Australia and The Government of the Republic of Indonesia* (2017) dan *Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation Between The Government of Australia and The Government of The Republic of Indonesia* (2018). Kesepakatan ini penting bagi Indonesia yang tengah mempersiapkan diri mewujudkan keamanan maritim sebagai poros maritim dunia. Di dalam rencana kerja bersama tersebut ditetapkan 9 (sembilan) area kerja sama untuk mencapai 15

(lima belas) tujuan bersama terkait keamanan maritim. Untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan sinergi antaraktor yang terlibat dari berbagai kementerian dan lembaga, bukan sekadar Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan (*Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Australia*, 2018).

Dialog dan pertemuan dari mulai pejabat tingkat tinggi telah dilakukan dalam kerangka kerja sama, untuk membicarakan hal strategis hingga tingkat teknis di antara para ahli, operasi dan latihan bersama, kerja sama pendidikan dan dalam bidang lainnya. Kerja sama berjalan dengan baik bahkan hingga terjadi pertemuan rutin antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan (*2 + 2 Meeting*). Pada pertemuan 2 +2 yang berlangsung di Canberra pada 9 Februari 2023 keempat menteri membahas keberhasilan program pendidikan dan pelatihan bagi personel TNI di Australia. Selain itu, disepakati adanya peningkatan kerja sama dalam bidang kedokteran militer, teknologi militer dan industri pertahanan (Kemhan, 2023).

Kedua negara sama-sama memiliki kepentingan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik. Selain itu, kedua negara sama-sama melakukan reposisi strategi maritim di mana Indonesia menetapkan visi Poros Maritim Dunia dan Australia mengadopsi *Indo-Pacific Strategy* (Pramitha, 2017). Namun, sebagai negara sekutu AS, reposisi strategi maritim Australia yaitu *Indo-Pacific Strategy* sangat terkait dengan konsep *Free and Open Indo-Pacific* yang ditetapkan oleh AS dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan global. Namun, sebenarnya ada keterkaitan yang erat antara kepentingan AS dan kepentingan Australia yang juga memiliki kedekatan dengan kepentingan Indonesia sehingga memunculkan konsepsi triangular *Indo-Pacific geometry* yang menempatkan kemungkinan tiga negara ini berada dalam hubungan kerja sama yang lebih erat (Kelton & Willis, 2019).

Konsep kepentingan nasional yang mendasari kebijakan luar negeri atau diplomasi suatu negara tidak selamanya benar-benar

merupakan perwujudan kepentingan seluruh rakyatnya sebagaimana yang diasumsikan oleh perspektif Realisme dalam Teori Hubungan Internasional. Dalam implementasi kebijakan luar negeri, para aktor diplomasi dapat pula memperjuangkan *human* atau bahkan *global interests* (Manan, 2017).

Dengan demikian, konsep kepentingan nasional suatu negara dapat diwujudkan berbeda-beda oleh para perumus strategi dan pelaku diplomasi. Hal ini memungkinkan adanya beragam implementasi dan konseptualisasi kepentingan nasional oleh para aktor. Tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945 alinea ke-4.

Cakupan kepentingan nasional yang luas memungkinkan DPM tidak saja melibatkan Kementerian Luar Negeri pada *first track diplomacy* melainkan sinergi berbagai kementerian, lembaga, Angkatan Laut (AL), Bakamla, bahkan juga melibatkan individu pada *one and a half track of diplomacy*. Keterlibatan berbagai aktor dalam DPM memungkinkan adanya berbagai perwujudan kepentingan nasional oleh para aktor.

Salah satu contoh kepentingan nasional yang diwujudkan oleh aktor-aktor diplomasi terlihat dalam kerja sama antara Bakamla RI dengan *Australian Border Force* (ABF). Kedua aktor ini menerapkan diplomasi kooperatif melalui pembentukan *Maritime Security Cooperation Agreement*. Baik Bakamla maupun ABF terikat dalam pelebagaan formal kerja sama sehingga kedua aktor tersebut memiliki nilai, norma, tujuan dan peranan yang disepakati bersama. Kerja sama antara kedua aktor berlangsung dengan baik bahkan tetap berjalan meskipun terbatas selama pandemi (Prabowo, 2022).

Diplomasi yang dijalankan oleh Bakamla sejalan dengan tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla bersifat *Single Agency Multi Task* yang diharapkan menjadi lembaga koordinator dalam keselamatan dan keamanan laut (*sea and coast guard*). Peran Bakamla menentukan

pencapaian Visi PMD karena mendukung penangkalan ancaman melalui laut demi menjaga stabilitas kawasan maritim. Selain itu, Bakamla juga melindungi dan menjaga perbatasan laut dengan negara tetangga sebagai komponen cadangan pendukung peran TNI (Palar et al., 2021).

BAB 2

RUANG LINGKUP DIPLOMASI

Bab ini membahas hal mendasar terkait diplomasi yaitu definisi, fungsi, dan tujuan. Pembahasan juga mencakup *power* dan diplomasi serta sinergi dalam diplomasi. Jenis-jenis diplomasi yang dilihat dari tingkatan, aktor dan sektor diplomasi juga dibahas dalam bab ini. Pembahasan bab ini dilengkapi dengan uraian mengenai bagaimana diplomasi dikaji dalam beberapa perspektif Ilmu Hubungan Internasional di antaranya pendekatan Realis, Liberalis, dan Konstruktivis.

A. Definisi Diplomasi

Secara etimologis, kata 'diplomasi' berasal dari kata Yunani '*diploun*', yang berarti dilipat menjadi satu. Istilah ini mengacu pada dua keping logam yang dilipat menjadi satu, yang digunakan sebagai surat jalan atau semacam paspor pada masa tersebut.

Beberapa definisi diplomasi diuraikan oleh beberapa tokoh diplomasi berikut ini.

Diplomacy is the employment of tact, shrewdness and skill in any negotiation or transaction and the art of negotiation in order to achieve the maximum of costs, within a system of politics in which war is a possibility (Quincy Wright).

Diplomasi adalah penggunaan kebijaksanaan, kecerdikan, dan keterampilan dalam setiap negosiasi atau transaksi, serta seni negosiasi untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal, dalam sistem politik di mana perang merupakan kemungkinan. Diplomasi melibatkan taktik yang halus dan penuh pertimbangan, kemampuan membaca situasi dengan jeli, serta keahlian teknis dan

pengetahuan mendalam untuk melaksanakan tugas dengan efektif. Tujuan utama dari diplomasi adalah mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mencegah konflik militer, atau mengelola hubungan internasional agar tidak berkembang menjadi perang. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya berfokus pada komunikasi dan negosiasi, tetapi juga pada strategi dan kreativitas dalam mengelola dinamika kekuasaan dan psikologi antarnegara.

Menurut Sharp (2019), diplomasi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi dan negosiasi antarnegara, tetapi juga terkait erat dengan identitas kolektif (*collective identities*). Identitas kolektif ini menjawab pertanyaan mendasar tentang “siapa kita” (*who we are*) dan “siapa yang bukan kita” (*who we are not*). Dalam konteks diplomasi, identitas ini membantu menentukan bagaimana suatu negara melihat dirinya sendiri dan bagaimana negara tersebut memposisikan diri terhadap negara lain. Misalnya, sebuah negara mungkin melihat dirinya sebagai pelopor dalam hak asasi manusia, sehingga dalam praktik diplomasi, negara tersebut akan menekankan isu-isu terkait hak asasi manusia dan berusaha membedakan dirinya dari negara-negara yang tidak mendukung nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang identitas kolektif menjadi sangat penting dalam strategi diplomasi, karena memengaruhi cara negara berinteraksi dan membangun hubungan dengan negara lain.

Menurut Nicholson (1985), diplomasi memiliki beberapa definisi yang mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan hubungan internasional. Berikut adalah penjelasan definisi-definisi tersebut:

1. *Diplomacy includes the management of international relations by means of negotiation.* Diplomasi meliputi pengelolaan hubungan internasional dengan menggunakan sarana negosiasi. Artinya, dalam diplomasi, negosiasi menjadi alat utama untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai isu antarnegara.
2. *Diplomacy represents a skill to address ideas in the conduct of international intercourse and negotiations;* Diplomasi juga

mencerminkan keterampilan untuk menyampaikan ide-ide dalam pelaksanaan hubungan internasional dan negosiasi. Hal ini menunjukkan bahwa seorang diplomat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat menyampaikan dan mendiskusikan pandangan serta kepentingan negaranya dengan efektif.

3. *Diplomacy is the methods by which these relations among nations are adjusted and managed by ambassadors and envoy.* Diplomasi merupakan metode yang digunakan untuk menyesuaikan dan mengelola hubungan antarnegara, yang dilakukan oleh duta besar dan utusan. Mereka bertugas sebagai perwakilan negara mereka untuk menjalankan fungsi-fungsi diplomasi, termasuk negosiasi, representasi, dan pelaporan.
4. *Diplomacy is business or art of the diplomats to persuade the others.* Diplomasi adalah bisnis atau seni dari para diplomat untuk meyakinkan pihak lain. Dalam konteks ini, diplomasi dianggap sebagai seni karena melibatkan keterampilan persuasi, di mana diplomat berusaha memengaruhi dan meyakinkan negara lain untuk mencapai tujuan dan kepentingan negaranya.

Menurut Balzacq et al. (2020):

1. *Diplomacy refers to the “action and the manner of representing one’s country to a foreign nation and in international negotiations.* Diplomasi merujuk pada tindakan dan cara merepresentasikan negara seseorang kepada negara asing serta dalam negosiasi internasional. Ini berarti bahwa diplomasi melibatkan berbagai tindakan yang dilakukan oleh seorang diplomat atau perwakilan negara dalam berinteraksi dengan negara lain, serta bagaimana mereka menjalankan tugas tersebut dengan cara yang efektif dan terhormat.
2. *Diplomacy is concerned with the “external policy of a country, of a government.”* Dalam hal ini, diplomasi mencakup semua strategi dan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah untuk berinteraksi

dengan negara lain guna mencapai tujuan nasional mereka di panggung internasional.

3. *Diplomacy is the "branch of political science which concerns international relations."* Ini berarti bahwa diplomasi merupakan bagian dari studi ilmu politik yang memfokuskan pada bagaimana negara-negara berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka menyelesaikan konflik, serta bagaimana mereka bekerja sama dalam berbagai isu global.

Menurut Sir Ernest Satow (1922) "*Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between independent states.*" Diplomasi adalah seni mengaplikasikan kecerdasan dan ketaktisan dalam menjalankan hubungan resmi antara negara-negara yang merdeka. Pernyataan ini menekankan bahwa diplomasi bukan sekadar pertukaran pesan atau pertemuan antara pejabat negara, melainkan melibatkan pemikiran yang cerdas dan strategi yang bijaksana. Diplomasi membutuhkan keahlian untuk mengelola hubungan internasional dengan cara yang menghormati kepentingan dan kedaulatan masing-masing negara, serta kemampuan untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik tanpa mengorbankan martabat atau tujuan nasional.

Dalam konteks ini, kecerdasan yang dimaksud oleh Satow melibatkan pengetahuan mendalam tentang politik, ekonomi, budaya, dan sejarah negara-negara yang terlibat. Seorang diplomat harus mampu menganalisis situasi dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat dan pemahaman yang komprehensif. Selain itu, ketaktisan berarti kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang sopan, diplomatis, dan efektif, serta menghindari tindakan atau kata-kata yang dapat menimbulkan ketegangan atau salah pengertian.

Diplomasi merupakan suatu seni (*art*) sehingga tidak memiliki rumusan baku untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, ada beberapa standar diplomasi yang perlu ditegakkan agar tercapai efektivitasnya. Pertama, perlu bersikap realistis menetapkan tujuan

dan langkah. Kedua, aktor diplomasi perlu menghindari terlalu dogmatik, justru mengembangkan sikap yang lebih fleksibel. Ketiga, mengembangkan sikap terbuka terhadap informasi dan pandangan negara lain sehingga aktor diplomasi dapat memahami sisi negara lain. Keempat, mengutamakan kesamaan daripada perbedaan di antara pihak yang berdiplomasi. Kelima, sifat sabar menghadapi aktor negara lain harus ada karena kita juga perlu menghargai derajat dan *prestige* negara lain (Supriyatno, 2014).

Diplomasi sebagai instrumen pemerintahan yang baik harus menyesuaikan diri untuk menghadapi tantangan baru, menjadi lebih relevan, terbuka dan gesit, mengubah metode dan memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan oleh revolusi teknologi. Faktor politik utama yang memengaruhi diplomasi adalah penurunan peran pemerintah. Sektor swasta, kelompok agama, imigran, media, dan entitas masyarakat sipil lainnya menuntut agar kepentingan mereka dipertimbangkan dan mereka memiliki suara dalam membuat dan melaksanakan kebijakan luar negeri (Halkis, 2020). Telah banyak aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri selain lembaga pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri yang dikenal sebagai aktor pada jalur pertama diplomasi (*first track diplomacy*). Hal ini sejalan dengan konsep Louise Diamond mengenai *multitrack diplomacy*. Menurutnya terdapat setidaknya 9 aktor utama atau 9 track yang berperan yaitu pemerintah, aktor nonnegara seperti kelompok profesional yang berkontribusi terhadap diplomasi, kelompok bisnis, warga negara, kelompok peneliti/lembaga *think thank* dan lembaga pendidikan, para aktivis/penggiat upaya perdamaian, kelompok keagamaan, kelompok pemberi dana (donor) dan media serta opini publik.

Dalam menjalankan diplomasi, negara memiliki tujuan politis lain untuk menciptakan legitimasi konsepsi peran negara. Visi PMD merupakan contoh legitimasi peran yang dapat dikembangkan oleh Presiden Jokowi. Contoh lain, Presiden SBY melakukan legitimasi terhadap konsepsi peran Indonesia terhadap kalangan domestik dan internasional bahwa Indonesia berperan aktif di tingkat global.

Empat faktor 'legitimasi peran' yang digunakan SBY adalah menjadikan Indonesia sebagai suara mewakili negara berkembang (*a voice for developing countries*), pemimpin regional (*a regional leader*), pendukung demokrasi (*an advocate of democracy*), dan jembatan penciptaan perdamaian bagi negara-negara di dunia internasional (*an emerging power bridge-leader*) (Karim, 2021).

Dalam dunia hubungan internasional, terdapat beberapa istilah penting yang perlu dipahami dengan jelas: diplomatik, diplomasi, dan diplomat. Istilah 'diplomatik' merujuk pada cara hubungan antara kelompok-kelompok di organisasi berdasarkan pemahaman bersama tentang siapa yang melakukannya, bagaimana melakukannya, dan dengan prioritas apa – terutama untuk menghindari konflik yang tidak diinginkan.

Diplomasi adalah praktik ketika orang-orang mengelola hubungan antara kelompok-kelompok dengan pemahaman bersama tentang cara menangani hubungan tersebut dan apa yang dianggap penting. Sedangkan 'diplomat' adalah individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangani hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.

Sistem internasional yang penuh dengan dinamika dan ketidakpastian, maka diplomasi dalam hubungan internasional memiliki arti penting. Menurut Sharp (2019), keberhasilan diplomasi dapat diukur dari seberapa jauh tujuan awalnya tercapai. Namun, menjalankan misi diplomatik tidaklah mudah. Misi ini sering kali penuh dengan ketegangan dan risiko.

Dengan demikian, diplomasi adalah proses yang kompleks dan menantang, yang menuntut para pelakunya untuk terus belajar dan beradaptasi dengan dinamika hubungan internasional yang selalu berubah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan dan memelihara hubungan damai dan produktif antara negara-negara, serta mencari solusi yang saling menguntungkan dalam menghadapi isu-isu global.

B. Fungsi dan Tujuan Diplomasi

Diplomasi memiliki fungsi dan tujuan yang penting dalam menjaga hubungan baik antar negara. Salah satu fungsi utamanya adalah menyelesaikan berbagai perbedaan internasional yang mungkin muncul di antara negara-negara. Diplomasi bertujuan untuk menemukan solusi atas perbedaan tersebut melalui dialog atau perundingan. Proses ini sangat bergantung pada hubungan pribadi yang baik antara para diplomat atau perwakilan negara-negara yang terlibat. Dengan adanya hubungan yang harmonis dan saling pengertian, upaya untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan perbedaan dapat berjalan lebih lancar. Dengan demikian, diplomasi berperan penting dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional, memastikan bahwa konflik dan ketegangan dapat diatasi melalui komunikasi yang efektif dan kerja sama.

Sementara itu, fungsi umum diplomasi yang dijalankan oleh diplomat yang telah dipahami selama ini di antaranya yaitu:

1. *Reporting*, melaporkan perkembangan berbagai informasi penting. Informasi ini dapat berupa informasi yang ada di negara akreditasi untuk dilaporkan ke negara asal diplomat. Selain itu, dapat pula berupa informasi penting yang dianggap perlu diketahui oleh negara akreditasi. Informasi ini terkait dengan bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud) dan lainnya. Untuk menjalankan fungsi ini, diplomat perlu lihai melihat berbagai informasi dan juga peluang yang perlu disebar atau dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.
2. *Representation*, mewakili negaranya secara resmi sebagai utusan diplomatik di negara akreditasi. Untuk menjalankan fungsi ini, diplomat harus mampu berpenampilan dan bertata krama diplomatik.
3. *Negotiation*, membawa pesan (*messenger*) dan bertindak sesuai instruksi yang diberikan oleh negaranya dalam negosiasi. Dalam menjalankan fungsi ini, diplomat harus mampu mengemban

tanggungjawabnya dalam proses dan upaya memenangkan negosiasi.

Tujuan diplomasi dapat dibagi menjadi beberapa aspek penting yang saling melengkapi dan mendukung pencapaian kepentingan nasional suatu negara (Shoelhi, 2018). Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing tujuan diplomasi:

1. Perolehan informasi (*acquisition*)

Diplomasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dari negara lain. Informasi ini sangat penting sebagai bahan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan memiliki data dan informasi yang tepat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih efektif dan strategis. Informasi yang diperoleh melalui diplomasi juga membantu dalam memahami situasi global, tren politik, dan ekonomi internasional yang dapat memengaruhi negara.

2. Pemeliharaan hubungan baik dan kerja sama (*preservation*)

Salah satu tujuan utama diplomasi adalah menjaga dan memelihara hubungan baik serta kerja sama dengan negara-negara lain. Hubungan yang baik ini penting untuk menciptakan lingkungan internasional yang stabil dan damai. Melalui diplomasi, negara-negara dapat menyelesaikan perbedaan dan konflik dengan cara damai, membangun kepercayaan, dan memperkuat ikatan persahabatan. Kerja sama internasional yang baik juga membuka peluang untuk kolaborasi dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pendidikan, budaya, dan teknologi.

3. Peningkatan kesejahteraan (*augmentation*)

Diplomasi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan negara dan rakyatnya. Melalui hubungan diplomatik yang baik, negara dapat membuka peluang perdagangan, investasi, dan bantuan internasional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, diplomasi juga memungkinkan akses terhadap teknologi baru, pengetahuan, dan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi tetapi juga mencakup sosial, budaya, dan lingkungan.

4. Pembagian yang adil (*proper distribution*)

Tujuan diplomasi lainnya adalah memastikan bahwa manfaat dari hubungan internasional didistribusikan secara adil. Diplomasi berusaha untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi sumber daya, peluang, dan keuntungan dari kerja sama internasional. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertinggal. Pembagian yang adil ini penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Melalui diplomasi yang efektif, negara dapat mencapai tujuan-tujuan ini dan memastikan bahwa kepentingan nasional serta kesejahteraan masyarakatnya terjaga dan terus meningkat.

Diplomasi adalah seni berkomunikasi dengan negara atau pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam berdiplomasi, tidak ada satu pendekatan yang selalu berhasil atau teori yang bisa diterapkan secara pasti. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam proses diplomasi. Setiap negara atau pihak memiliki tujuan dan prioritas yang unik, sehingga strategi yang efektif harus disesuaikan dengan konteks dan situasi tertentu.

Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan sebagai strategi ketika akan melakukan diplomasi (Shoelhi, 2018):

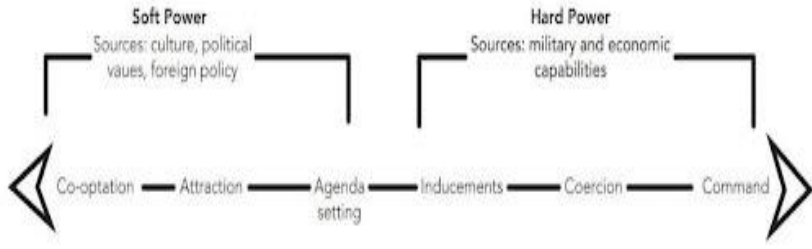
1. *Conditioning* (pengondisian). Pengondisian merujuk pada penciptaan kondisi atau suasana yang mendukung sebelum memulai proses diplomasi. Ini berarti mempersiapkan segala sesuatu agar situasi yang dihadapi lebih kondusif dan menguntungkan. Misalnya, membangun hubungan baik dan saling percaya dengan pihak lain dapat menciptakan suasana yang lebih positif untuk berdialog.
2. *Timing* (pemilihan waktu). Memilih waktu yang tepat sangat penting dalam diplomasi. Keberhasilan suatu negosiasi sering kali

bergantung pada kapan waktu yang dipilih untuk memulai pembicaraan. Misalnya, mengajukan proposal saat pihak lain sedang dalam situasi yang baik atau saat kebutuhan mereka sedang tinggi dapat meningkatkan peluang keberhasilan.

3. *Placing* (penentuan lokasi). Lokasi yang tepat juga memegang peranan penting. Tempat pertemuan yang nyaman dan netral dapat membantu menciptakan suasana yang lebih terbuka dan kurang tegang. Lokasi yang dipilih harus mendukung komunikasi yang efektif dan dapat meningkatkan rasa keamanan serta kenyamanan kedua belah pihak.
4. *Priming* (penetapan fokus). Fokus pada tujuan utama adalah kunci dalam diplomasi. Hal ini berarti pihak yang berdiplomasi harus memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dan memusatkan perhatian pada tujuan tersebut selama proses negosiasi. Dengan memiliki fokus yang jelas, usaha diplomasi akan lebih terarah dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal yang kurang relevan.
5. *Organizing* (*pengorganisasian*). Kesiapan dan keteraturan sangat diperlukan dalam diplomasi. Segala persiapan, mulai dari dokumen hingga tim negosiasi, harus diorganisasi dengan baik. Kesiapan ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang isu yang dibahas, serta strategi yang matang untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi selama negosiasi.

C. Power dan Diplomasi

Kekuatan dan diplomasi memegang peran penting dalam mencapai tujuan kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan dalam diplomasi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kekuatan lunak (*soft power*) dan kekuatan keras (*hard power*) (Hastedt & Felice, 2020). Keputusan mengenai penggunaan *soft power* atau *hard power* dalam kebijakan luar negeri, dapat dipertimbangkan sesuai dengan rangkaian pilihan (*continuum of choice*) yang dikemukakan oleh Joseph Nye, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. 1. Power Continuum Joseph Nye

Sumber: (Hastedt & Felice, 2020)

Soft power adalah kemampuan suatu negara untuk memengaruhi dan meyakinkan negara lain melalui daya tarik informasi, budaya, nilai-nilai, dan ide-ide. Dalam konteks ini, negara tidak menggunakan ancaman atau paksaan, melainkan membangun hubungan yang baik dan positif, cenderung mengarah kepada *co-optation*. Contoh kekuatan lunak termasuk diplomasi budaya, program beasiswa untuk pelajar asing, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kekuatan lunak memungkinkan suatu negara mencapai tujuannya dengan cara yang lebih halus dan persuasif, meningkatkan citra dan pengaruhnya di mata dunia. Menurut Joseph Nye, sumber dari *soft power* adalah budaya, nilai-nilai politik dan kebijakan luar negeri.

Di sisi lain, *hard power* adalah penggunaan kekuatan untuk memaksa dan mengarahkan tindakan negara lain agar sesuai dengan keinginan negara yang bersangkutan. Menurut Joseph Nye, sumber *hard power* adalah kemampuan militer dan kemampuan ekonomi. Kekuatan keras bisa berupa intervensi militer, penerapan embargo ekonomi, atau sanksi-sanksi lain yang dirancang untuk menekan negara target agar mengikuti kebijakan yang diinginkan. Meskipun sering efektif dalam jangka pendek, penggunaan kekuatan keras dapat menyebabkan ketegangan dan konflik yang lebih besar di masa depan.

Kombinasi antara kekuatan lunak dan keras sering kali diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri yang

komprehensif dan berkelanjutan. Negara yang bijaksana akan tahu kapan harus menggunakan persuasi halus dan kapan harus menunjukkan kekuatan untuk menjaga keamanan dan kepentingannya di kancah internasional.

D. Sinergi dalam Diplomasi

Sering kali, kita beranggapan bahwa diplomasi adalah domain eksklusif para diplomat, yaitu individu yang secara resmi diutus oleh negara untuk menjalankan tugas-tugas diplomatik. Atau dengan kata lain, diplomasi hanyalah menjadi tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Namun, kenyataannya, aktor-aktor dalam diplomasi tidak terbatas pada diplomat yang berasal dari Kemlu saja tetapi juga dari berbagai kementerian lain yang mendukung pelaksanaan diplomasi. Selain diplomat yang merupakan wakil resmi negara, ada juga aktor nondiplomat yang memainkan peran penting dalam diplomasi. Aktor nondiplomat ini bisa berasal dari sektor swasta, organisasi nonpemerintah (LSM), bahkan individu yang berperan sebagai duta informal. Mereka semua berkontribusi dalam membangun hubungan internasional dan mempromosikan kerja sama antarnegara melalui berbagai jalur dan pendekatan.

Dengan demikian, sinergi dalam diplomasi melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor, baik yang berasal dari pemerintah maupun sektor nonpemerintah, untuk mencapai tujuan bersama di panggung internasional. Peran mereka saling melengkapi dan memperkuat upaya diplomatik yang dilakukan oleh negara.

E. Jenis-jenis Diplomasi

Diplomasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis: tingkat atau ruang lingkup, aktor, sektor dan media. Jenis yang pertama adalah diplomasi terbagi berdasarkan tingkat atau ruang lingkup pelaksanaannya:

1. Tingkat bilateral

Diplomasi bilateral adalah hubungan yang dijalin antara dua negara, yang memiliki fokus utama pada kepentingan

bersama dan saling pengertian di antara keduanya. Salah satu langkah penting pada tingkat bilateral adalah pendirian kantor perwakilan negara, seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal. Kantor perwakilan ini berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dan negara yang bersangkutan.

Di dalam kantor perwakilan tersebut, terdapat diplomat yang merupakan bagian dari *diplomatic corps*. Diplomat-diplomat ini memiliki berbagai fokus keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Mereka bertugas untuk menjaga dan meningkatkan hubungan bilateral antara kedua negara.

Selain itu, kantor perwakilan juga menjalankan beberapa fungsi penting lainnya. Salah satunya adalah fungsi pelaporan, yang mana diplomat akan melaporkan perkembangan atau isu-isu penting yang terjadi di negara tempat mereka bertugas kepada pemerintah Indonesia. Fungsi komunikasi juga tidak kalah penting, karena diplomat harus memastikan bahwa informasi yang relevan dapat disampaikan dengan jelas dan tepat waktu antara kedua negara.

Tidak kalah penting dalam diplomasi tingkat bilateral adalah diplomasi publik. Diplomasi publik berfokus pada upaya untuk memperkenalkan budaya, nilai-nilai, dan kebijakan suatu negara kepada masyarakat internasional, termasuk masyarakat negara mitra. Melalui diplomasi publik, diharapkan dapat tercipta saling pengertian yang lebih baik serta memperkuat citra positif negara di mata dunia.

2. Tingkat regional

Diplomasi tingkat ini merujuk pada interaksi antarnegara yang berada dalam suatu kawasan tertentu. Biasanya, dalam diplomasi regional, negara-negara yang terlibat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang bermanfaat bagi kawasan tersebut.

Salah satu bentuk diplomasi regional yang sering dijumpai adalah diplomasi multilateral. Diplomasi multilateral ini melibatkan lebih dari dua negara dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan kebijakan yang menguntungkan banyak pihak dalam suatu kawasan. Dalam diplomasi regional multilateral, negara-negara yang terlibat biasanya mengadakan pertemuan, forum, atau organisasi bersama untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan kawasan mereka, seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan hidup.

3. Tingkat multilateral

Diplomasi multilateral merujuk pada bentuk institusional yang mengoordinasikan hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hubungan internasional. Menurut Ruggie (1992), diplomasi ini melibatkan kerja sama antarnegara dengan tujuan bersama dalam berbagai isu global.

Dalam diplomasi multilateral, sering kali ada perwakilan tetap yang ditempatkan di markas besar organisasi internasional, seperti PBB, untuk memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan antara negara-negara anggota. Pertemuan-pertemuan multilateral biasanya diadakan dalam bentuk diplomasi puncak (*summit diplomacy*) atau diplomasi konferensi, yang sering melibatkan negara-negara besar untuk menyelesaikan masalah-masalah global.

Selain itu, terdapat juga konsep paradiplomasi, yaitu kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah subnegara atau daerah, yang melibatkan hubungan internasional meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah pusat. Menurut Soldatos (dalam Paquin, 2020), paradiplomasi adalah kelanjutan langsung dari kegiatan pemerintahan subnegara dalam hubungan luar negeri. Salah satu pertanyaan penting yang muncul adalah apakah paradiplomasi ini sejalan dengan atau

bertentangan dengan kebijakan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat suatu negara.

Diplomasi multilateral juga dapat melibatkan apa yang disebut dengan diplomasi klub atau kelompok, yang merupakan diplomasi yang dilakukan oleh sekelompok negara dengan ukuran kecil, yang lebih mengedepankan informalitas dan kerahasiaan. Contoh dari diplomasi ini termasuk forum seperti G20, AUKUS, dan Quad, yang merupakan pertemuan negara-negara dengan tujuan spesifik dan terbatas, namun sangat berpengaruh dalam dinamika politik global.

Diplomasi berdasarkan aktor terdiri atas:

1. Negara (*states*)

Diplomasi yang melibatkan negara-negara telah berlangsung sejak zaman Yunani, Romawi, Italia, dan Prancis. Pada tahun 1536, Prancis menempatkan konsul di Istanbul, menandakan awal mula diplomasi konsuler. Seiring berjalannya waktu, negara-negara lain mengikuti jejak ini dengan membentuk Kementerian Luar Negeri untuk mengatur hubungan diplomatik mereka. Misalnya, Prancis mendirikan Kementerian Luar Negeri pada tahun 1589, Inggris pada tahun 1782, dan Amerika Serikat pada tahun 1789. Kementerian-kementerian ini menjadi tulang punggung dalam menjalankan diplomasi negara, memastikan adanya komunikasi dan kerja sama yang efektif dengan negara lain.

2. Organisasi antarpemerintah (*intergovernmental organizations*)

Organisasi antarpemerintah (IGO) berfungsi sebagai tempat berkumpul dan bertukar informasi antarnegara. IGO menyediakan forum yang memungkinkan negara-negara untuk membincangi dan merumuskan negosiasi mereka. Dengan adanya IGO, diplomasi multilateral dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan terorganisasi, memfasilitasi kerja sama internasional dalam berbagai isu global.

3. Diplomat supranasional (*supranational diplomats*)

Diplomat supranasional adalah para birokrat yang bekerja untuk dan mewakili organisasi internasional. Mereka memainkan peran aktif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan multilateral, tidak hanya di dalam organisasi internasional dan anggotanya tetapi juga dalam hubungannya dengan negara lain, organisasi internasional lainnya, dan lembaga nonpemerintah (Haas, 1958). Diplomat supranasional ini sering kali memiliki pengaruh yang signifikan dalam proses diplomasi global, berfungsi sebagai penghubung antara berbagai entitas internasional.

4. Diplomasi subnegara/paradiplomasi (*sub-state diplomacies/paradiplomacy*):

Diplomasi tidak hanya dilakukan oleh negara dan organisasi internasional, tetapi juga oleh entitas subnegara seperti:

- a. Wilayah, parlemen, dan otoritas lokal. Wilayah-wilayah dan pemerintah lokal sering kali memiliki hubungan diplomatik sendiri dengan entitas internasional lainnya untuk kepentingan regional mereka.
- b. Aktor nonnegara (*nonstate actors*). Lembaga swadaya masyarakat (NGO) dan perusahaan multinasional (MNC) juga terlibat dalam diplomasi. Mereka berpartisipasi dalam isu-isu global seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan perdagangan.
- c. Individu. Beberapa individu, termasuk pemimpin, seniman, dan atlet, memiliki pengaruh dalam diplomasi. Mereka dapat menggunakan popularitas dan pengaruh mereka untuk mempromosikan perdamaian, budaya, dan kerja sama internasional.

Diplomasi berdasarkan sektor di antaranya:

1. Ekonomi. Diplomasi ekonomi melibatkan negosiasi dalam aspek perdagangan, investasi, dan berbagai bentuk kerja sama ekonomi

antara negara. Tujuan diplomasi ini adalah untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perjanjian yang menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama investasi asing.

2. Pariwisata. Diplomasi pariwisata bertujuan untuk mempromosikan sektor pariwisata domestik suatu negara kepada wisatawan internasional. Diplomasi ini dapat dilakukan melalui pameran wisata serta kolaborasi dengan agen perjalanan guna meningkatkan kunjungan wisatawan yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Budaya. Diplomasi budaya bertujuan untuk mempererat hubungan antarnegara melalui sektor budaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkenalkan, memahami, dan menghargai nilai-nilai budaya. Diplomasi ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan pertunjukan seni, tradisi, dan nilai-nilai budaya suatu negara. Program pertukaran pelajar, pameran seni, festival budaya, dan proyek kerja sama seni antarnegara termasuk ke dalam bentuk diplomasi ini.
4. Lingkungan. Diplomasi lingkungan terwujud dalam kerja sama mengatasi isu-isu lingkungan global seperti perubahan iklim, deforestasi, dan polusi di darat, laut maupun udara. Diplomasi dapat dilakukan melalui perjanjian internasional dan proyek-proyek bersama untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.
5. Kuliner. Diplomasi gastro, atau kuliner, merupakan promosi makanan dan tradisi ciri khas kuliner suatu negara sebagai cara untuk mempererat hubungan antarbangsa. Bentuk diplomasi gastro dapat berupa festival makanan, kompetisi memasak, dan pendirian restoran-restoran berciri khas kuliner suatu negara guna mengenalkan budaya tertentu melalui citarasa masakan atau minuman tertentu.
6. Olahraga. Diplomasi olahraga dijalankan dengan memanfaatkan pertandingan dan kompetisi olahraga. Diplomasi ini ditujukan untuk membangun jembatan hubungan baik antarbangsa

misalnya melalui pembentukan sikap sportif dan semangat dalam laga Olimpiade, Piala Dunia, dan berbagai turnamen olahraga internasional lainnya.

7. Hiburan. Diplomasi hiburan diwujudkan melalui industri film, musik, dan seni pertunjukan. Diplomasi ini melibatkan upaya promosi nilai-nilai dan budaya suatu negara. Diharapkan agar melalui penyebaran karya seni, film, dan musik, negara-negara dapat membangun citra positif.
8. Kemanusiaan. Diplomasi kemanusiaan terwujud dalam upaya untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada negara atau masyarakat yang tengah menjadi korban bencana alam, konflik, atau krisis kemanusiaan. Sebagai wujud kerja sama internasional, diplomasi ini dapat berupa upaya menyalurkan bantuan medis, pangan, dan perlindungan bagi korban yang membutuhkan.
9. Pertahanan. Diplomasi pertahanan merupakan kerja sama yang terkait dengan aspek pertahanan. Diplomasi ini sering kali dikaitkan dengan upaya menciptakan stabilitas regional dan global, serta mencegah konflik. Beberapa wujud diplomasi pertahanan adalah latihan militer bersama, kerja sama intelijen, perjanjian nonproliferasi senjata serta pengiriman perwira ke negara lain untuk mendapatkan pelatihan militer.

Selain sektor-sektor di atas, diplomasi juga dapat mencakup berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas negara. Diplomasi yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, mencakup berbagai aspek kehidupan dan kerja sama internasional. Dengan memahami berbagai sektor ini, kita dapat melihat betapa luasnya cakupan diplomasi dan pentingnya peranannya dalam membangun hubungan internasional yang harmonis dan saling menguntungkan.

Diplomasi berdasarkan medianya dapat terwujud melalui media publik dan juga digital. Diplomasi publik mengarah fokusnya kepada upaya membangun hubungan langsung dengan masyarakat asing melalui program-program pendidikan, media, dan komunikasi

publik. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman dan dukungan masyarakat internasional terhadap kebijakan dan nilai-nilai suatu negara. Sementara itu, diplomasi digital menggunakan media sosial, situs web, dan platform digital lainnya, negara-negara dapat menjangkau masyarakat global dan menyampaikan pesan diplomatik secara efektif. Namun diplomasi digital sering kali dikritik karena diplomasi ini tidak memungkinkan terjadinya proses penciptaan kepercayaan (*trust*) secara langsung karena tiadanya tatap muka antara pihak-pihak yang berdiplomasi secara langsung. Terlebih, interaksi digital ini tidak menjamin terjadi dalam kondisi yang aman. Dunia maya sangat rentan terhadap ancaman terjadinya peretasan, penyadapan, dan penyalahgunaan data (Rachmawati et al., 2021).

Indonesia telah memanfaatkan diplomasi digital setelah reformasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dilakukan pada 2002. Reformasi ini ditunjukkan melalui pembentukan Direktorat Informasi dan Diplomasi Publik. Direktorat ini didirikan bertujuan untuk memperbarui dan meningkatkan strategi diplomasi Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan diplomasi digital di Indonesia kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri No. 2 Tahun 2016. Peraturan ini merupakan bagian dari rencana strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri untuk periode 2015-2019, yang menekankan pentingnya teknologi digital dalam mencapai tujuan diplomatik Indonesia. Selain itu, pada tahun 2017, dikeluarkan Keputusan Menteri Luar Negeri yang mengubah Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam mengintegrasikan teknologi digital ke dalam strategi diplomasi nasional (Rachmawati et al., 2021).

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia telah menunjukkan kesiapan dan keseriusannya dalam menghadapi tantangan diplomasi di era digital. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam menyampaikan informasi,

membangun citra positif di mata dunia internasional, dan memperkuat hubungan dengan negara-negara lain (Rachmawati et al., 2021).

Sharp (2019) juga menguraikan beberapa jenis diplomasi yang digunakan dalam hubungan internasional. Sharp menguraikan diplomasi dalam tiga kategori utama: diplomasi bilateral, diplomasi regional, dan diplomasi trans-regional.

Diplomasi bilateral melibatkan hubungan diplomatik antara dua negara. Ini adalah bentuk diplomasi yang paling mendasar, di mana kedua negara tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan konflik melalui dialog langsung. Contoh yang umum dari diplomasi bilateral adalah perjanjian perdagangan atau perjanjian damai antara dua negara.

Diplomasi regional melibatkan kelompok negara di wilayah tertentu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh dari diplomasi regional adalah Uni Eropa (*European Union*), Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Organisasi-organisasi ini membentuk kerangka kerja bagi negara-negara anggotanya untuk berkolaborasi dalam berbagai isu, mulai dari keamanan hingga ekonomi.

Diplomasi trans-regional melibatkan organisasi yang anggotanya berasal dari berbagai kawasan di dunia. Contoh dari diplomasi trans-regional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), diplomasi multilateral, dan paradiplomasi. Dalam konteks ini, negara-negara bekerja sama pada tingkat global untuk mengatasi tantangan yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim dan perdamaian dunia.

Sharp (2019) juga menyoroti beberapa bentuk diplomasi masa kini yang semakin relevan di era modern yaitu: 1) *Club and group diplomacy* melibatkan kelompok negara atau aktor nonnegara yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu. 2) *Digital diplomacy* atau diplomasi digital, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi dan memperluas jangkauan diplomasi

tradisional. 3) *Public diplomacy*, atau diplomasi publik, melibatkan upaya untuk memengaruhi opini publik internasional dan membangun citra positif di mata dunia.

Selain itu, Sharp membagi diplomasi menjadi dua bentuk utama: *diplomacy of relations* dan *diplomacy of problems*. *Diplomacy of relations* adalah diplomasi yang memfokuskan pada pembentukan dan pemeliharaan hubungan antara negara. Contohnya adalah pengiriman perwakilan suatu negara (*sending state*) yang ditempatkan di negara penerima (*receiving state*) untuk memfasilitasi komunikasi dan kerja sama bilateral.

Di sisi lain, *diplomacy of problems* memfokuskan pada penyelesaian masalah-masalah spesifik yang dihadapi oleh negara atau wilayah tertentu. Contohnya termasuk *summit diplomacy*, yaitu pertemuan tingkat tinggi antarpemimpin negara, dan *people to people diplomacy*, yang melibatkan interaksi langsung antara masyarakat dari berbagai negara untuk mengatasi isu-isu global, regional, atau bilateral seperti diplomasi perbatasan, diplomasi lingkungan, diplomasi air, dan diplomasi maritim.

Shoelhi (2018) mengidentifikasi delapan bentuk diplomasi yang didasarkan pada metode atau mekanisme yang digunakan dalam menjalankan diplomasi. Bentuk-bentuk tersebut adalah:

1. Dialog, mengupayakan sebuah penilaian atas perkembangan suatu hal/isu.
2. Persidangan, menyampaikan pandangan-pandangan negara atas berbagai isu internasional
3. Konferensi internasional, menghasilkan kesepakatan-kesepakatan.
4. Kunjungan kenegaraan, mempererat hubungan persahabatan antarnegara.
5. Seminar internasional, menyampaikan informasi terkait isu internasional.
6. Simposium, membahas kajian-kajian tertentu di tingkat internasional.

7. Negosiasi, merundingkan masalah isu bilateral, isu trilateral atau isu multilateral tertentu untuk mencapai persetujuan atau perjanjian.

8. Lobby, merupakan diplomasi tidak resmi di mana terdapat upaya memperlancar jalannya negosiasi.

Selain itu, Shoelhi (2018) juga menyusun kategori jenis diplomasi berdasarkan karakteristik atau tujuan utama dari diplomasi tersebut:

1. Diplomasi demokratis. Diplomasi yang dilakukan terbuka dengan memerhatikan suara rakyat.
2. Diplomasi borjuis-sipil. Diplomasi untuk memperjuangkan kompromi demi perdamaian daripada penghancuran total pihak-pihak yang bermusuhan.
3. Diplomasi totaliter. Diplomasi yang dilandasi oleh nasionalisme ekstrem dan pertimbangan ideologis.
4. Diplomasi preventif. Diplomasi yang dilancarkan ketika masyarakat menghadapi situasi genting dengan pesan tunggal misalnya *stop the war*.
5. Diplomasi provokatif. Diplomasi yang bertujuan menyudutkan posisi suatu negara atau untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang suatu kebijakan politik negara tertentu.
6. Diplomasi perjuangan. Diplomasi untuk memperjuangkan hak-hak kemerdekaan.
7. Diplomasi kebudayaan. Diplomasi untuk mempererat hubungan internasional menggunakan pendekatan budaya.
8. Diplomasi ekonomi. Diplomasi untuk memengaruhi pihak lain melalui pendekatan ekonomi misalnya bantuan ekonomi.
9. Diplomasi multijalur (*multitrack diplomacy*) atau *total diplomacy*. Diplomasi yang melibatkan penggunaan seluruh upaya dari para aktor (diplomat dan nondiplomat) dalam pelaksanaan politik luar negeri.
10. Diplomasi publik. Diplomasi yang mengandalkan kekuatan kerja sama *soft power* seperti kerja sama ekonomi dan

kebudayaan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki dan menarik simpati pihak lain.

F. Diplomasi sebagai Alat Kebijakan Luar Negeri

Diplomasi merupakan alat (*instrument*) bagi pelaksanaan kebijakan luar negeri. Sebagai unsur penting dalam kebijakan luar negeri, diplomasi memiliki landasan yaitu kepentingan nasional.

Konsep kepentingan nasional yang menjadi dasar kebijakan luar negeri dan perjuangan diplomasi dikemukakan antara lain oleh H.J. Morgenthau, Joseph Frankel & Nicholas Spykman. Para teoritis hubungan internasional menyatakan bahwa kepentingan nasional tidak hanya mengenai *power* tetapi juga kepentingan moral, kepentingan agama dan budaya, serta hal-hal lainnya. Berdasarkan penelitian yang menggunakan *confirmatory factor analysis* (CFA) dengan LISREL, konsep kepentingan nasional dapat dilihat di tingkat internasional. Terdapat tiga kategori kepentingan nasional di tingkat internasional yaitu kepentingan dalam hal keamanan, pembangunan ekonomi dan kepentingan masyarakat (Wu, 2017).

Konsep kepentingan nasional lebih rinci lagi dikategorikan oleh Donald E. Nuechterlein (Bakry, 1999) dalam 4 tipe yaitu:

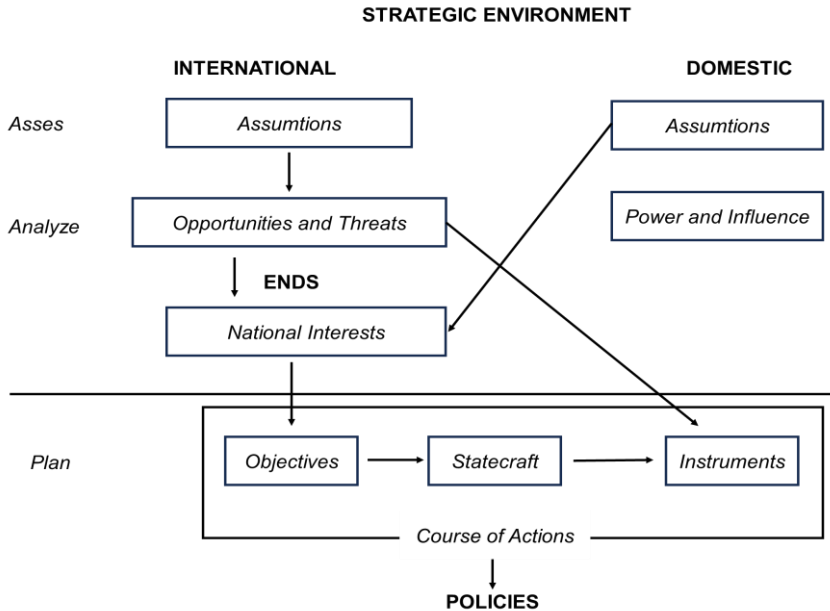
1. Kepentingan pertahanan yaitu kepentingan untuk melindungi penduduk, wilayah, dan sistem politik dari ancaman eksternal.
2. Kepentingan ekonomi yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi suatu negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
3. Kepentingan tatanan internasional yaitu kepentingan untuk menjaga sistem politik internasional dan sistem ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negara.
4. Kepentingan ideologi yaitu kepentingan untuk memelihara atau melindungi ideologi negara dari ancaman ideologi negara lain.

Berdasarkan buku *Putih Pertahanan Indonesia 2015*, kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional, guna mewujudkan tujuan

nasional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Sementara itu, menurut buku *Pertahanan Indonesia 2008*, kepentingan nasional dituangkan dalam tiga kategori yaitu mutlak, vital, dan penting. Kategori kepentingan bersifat mutlak diwujudkan melalui tetap tegaknya NKRI sehingga segala daya upaya perlu dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut. Kategori kepentingan vital ditunjukkan melalui tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur, dan demokratis. Kategori kepentingan nasional yang penting, diwujudkan melalui upaya menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Kepentingan nasional diwujudkan berdasarkan kaidah pokok yaitu memerhatikan tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan dan sarana yang digunakan (Buku *Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008*, 2008).

Dengan adanya berbagai kategori kepentingan nasional suatu negara seperti terlihat pada konsep kepentingan nasional Indonesia, maka kebijakan luar negeri suatu negara perlu dirancang melalui strategi yang terencana. Diplomasi sebagai alat kebijakan luar negeri pun perlu dirancang dengan baik agar dapat menjadi alat yang efektif dalam pencapaian kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri merupakan strategi suatu negara yang ditujukan kepada lingkungan eksternalnya dan dirumuskan berdasarkan kepentingan nasional dalam suatu sistem perumusan terdiri dari *input*, proses, *output*, dan *outcome*. Elemen mendasar dalam strategi kebijakan luar negeri adalah analisis situasi, penentuan tujuan yang akan dicapai (*ends*), penentuan alat yang digunakan (*means/capabilities*), penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam penggunaan alat tersebut (*ways*) dan menganalisa risiko atau biaya (*risks or costs*) dari strategi yang diadopsi. Kerangka *strategic logic* dalam menyusun strategi kebijakan luar negeri (Deibel, 2007) adalah:



Gambar 2. 2. Kerangka *Strategic Logic* Kebijakan Luar Negeri

Sumber: Deibel (2007)

Kerangka strategi kebijakan luar negeri tersebut dapat menjadi kerangka yang digunakan untuk memahami bagaimana konteks, kepentingan nasional, asumsi, tujuan, tantangan, *instruments*, *costs*, dan *risks* dari perumusan strategi kebijakan luar negeri yang terwujud dalam diplomasi. Dalam mengkaji proses perumusan strategi kebijakan luar negeri, aktor presiden sering kali menjadi aktor yang paling menentukan. Isu dalam pemerintahan dapat muncul dan dibentuk oleh para aktor di dalam pemerintahan tersebut bahkan aturan main (*rules of the game*) pun dapat dibuat. Namun, tanpa persetujuan presiden yang merupakan sumber *power* dalam birokrasi, keputusan apapun yang dirumuskan tentu tidak dapat ditetapkan (Halperin et al., 2006).

Politik dalam birokrasi merupakan hal penting untuk mengkaji suatu kebijakan. Graham Allison merumuskan konsep yang dikenal dengan nama model politik birokrasi yang muncul pada perumusan

kebijakan luar negeri. Model ini mengacu kepada pandangan bahwa kebijakan luar negeri dihasilkan sebagai suatu hasil kumpulan (*political resultante*) atau produk dari proses tawar-menawar (*bargaining*) antara pemimpin dengan aktor-aktor dalam pemerintahan. Proses ini menyerupai *game* yang kompetitif di mana seluruh pihak memiliki kecenderungan pandangannya sendiri-sendiri untuk diperjuangkan berdasarkan peran mereka di dalam organisasi. Model ini bertolak belakang dengan model organisasional di mana kebijakan luar negeri dihasilkan sebagai suatu *output* produk dari suatu organisasi. Kebijakan luar negeri berdasarkan model ini dianggap lahir dari organisasi yang menerapkan standar operasional tertentu dengan prioritas dan persepsi yang muncul dari sistem birokrasi yang besar, terdiri dari berbagai aktor dengan tanggung jawab dan kepentingan yang berbeda (Jones, 2010). Kedua model politik birokrasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Salah satu kelemahan dari model politik birokrasi adalah kurangnya pembahasan terhadap peran dari aktor tingkat rendah dalam birokrasi, kurangnya pemahaman terhadap konteks serta lembaga eksternal lain yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri (Dorani, 2018).

G. Diplomasi dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional

Teori hubungan antaraktor dalam Ilmu Hubungan Internasional begitu beragam dan perkembangannya sangat dinamis sesuai dengan konstelasi dinamika yang terjadi di lingkungan internasional baik pada aktor negara maupun aktor nonnegara.

1. Pendekatan Realis

Realis merupakan paradigma dalam hubungan internasional yang meyakini bahwa negara merupakan aktor paling dominan dalam sistem internasional. Sebagai suatu *unitary actor*, negara melakukan tindakannya didasari oleh kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan suatu rumusan

yang dianggap sebagai hasil kesepakatan di tingkat nasional. Cara pandang kaum Realis ini kemudian ditambahkan oleh kaum Neo-Realis yang lebih mempercayai bahwa tindakan aktor lebih ditentukan oleh adanya dorongan dari struktur atau sistem internasional. Dalam kerja sama yang terjalin antara negara-negara, kaum Neo-Realis percaya bahwa kepentingan negara-negara hegemon dalam sistem, dapat memberikan pengaruh kepada negara lain yang berada di dalam sistem (Vinsensio, 2016).

Pendekatan Realis dalam teori Hubungan Internasional adalah salah satu perspektif yang paling dominan dan berpengaruh. Pendekatan ini menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam politik internasional dan bahwa perilaku negara didorong oleh kepentingan nasional dan kekuasaan. Berikut ini merupakan beberapa konsep dasar pendekatan Realis:

- a. Anarki sistem internasional. Realisme berargumen bahwa sistem internasional bersifat anarkis, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang mengatur hubungan antarnegara. Dalam konteks ini, negara harus bertindak untuk melindungi kepentingan mereka sendiri (Heriamsal & Manurung, 2024; Rendi & Rio, 2019).
- b. Kepentingan nasional. Negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional yang merupakan prioritas utama dalam pengambilan keputusan politik luar negeri. Realis percaya bahwa semua tindakan diplomatik harus diarahkan untuk memaksimalkan keamanan dan kekuatan negara (Heriamsal & Manurung, 2024).
- c. Kekuatan dan keamanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kekuatan, terutama kekuatan militer, sebagai alat untuk mencapai dan mempertahankan kepentingan nasional. Negara-negara berusaha untuk mengembangkan kapasitas militer mereka sebagai langkah pencegahan terhadap ancaman dari negara lain (Rendi & Rio, 2019; Asrudin, 2014).

- d. Pragmatisme dalam diplomasi. Realisme mendorong pemimpin negara untuk bersikap pragmatis dan realistis dalam kebijakan luar negeri mereka. Tindakan diplomatik sering kali dianggap sebagai cara untuk mengelola konflik dan menjaga stabilitas, meskipun terkadang melibatkan keputusan yang tidak bermoral demi kepentingan nasional (Heriamsal & Manurung, 2024; Asrudin, 2014).
- e. Konflik sebagai keniscayaan. Realisme menganggap bahwa konflik antarnegara adalah hal yang tak terhindarkan. Dalam pandangan ini, perang dapat terjadi sebagai akibat dari persaingan kekuasaan dan ketidakpercayaan antarnegara (Asrudin, 2014).

Realis lebih cenderung mendukung diplomasi bilateral daripada multilateral, karena mereka percaya bahwa hubungan langsung antara dua negara lebih efektif dalam mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam beberapa situasi, pendekatan Realis mungkin melibatkan penggunaan diplomasi keras, seperti ancaman atau penggunaan kekuatan militer, untuk mencapai tujuan politik tertentu. Diplomasi juga digunakan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara negara-negara agar tidak ada satu negara pun yang menjadi dominan, yang dapat mengancam keamanan negara lain.

2. Pendekatan Liberalis

Pendekatan Liberalis dalam teori hubungan internasional merupakan salah satu paradigma utama yang menekankan pentingnya kerja sama, institusi internasional, dan interdependensi ekonomi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global. Liberalisme berakar pada pemikiran liberal yang berkembang sejak Zaman Pencerahan, dan menjadi semakin dominan dalam studi hubungan internasional setelah Perang Dunia (Capella, 2023; Maarif, 2023).

Salah satu asumsi dasar Liberalisme adalah bahwa aktor utama dalam hubungan internasional bukan hanya negara, tetapi

juga individu dan kelompok masyarakat. Liberalisme memandang bahwa tindakan negara dan interaksi antarbangsa di dunia merupakan hasil dari dinamika politik domestik. Dengan kata lain, hubungan internasional dipandang sebagai "sistem politik dan ekonomi domestik yang beroperasi di tingkat internasional" (Rosyidin, 2022).

Liberalisme juga menekankan peran penting institusi internasional dalam membentuk perilaku negara. Menurut pandangan ini, organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan Uni Eropa berfungsi sebagai platform di mana negara-negara dapat berdialog dan bernegosiasi untuk mencapai solusi bersama. Contoh nyata dari pendekatan ini adalah Paris Agreement pada 2015, yang mencerminkan prinsip-prinsip Liberalisme dalam menangani isu perubahan iklim (Capella, 2023).

Interdependensi ekonomi merupakan aspek kunci lain dalam teori Liberalisme. Para penganut Liberalisme percaya bahwa perdagangan bebas dan keterkaitan ekonomi antarnegara dapat menciptakan efek mendamaikan dalam hubungan internasional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika negara-negara saling bergantung secara ekonomi, mereka akan cenderung menghindari konflik dan lebih memilih kerja sama (Maarif, 2023; Rosyidin, 2022).

Liberalisme juga memiliki pandangan optimis tentang sifat manusia dan kemungkinan tercapainya perdamaian. Teori perdamaian demokratis, yang merupakan salah satu varian Liberalisme, menyatakan bahwa negara-negara demokratis cenderung lebih damai satu sama lain. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa demokrasi menjamin kontrol masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mengurangi kemungkinan perang (Rosyidin, 2022).

Meskipun Liberalisme menawarkan perspektif yang optimis tentang hubungan internasional, teori ini juga menghadapi beberapa kritik. Beberapa kritikus berpendapat bahwa Liberalisme terlalu optimis tentang kemungkinan kerja

sama internasional dan kurang memerhatikan faktor kekuasaan dan keamanan dalam hubungan antarnegara. Selain itu, Liberalisme juga dianggap terkadang mengabaikan ketimpangan yang ada dalam sistem internasional (Maarif, 2023; Rosyidin, 2022).

Terlepas dari kritik tersebut, pendekatan Liberalis tetap relevan dalam memahami dinamika hubungan internasional kontemporer. Teori ini membantu menjelaskan fenomena globalisasi, peningkatan interdependensi ekonomi, dan peran organisasi internasional dalam mengatasi isu-isu global seperti perubahan iklim. Dengan demikian, Liberalisme terus memberikan kontribusi penting dalam studi dan praktik hubungan internasional.

3. Pendekatan Konstruktivis

Pendekatan Konstruktivis dalam teori hubungan internasional muncul sebagai alternatif yang penting untuk memahami dinamika global, terutama dalam konteks di mana aspek-aspek nonmaterial, seperti ide, norma, dan identitas, memainkan peran krusial. Konstruktivisme berargumen bahwa realitas internasional tidak hanya ditentukan oleh faktor material, seperti kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh cara pandang dan interaksi sosial antaraktor. Teori ini menekankan bahwa struktur sosial dan identitas aktor-aktor dalam sistem internasional dibentuk melalui proses interaksi dan komunikasi, bukan semata-mata oleh kekuatan atau kepentingan material.

Salah satu tokoh utama dalam pengembangan Konstruktivisme adalah Alexander Wendt, yang menyatakan bahwa "anarki adalah apa yang negara buat." Ini berarti bahwa karakter anarki dalam sistem internasional dapat bervariasi tergantung pada bagaimana negara-negara berinteraksi dan membangun norma-norma bersama. Dalam pandangan Konstruktivis, identitas dan kepentingan negara bukanlah hal yang tetap atau alamiah, melainkan hasil dari konstruksi sosial

yang dipengaruhi oleh ide-ide dan nilai-nilai yang diyakini bersama oleh aktor-aktor dalam sistem tersebut (Maarif, 2023).

Konstruktivisme juga mengkritik pendekatan Realis dan Liberalis yang cenderung mengabaikan peran norma dan identitas. Misalnya, dalam konteks komunitas keamanan, Konstruktivisme menunjukkan bahwa negara-negara dapat menyelesaikan masalah keamanan tanpa menggunakan kekuatan militer, melainkan melalui dialog dan kerja sama damai. Hal ini terlihat dalam kasus krisis Semenanjung Korea, di mana perbedaan norma dan identitas antara China dan Amerika Serikat mencegah terjadinya konflik terbuka.

Lebih lanjut, pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sejarah dan pengalaman kolektif membentuk realitas sosial. Konstruktivisme menyoroti pentingnya norma-norma sosial dalam membentuk kebijakan luar negeri dan perilaku negara. Dengan demikian, analisis Konstruktivis tidak hanya berfokus pada tindakan negara tetapi juga pada bagaimana tindakan tersebut dipahami dan dikonstruksi oleh aktor-aktor lain dalam sistem internasional (Rachmawati, 2018).

Secara keseluruhan, pendekatan Konstruktivis menawarkan perspektif yang lebih dinamis dan fleksibel dalam memahami hubungan internasional. Dengan menekankan peran ide, norma, dan identitas, Konstruktivisme membantu menjelaskan fenomena-fenomena kompleks yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori-teori tradisional seperti Realisme atau Liberalisme. Pendekatan ini semakin relevan di era globalisasi saat ini, di mana interaksi antarnegara semakin dipengaruhi oleh faktor-faktor nonmaterial (Maarif, 2023; Rachmawati, 2018).

BAB 3

DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM

Pada awal bab ini diuraikan konsep-konsep yang berkaitan dan sering kali dianggap sebagai konsep yang memiliki keterkaitan dengan diplomasi pertahanan maritim (DPM). Pembahasan DPM dalam bab ini, juga diuraikan dalam perspektif Ilmu Hubungan Internasional.

A. Konsep Pertahanan Negara

Pertahanan negara dan keamanan negara merupakan dua hal yang penting bagi terciptanya ketahanan nasional yaitu suatu kondisi dinamis negara mencakup semua aspek kehidupan nasional dalam menghadapi ancaman. Istilah pertahanan dan istilah keamanan memang digunakan untuk menggambarkan tercapainya kondisi bebas ancaman atau kondisi aman. Meskipun kedua istilah ini memiliki keterhubungan, namun keduanya mengacu kepada dua pengertian yang berbeda.

Pertahanan negara mengacu kepada *instrument* dari upaya untuk menciptakan keamanan sehingga pertahanan merupakan bagian dari keamanan. Sementara itu, keamanan negara mengacu kepada kondisi yang terbebas dari bahaya, ketakutan, dan ancaman tradisional maupun nontradisional. Persamaan dan perbedaan konsep pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari sisi regulasi, konsep yang digunakan, kelembagaan, dan konstitusinya (Mardhani et al., 2020).

Adapun tujuan pertahanan negara Indonesia sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Peraturan

Presiden No 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2021):

1. Menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Menjamin terwujudnya visi, misi, dan agenda prioritas pemerintah

Sementara itu, lima sasaran strategis pertahanan negara adalah:

1. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menghadapi ancaman.
2. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan dan keamanan wilayah dirgantara.
3. Mewujudkan pertahanan negara yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia berdasarkan politik bebas aktif.
4. Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing.
5. Mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara.

Berdasarkan lima sasaran strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa cakupan pertahanan negara sangat luas yaitu menangani keamanan wilayah maritim, keamanan wilayah daratan, dan keamanan wilayah dirgantara. Dalam uraian sasaran strategis tersebut tertulis keamanan “maritim” dan bukan sekadar keamanan wilayah “lautan atau perairan.”

Makna dari kata “maritime” dan kata “lautan” sesungguhnya namun sering kali dipahami sebagai hal yang serupa. Kata maritim merujuk kepada cakupan yang luas yaitu tidak sekadar laut tetapi segala hal yang terkait dengan aspek kelautan. Perbedaan pertahanan laut (*sea defense*) dan pertahanan maritim (*maritim defense*) diuraikan oleh Geoffrey Till (2009) sebagai berikut.

Pertahanan laut mencakup:

1. Aspek militer dan kekuatan Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan.
2. Pendekatan strategis dapat bersifat ofensif atau defensif yaitu mengamankan kedaulatan wilayah laut dari ancaman militer terutama dari serangan eksternal melalui pengendalian laut dan ekspedisi militer.
3. Fokus menghadapi ancaman langsung di perairan, pengendalian jalur komunikasi serta pencegahan intervensi negara lain.

Sementara itu, pertahanan maritim mencakup:

1. Aspek militer dan aspek nonmiliter seperti perlindungan terhadap ancaman penyelundupan, pembajakan, dan kejahatan lingkungan di perairan. Berbagai institusi dapat berkolaborasi di antaranya penjaga pantai (*coast guard*), otoritas perikanan dan berbagai lembaga yang bergerak dalam isu lingkungan.
2. Pendekatan strategis cenderung multidimensi yaitu memastikan stabilitas dan keamanan maritim dan menjaga tatanan hukum di perairan internasional, di antaranya melalui kolaborasi dengan negara-negara lain dan diplomasi maritim untuk membangun hubungan baik antarnegara.
3. Fokus mencakup keamanan keseluruhan di wilayah perairan termasuk pengelolaan sumber daya laut serta aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut. Untuk itu diperlukan kerjasama internasional dalam menangani isu-isu tersebut.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait pertahanan maritim. Salah satu topik penting dalam pertahanan maritim adalah pentingnya *maritime defense awareness* (MDA). Konsep MDA ini menekankan pentingnya penciptaan kesadaran (*awareness*) dan pertukaran informasi maritim, serta bukan menyangkut ke arah pengawasan atau pengerahan kekuatan maritim (Salim, 2021).

Sedangkan penelitian mengenai “*Means of Indonesian Maritime Defense Strategy in Sea Control on the Indonesian Strategic Straits to Support Total Defense and Security System,*” oleh Amarulla Octavian, Rayindra Asmara dan Abdiyan Syaiful Hidayat (2020) (Octavian et

al., 2020) membahas strategi yang diperlukan di 4 *strategic choke points* Indonesia yang mendukung sistem pertahanan semesta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya untuk menciptakan pertahanan maritim melalui penguasaan laut di 4 *choke points strategic* Indonesia adalah melalui pengayaan kekuatan, kerja sama antarkelembagaan, dan penyusunan aturan untuk menentukan strategi pertahanan maritim (Octavian et al., 2020). Penelitian tersebut dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor dalam strategi pertahanan maritim Indonesia yang perlu ditinjau dalam konteks perwujudan visi PMD.

Sementara, penelitian mengenai maritim lainnya membahas bagaimana ancaman maritim dari Barat ke Timur dan dari Utara ke Selatan Indonesia perlu dihadapi dengan sinergi dan integrasi dari seluruh komponen bangsa. Indonesia diharapkan dapat memusatkan perhatian kepada tata kebijakan, aturan, tindakan, dan operasi dari sistem pertahanan maritim (Hidayat & Sidhha, 2018).

Penelitian terkait pertahanan maritim, khususnya pertahanan laut berjudul, “Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” membahas sejauh mana Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) dapat mewujudkan pilar utama yang terdapat pada PMD. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa SPLN dapat mewujudkan hanya pilar ke-4 dan pilar ke-5 Visi PMD. Selain itu, juga menyatakan bahwa peran dan fungsi TNI AL secara umum dapat dijalankan, namun tetap diperlukan adanya kerja sama antarkementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan pilar utama PMD (Mustari et al., 2018). Kerangka konseptual yang dihasilkan dalam penelitian tersebut dapat digunakan untuk menganalisis proses perumusan strategi pertahanan maritim dan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut tidak menyinggung politik birokrasi yang terjadi pada saat implementasi strategi.

B. Teori Keamanan Nasional

Keamanan nasional didefinisikan sebagai konsep yang luas karena merupakan konsep yang *relational*. Konsep ini perlu dipahami berdasarkan konteks tertentu dan hubungan yang ada antaraktor. Pemahaman konsep keamanan nasional perlu didasari atas jawaban terhadap pertanyaan: keamanan untuk siapa (*security for whom*), keamanan apa (*security of what*), keamanan terhadap apa (*security against what*), dan keamanan oleh siapa (*security by whom*). Dengan luasnya ruang lingkup keamanan nasional maka fokus negara tidak semestinya hanya pada ancaman militer (ancaman tradisional) tetapi juga ancaman dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (ancaman nontradisional). Perumusan kebijakan keamanan nasional memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aktor termasuk masyarakat dalam menghadapi ancaman keamanan yang kompleks (Baldwin, 1997).

Ancaman keamanan berasal dari berbagai sumber sehingga kebijakan keamanan nasional perlu disusun dengan memahaminya secara holistik. Sektor-sektor keamanan yaitu keamanan militer, keamanan politik, keamanan ekonomi, keamanan sosial, dan keamanan lingkungan dapat saling terkait antara satu dengan yang lain. Keamanan nasional merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional sehingga diperlukan pendekatan yang terintegrasi untuk menghadapi ancaman keamanan secara efektif di dunia yang saling terhubung (Buzan, 1983). Contoh ancaman keamanan nasional yang terkait dengan aspek maritim adalah pembajakan (*piracy*), perdagangan baik ilegal orang maupun barang seperti narkoba (*trafficking*) dan degradasi lingkungan di wilayah maritim.

Sejalan dengan pengertian keamanan nasional yang luas, pengertian keamanan maritim pun tidak dapat dijelaskan melalui satu penafsiran. Keamanan maritim dapat dilihat sebagai keterhubungan antara konsep *marine safety*, *seapower*, *blue economy*, dan *resilience* (Bueger, 2015).

C. Diplomasi Pertahanan

Diplomasi Pertahanan (DP) sering kali dianggap memiliki makna yang sama dengan diplomasi militer, padahal keduanya merupakan konsep yang berbeda. Tujuan dari konsep DP adalah pembentukan kembali (*co-formation*) dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan hubungan internasional pada bidang pertahanan yang stabil dalam jangka panjang (Drab, 2018).

Diplomasi militer merupakan bagian dari diplomasi pertahanan sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 1. Diplomasi Militer sebagai bagian dari Diplomasi Pertahanan

Sumber: (Drab & Zakowska, 2024)

Berdasarkan Permenhan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan, kegiatan DP dapat berupa penyusunan kesepakatan bersama, penyelenggaraan pertemuan dan/atau kunjungan, forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan *workshop*, pengadaan dan/atau hibah alat perlengkapan pertahanan atau kerja sama teknik, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, kerja sama

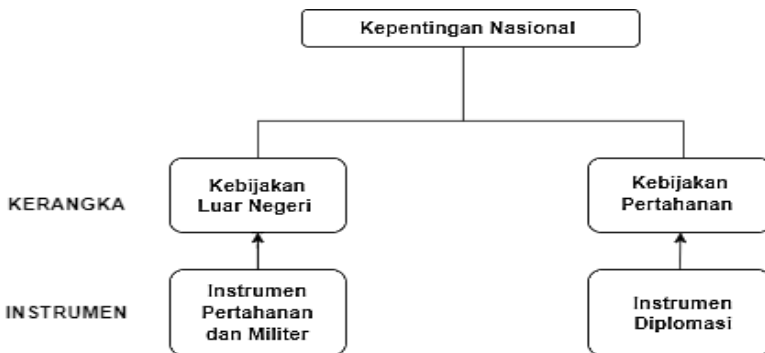
bantuan kemanusiaan akibat bencana serta pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian (Kemhan RI, 2018).

Namun, DP tidak saja mencakup tukar-menukar diplomat, program pelatihan, latihan militer bersama dan kunjungan aktor diplomasi dengan tujuan untuk membangun kemitraan. Diplomasi mengomunikasikan pemikiran, cara pandang dunia dan kecenderungan kebijakan suatu negara terhadap negara lainnya. Diplomasi pertahanan merupakan metode membawa pemikiran strategis negara agar sejalan dengan pemikiran yang dibawa oleh aktor diplomasi yang terlibat. Dalam kegiatan diplomasi ini ada upaya aktor-aktor diplomasi untuk memengaruhi satu sama lain dengan menggunakan *instrument soft power* yang mereka miliki. Diplomasi pertahanan dilakukan suatu negara terhadap negara lain dalam upaya mengejar kepentingan nasional di antaranya untuk menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta keselamatan bangsa dan negara. Tujuan pelaksanaan diplomasi pertahanan adalah menciptakan *confidence building measure, military capability*, dan *military industry* (Winger, 2014).

Pendekatan yang dilakukan dalam diplomasi pertahanan begitu beragam dengan didasari tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas kawasan, dan kerja sama di antara negara-negara melalui keterlibatan dan dialog militer. Tujuan utama diplomasi pertahanan adalah membangun kepercayaan, meningkatkan keamanan, membina kemitraan antarnegara. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan diplomasi pertahanan di antaranya adalah pertukaran perwira militer antarnegara, latihan bersama dan perjanjian kerja sama pertahanan. Selain itu, diplomasi pertahanan juga menyangkut upaya membantu upaya pemeliharaan perdamaian dan kemanusiaan, memfasilitasi kontrol senjata dan nonproliferasi senjata serta kerja sama terkait industri pertahanan. Pelaksanaan diplomasi pertahanan menekankan upaya menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kerja sama internasional (Sarjito & Perwita, 2024)

Dengan demikian, diplomasi pertahanan dapat juga dilihat sebagai tujuan dari kebijakan luar negeri, bukan hanya sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Perkembangan dari konsep diplomasi pertahanan ini berawal dari studi mengenai perundingan-perundingan *arms control*, teknologi nuklir, atau gencatan senjata. Oleh karena itu, konsep diplomasi pertahanan maritim harus merupakan perpaduan dari kerangka diplomasi pertahanan dan kerangka dari diplomasi maritim (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017).

Gambar berikut ini adalah gambar kerangka konseptual diplomasi pertahanan. Gambar berikut menunjukkan bahwa instrumen pertahanan dan militer digunakan dalam kerangka kebijakan luar negeri. Selain itu, dalam gambar juga terlihat bahwa instrumen diplomasi digunakan dalam kebijakan pertahanan.



Gambar 3. 2. Kerangka Konseptual Diplomasi Pertahanan

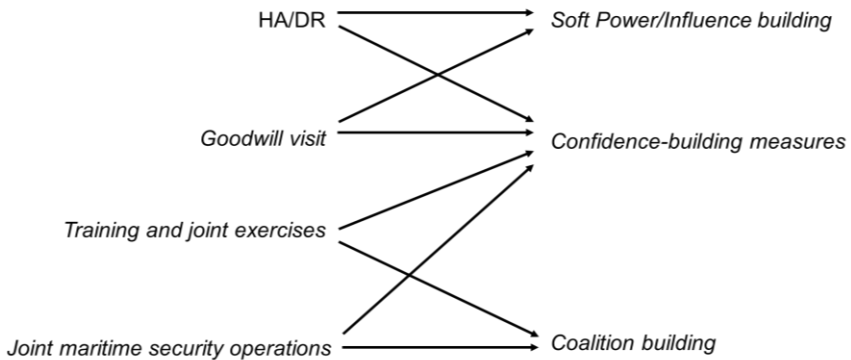
Sumber: Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS (2017)

D. Diplomasi Maritim

Terdapat tiga unsur dalam *spectrum* diplomasi maritim (DM). Pertama, DM mencakup kegiatan diplomasi yang *cooperative*, seperti kunjungan ke pelabuhan, *joint exercises*, dan *training*. Kedua, DM mencakup kegiatan diplomasi yang *persuasive* dengan melibatkan AL. Ketiga, DM mencakup kegiatan diplomasi yang menerapkan pendekatan *coercive* yang salah satunya ditunjukkan dalam konsep

gunboat diplomacy. Ketiga unsur ini dapat memberikan sinyal kepentingan atau gambaran kemampuan suatu negara kepada sekutu atau lawan (Le Mière, 2014).

Bentuk dan tujuan diplomasi maritim yang *cooperative* dapat dilihat pada gambar 3.3 di mana mencakup bantuan kemanusiaan/bantuan bencana (*humanitarian assistance/disaster relief*), kunjungan niat baik (*goodwill visit*), pelatihan dan latihan bersama (*training and joint exercises*), serta operasi keamanan maritim bersama (*joint maritime security operations*). Pelaksanaan kegiatan menghasilkan *soft power/influence building*, *confidence-building measures* dan *coalition building*.



Gambar 3. 3. Bentuk dan Tujuan Diplomasi Maritim Co-operative

Sumber: Le Mière (2014)

Diplomasi maritim dilakukan Indonesia untuk mengejar kepentingan nasional yang berkaitan dengan domain maritim. Definisi diplomasi maritim tertuang pada Kebijakan Kelautan Indonesia 2017 (Bidang Kemaritiman RI, 2017) sebagai berikut.

"Pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional."

Contoh pelaksanaan diplomasi maritim Indonesia adalah penyelesaian kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Kepulauan Natuna pada 2009 hingga 2016. Upaya diplomasi maritim ini diperankan oleh *maritime forces* dan pemerintah. Beberapa bentuk diplomasi maritim lainnya diwujudkan dalam bentuk *cooperative maritime diplomacy* dan *persuasive maritime diplomacy* (Riska, 2017).

Diplomasi maritim dapat dijelaskan sebagai: (1) diplomasi yang menggunakan instrumen kebijakan maritim (seperti Angkatan Laut dan Penjaga Pantai) untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri (misalnya *confidence building measure*), atau (2) diplomasi yang melibatkan para diplomat dalam menghadapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan maritim, di antaranya delimitasi landas kontinen atau sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017).

Beberapa aktor berperan dalam pelaksanaan diplomasi maritim selain aktor di lingkaran utama yaitu Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Lembaga pemerintah lain termasuk aktor nonnegara juga dapat terlibat dalam diplomasi maritim. AL sebagai kekuatan bangsa dalam bidang pertahanan juga mengemban tugas diplomasi seperti tertuang pada UU Nomor 34 tahun 2004. AL memiliki kekuatan diplomatis yang mendukung kebijakan negara khususnya pada masa negosiasi dan interaksi internasional. Diplomasi yang dilakukan AL adalah untuk fungsi *prestise*. Kekuatan AL mampu membentuk ketenangan psikologis dalam tingkat domestik, memproyeksikan citra umum negara, meningkatkan reputasi dan kredibilitas militer negara, dalam pelaksanaan diplomasi TNI. AL juga dapat menjalankan trinitas fungsinya yang terkait dengan kebijakan luar negeri dan diplomasi yaitu: AL menjalankan fungsi militer (*military role* yang ditujukan untuk *balance of power functions* dan *projection of force functions*), AL menjalankan fungsi sebagai polisi (*policing role* yang terkait dengan *coastguard responsibilities* dan *nation-building*), dan AL menjalankan

fungsi sebagai pelaku diplomasi (*diplomatic role* yang terkait *negotiation from strength, manipulation* dan *prestige*) (Booth, 2014).

Diplomasi maritim sering kali dikaitkan dengan *gunboat diplomacy* atau diplomasi kapal perang. Jenis diplomasi ini menggunakan kekuatan Angkatan Laut (AL) atau kekuatan maritim guna mengejar kepentingan nasional. Namun diplomasi ini sudah dianggap tidak relevan lagi pada abad ke-21 ini. Konsep diplomasi ini dilakukan oleh *super power* atau negara yang memiliki kekuatan yang sangat besar guna menghadapi negara yang lebih kecil. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti *drones, missiles*, dan satelit maka konsep diplomasi ini tidak lagi sesuai (Le Mière, 2014).

Beberapa penelitian mengenai diplomasi maritim telah dipublikasikan di antaranya mengenai pencapaian diplomasi maritim Indonesia pada 2014-2019 sebagai bagian integral dari diplomasi Indonesia. Penelitian berjudul “Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia,” oleh June Kuncoro Hadiningrat menunjukkan bahwa diplomasi maritim yang telah dilakukan merupakan fondasi bagi pencapaian visi PMD. Capaian diplomasi maritim belum sepenuhnya terealisasi sesuai visi PMD. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan merupakan fondasi bagi pencapaian visi PMD. Enam dari tujuh prioritas diplomasi maritim telah terlaksana dan menjadi fondasi dan *benchmarking* untuk diplomasi maritim Indonesia (Hadiningrat, 2020). Analisis terhadap diplomasi maritim Indonesia setelah periode penelitian yaitu pasca-2019 perlu terus dilakukan untuk melihat *change* ataupun *continuity* dari capaian diplomasi maritim guna mewujudkan visi PMD.

Penelitian Rijal (2019) membahas bagaimana upaya diplomasi maritim Indonesia dilakukan khususnya di Asia Tenggara dan ASEAN untuk mewujudkan visi PMD. Berdasarkan penelitian ini, Indonesia mengintegrasikan pendekatan *soft* melalui kerja sama dan upaya persuasif dengan pendekatan *hard* melalui tindakan *coercive* (*smart maritime diplomacy*). Indonesia telah mengintegrasikan tiga bentuk diplomasi maritim Le Mière (kerja sama, persuasif, dan *coercive*). Penelitian ini juga menyatakan bahwa domain dari

diplomasi maritim tidak hanya diplomasi angkatan laut, tetapi juga melibatkan elemen negara dan lembaga pemerintahan. Konsep *smart maritime diplomacy* yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipakai untuk menganalisis kasus lain terutama proses perumusan strategi dan pelaksanaan, misalnya diplomasi pertahanan maritim Indonesia terhadap Australia yang akan dibahas pada bab 5 dalam buku ini. Bab tersebut nantinya akan menganalisis apakah seluruh bentuk diplomasi maritim Le Mière benar-benar telah terintegrasikan.

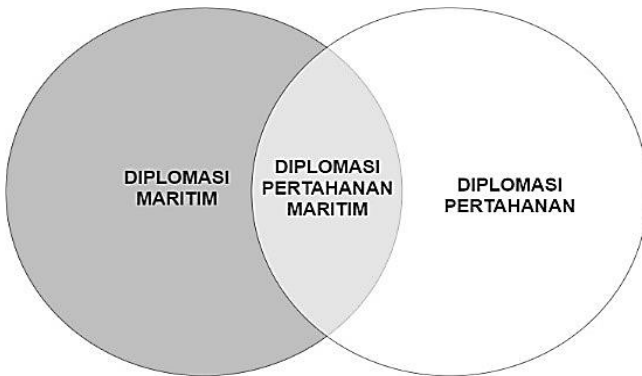
Penelitian berjudul “Optimalisasi Smart Maritime Diplomacy guna Mendukung Keamanan Maritim Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” oleh Tarjuki membahas pentingnya kekuatan dan kapabilitas TNI AL sebagai salah satu alat diplomasi maritim yang menerapkan *smart maritime diplomacy* khususnya di kawasan Laut China Selatan (Tarjuki, 2022). Penelitian tersebut membahas bagaimana *smart maritime diplomacy* dihadapkan pada tantangan sinergitas lembaga dan rendahnya kemampuan alutsista. Harapan akan terwujudnya konsep tersebut yaitu dalam strategi penguatan industri pertahanan dan meningkatkan pertahanan negara guna mencegah pelanggaran wilayah yang terjadi di perairan Indonesia, serta mencegah kehadiran kekuatan maritim negara asing di perairan Indonesia. Kajian *smart maritime* seperti yang dibahas dalam penelitian tersebut dapat menjadi kerangka bagi penelitian DPM yang dikaitkan dengan penguatan strategi pertahanan maritim. Pembahasan mengenai *smart maritime diplomacy* akan lebih komprehensif dengan melibatkan kajian terkait aktor-aktor *multitrack diplomacy*.

Selain penelitian di atas, terdapat pula penelitian yang membahas ruang lingkup keamanan maritim, apa ancaman, bagaimana penanganan dan prioritas apa yang perlu ditangani, faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam membangun keamanan maritim yang kuat (Sugiharto & Shafwatullah, 2021). Penelitian ini menguraikan beberapa hal penting terkait tantangan

dari diplomasi maritim yaitu permasalahan dalam tata kelola keamanan maritim.

E. Diplomasi Pertahanan Maritim

Unsur-unsur yang membentuk konsep DPM memiliki kesamaan dengan pengertian diplomasi maritim dan diplomasi pertahanan. Namun, ketiga terminologi ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. DPM dapat digambarkan sebagai arsiran dari Diplomasi Maritim (DM) dengan Diplomasi Pertahanan (DP) seperti terlihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4. Diagram Diplomasi Pertahanan Maritim

Sumber: Penulis dari berbagai sumber

Persamaan dan perbedaan antara ketiga konsep tersebut diuraikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Perbedaan Pengertian Diplomasi

	DIPLOMA SI		
	MARITIM (DM)	PERTAHANAN (DP)	PERTAHANAN MARITIM (DPM)
Ruang lingkup	Seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan wilayah serta sumber daya yang berada di laut, di bawah laut dan di atas laut misalnya terkait dengan kegiatan pelayaran dan perdagangan.	Seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara yang mempengaruhi pertahanan negara	Bidang asiran dari DPM dan DP yaitu bidang maritim dan non-maritim yang mempengaruhi pertahanan negara
Landasan	Kebijakan maritim dan kebijakan luar negeri	Kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri	Perpaduan kebijakan pertahanan, kebijakan maritim dan kebijakan luar negeri
Tujuan	Kegiatan diplomasi dengan pihak eksternal melalui pembinaan hubungan baik yang menggunakan sumber daya maritim sesuai ketentuan nasional dan hukum internasional	Kegiatan diplomasi dengan pihak eksternal melalui pembinaan hubungan baik yang menggunakan sumber daya pertahanan bertujuan memperkuat pertahanan negara	Kegiatan diplomasi dengan pihak eksternal melalui pembinaan hubungan baik yang menggunakan sumber daya pertahanan bertujuan memperkuat pertahanan negara khususnya pertahanan maritim
Arah	Pembinaan hubungan baik dengan aktor negara atau aktor non-negara lain untuk kerjasama dalam domain maritim mengejar kepentingan nasional sesuai ketentuan nasional dan hukum internasional.	Pembinaan hubungan baik dengan aktor negara dan aktor non-negara lain sebagai upaya pertahanan negara, pencegahan konflik, penyelesaian konflik, penciptaan perdamaian dunia, keamanan regional dan keamanan nasional.	Pembinaan hubungan baik dengan aktor negara dan aktor non-negara lain dalam domain maritim sebagai upaya pertahanan negara, pencegahan konflik, penyelesaian konflik, penciptaan perdamaian dunia, keamanan regional dan keamanan nasional.
	Diplomasi untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah keamanan maritim seperti delimitasi landas kontinen atau sengketa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)	Diplomasi untuk menangani dan memecahkan masalah pertahanan negara	Diplomasi untuk menangani dan memecahkan masalah keamanan maritim yang berpengaruh terhadap pertahanan negara
Instrumen Utama	Kebijakan maritim dan kebijakan luar negeri	Kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri	Kebijakan pertahanan, kebijakan maritim, kebijakan luar negeri
Pendekatan Utama	<i>Soft Power, pembentukan pengaruh, confidence building measures, coalition building</i>		
Aktor Utama	Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kemenkornarvas	Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Personel Militer	
Kegiatan	Kegiatan diplomasi yang <i>cooperative</i> , seperti kunjungan ke pelabuhan (<i>port calls</i>), <i>persuasive</i> misalnya patroli <i>freedom of navigation</i> dan <i>coercive</i> misalnya <i>gun boat diplomacy</i> .	Kegiatan dialog, komunikasi untuk menimbulkan rasa saling percaya antara mitra, kerjasama teknologi, latihan, dan operasi, penyusunan kesepakatan bersama, penyelenggaraan pertemuan atau kunjungan, forum diskusi, dialog, seminar, pameran industri pertahanan, dan workshop, pengadaan alat perlengkapan pertahanan kerjasama teknik pendidikan dan pelatihan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan, kerjasama bantuan kemanusiaan akibat bencana serta pengiriman pasukan TNI pada misi pemeliharaan perdamaian. Latihan dan kerjasama antar militer, pertukaran perwira di lembaga pendidikan dan pelatihan, operasi gabungan multilateral, forum-forum diplomatik perwira dan pejabat kementerian	Kegiatan diplomasi yang dilakukan dalam diplomasi maritim dan diplomasi pertahanan dengan tujuan memperkuat pertahanan maritim.
Format	Kerjasama bilateral, kerjasama regional, kerjasama multilateral		
Waktu	Pendek, Menengah, Panjang	Panjang	Panjang
Kondisi	Konflik, Damai	Konflik, Damai	Damai

Sumber: diolah oleh penulis

Ruang lingkup Diplomasi Pertahanan Maritim (DPM) merupakan bidang arsiran dari DP dan DM. DPM merupakan bentuk diplomasi yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dalam hal aspek maritim. Berdasarkan kerangka kemaritiman, konsep diplomasi dilihat sebagai politik internasional Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya. Dengan demikian, DPM bertujuan untuk mencapai kepentingan keamanan maritim Indonesia yaitu stabilitas maritim baik dalam keadaan damai maupun konflik (Samy & Kusumadewi, 2021).

DPM dianggap sebagai integrasi dari berbagai elemen eksternal dari doktrin PMD. Perumusan strategi DPM adalah upaya untuk mencapai tujuan pertahanan maritim baik keamanan dan keselamatan di laut maupun penciptaan stabilitas konflik dan ketegangan di kawasan. Langkah yang dilakukan adalah dengan integrasi dan optimalisasi berbagai instrumen diplomatik, hukum, dan militer (maritim) dalam keadaan damai, krisis ataupun perang. DPM merupakan kegiatan diplomasi yang dilakukan untuk memperkuat pertahanan maritim dengan melibatkan aktor berbagai sektor termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, dan TNI AL serta aset-aset strategis lainnya (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017).

Dr. Edy Prasetyono (dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia) menyatakan bahwa DPM dapat mencakup empat substansi utama yaitu sumber daya (*resources*), jalur (*route*), proyeksi kekuatan/kekuatan laut (*power projection/sea power*), dan kedaulatan (*sovereignty*). Substansi tersebut didasari oleh kepentingan-kepentingan (*interests*) melalui inisiatif atau kegiatan (*initiatives/activities*) dalam area *of cooperation*. Komponen-komponen DPM tersebut terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2. Matriks DPM

<i>Substance</i>	<i>Interests</i>	<i>Initiatives/Activities</i>	<i>What to do (Areas of cooperation)</i>
<i>Resources</i>	<i>National assets and economic development</i>	<i>Exploration of natural resources, environment protection, combating illegal activities</i>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Security/defence arrangements</i> • <i>Transparency and early warning</i> • <i>Capacity building and operational capabilities</i> • <i>Joint exercise and operations</i> • <i>Constraint measures</i> • <i>Joint exploration</i> • <i>Research</i> • <i>Negotiation</i>
<i>Route</i>	<i>Access and safety</i>	<i>Surveillance, patrolling, early warning, info-sharing, combating transnational crimes</i>	
<i>Power projection/sea power</i>	<i>Deterrence, hegemony, dominion, anti-access/area denial</i>	<i>Alliance, surveillance, military deployment/presence, exercises, and operations</i>	
<i>Sovereignty</i>	<i>Defending territorial integrity</i>	<i>Surveillance, military presence/deployment, exercise, and operations</i>	

Sumber: Edy Prasetyono (2022)

Beberapa penelitian mengenai DPM khususnya terkait implementasi visi PMD telah banyak dipublikasikan. Di antaranya mengenai intensifikasi upaya-upaya diplomasi pertahanan maritim Indonesia baik multilateral maupun bilateral adalah manifestasi dan komitmen Indonesia terhadap visi PMD (Samy & Kusumadewi, 2021). Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya mendorong intensifikasi diplomasi pertahanan maritim. Peneliti menyatakan bahwa adanya keterbatasan kapabilitas sistem pertahanan Indonesia dalam menanggapi ancaman maritim dan nontradisional mendorong rasionalisasi perlu dilakukannya intensifikasi diplomasi pertahanan maritim.

Dari seluruh *literature* dalam kategori tema diplomasi maka penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) Kementerian Luar Negeri dan *Centre for Strategic and International Studies*, 2017) merupakan penelitian yang

komprehensif. Penelitian berdasarkan metode kualitatif tersebut berjudul “Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek” (Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS, 2017). Penelitian ini menganalisis perubahan lingkungan strategis maritim Indonesia dan mengkaji secara empiris pola-pola diplomasi maritim Indonesia sejak 1998 sampai dengan 2016. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut adalah:

1. Mengulas perubahan lingkungan strategis maritim Indonesia.
2. Mengkaji secara empiris pola diplomasi maritim Indonesia sejak 1999.
3. Menawarkan kerangka evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan maritim.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan diplomasi pertahanan maritim.

Beberapa rumusan penting dari penelitian tersebut mampu menawarkan kerangka evaluasi kebijakan diplomasi pertahanan maritim ini adalah:

1. DPM cenderung sebagai instrumen di masa damai, hampir tidak ada instrumen kebijakan pertahanan maritim di masa krisis atau perang.
2. Perlu mempertimbangkan instrumen peperangan laut (*naval warfare*), navigasi dan keselamatan di laut.
3. Dalam hal kerja sama maritim bilateral dan multilateral Indonesia, disimpulkan bahwa *leading actors* dalam praktik diplomasi pertahanan masih belum ada. Fokus kerja sama yang dilakukan Indonesia pun hanya kepada negara tertentu seperti Singapura, Malaysia, China, Australia, dan AS. Kerja sama multilateral maritim cenderung informal dan isu-isunya perlu waktu lama untuk mempunyai dampak strategis.

F. Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Perspektif Ilmu Hubungan Internasional

Meskipun Diplomasi Pertahanan Maritim (DPM) merupakan bidang arsipiran antara Diplomasi Pertahanan dan Diplomasi Maritim,

ruang lingkungannya tetap dapat dianggap luas. DPM sebagai suatu bentuk diplomasi, ditujukan untuk kepentingan pertahanan dalam berbagai aspek maritim. Perumusan dan pelaksana DPM melibatkan aktor yang jumlahnya tidak sedikit sehingga kajian DPM dapat mencakup sinergi antarberbagai aktor. Luasnya cakupan DPM dapat dikaji dengan menggunakan perspektif Ilmu Hubungan Internasional.

Dalam sub bab ini, DPM dikaji berdasarkan tiga perspektif di antara banyaknya perspektif yang berkembang di dalam Ilmu Hubungan Internasional. Pembahasan menggunakan pendekatan Realis, Liberalis, dan Konstruktivis didasarkan atas beberapa indikator di antaranya faktor pendorong atau kepentingan yang mendasari DPM, aktor perumus dan pelaku DPM, serta proses perumusan dan pelaksanaan DPM suatu negara.

1. Realis dan Diplomasi Pertahanan Maritim

Berdasarkan pendekatan Realis, kepentingan aktor yang paling dominan dalam hubungan internasional adalah kepentingan nasional atau kepentingan aktor negara. Dengan demikian, sebagai suatu *unitary actor*, aktor negara dianggap sebagai aktor utama perumus dan pelaku DPM. Berdasarkan cara pandang Realis maka tujuan DPM adalah untuk menjaga kepentingan nasional, bukan kepentingan suatu kelompok tertentu. Kepentingan ini merupakan suatu rumusan yang telah disepakati di tingkat nasional.

Bagi Realis, kepentingan pertahanan negara yang diperjuangkan dalam DPM merupakan wujud dari upaya perjuangan untuk *power (struggle for power)* atau *realpolitik*. Dalam pandangan Realis, tindakan dalam DPM harus diarahkan untuk memaksimalkan keamanan serta kekuatan negara. DPM dapat menjawab asumsi-asumsi Realis yang pesimis terhadap terciptanya kerja sama antarnegara sebab persepsi ancaman antaraktor akan selalu muncul. Padahal, DPM dapat menjadi upaya pencegahan antara dua negara untuk tidak saling menimbulkan persepsi ancaman, khususnya ancaman terkait

kapasitas militer yang dimiliki negara mitra. Apabila DPM dapat terbina menjadi kerja sama yang lebih erat, maka Realis dapat memandang DPM sebagai suatu upaya menyeimbangkan kondisi negara-negara yang ada di kawasan. Hal ini ditujukan agar terjadi perimbangan kekuatan (*balance of power*) serta mencegah adanya aktor yang dominan agar tercipta stabilitas keamanan di kawasan.

Selain faktor perjuangan untuk *power*, DPM dapat juga ditentukan oleh sifat dasar pola interaksi dalam sistem internasional yaitu anarki dan kompetitif yang cenderung ke arah konflik. Kondisi anarki yang digambarkan sebagai ketiadaan aktor utama atau otoritas pusaya yang mampu mengatur hubungan antarnegara di tingkat internasional ini dianut oleh kelompok Neo-Realis.

Analisis terhadap lingkungan strategis suatu negara dapat menghasilkan pertimbangan bagi pentingnya pelaksanaan DPM. Umumnya, DPM menjadi penting dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain karena faktor kedekatan geografis, karena adanya batasan maritim dengan negara tetangga atau antara sesama negara maritim yang memiliki visi yang searah. DPM dapat juga dilihat dalam kerangka *power* karena diplomasi ini dapat dilangsungkan suatu negara terhadap negara lain yang memiliki *power* lebih besar, antara *power* yang setara atau bahkan dengan negara yang memiliki *power* lebih kecil. Dalam cara pandang Realis, format DPM secara bilateral dibandingkan secara multilateral akan lebih baik karena diplomasi dianggap dapat berjalan lebih efektif, terutama untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak.

Namun, kritik Realis terhadap diplomasi atau kerja sama yang dianggap hanya dibangun oleh berbagai kepentingan jangka pendek, dapatlah disanggah oleh konsep DPM. Berbagai dorongan yang muncul kepada negara untuk melakukan kegiatan DPM justru bermula dari keinginan untuk menciptakan *confidence building measures* (CBM) antara pihak-pihak yang terlibat.

Kritik Realis terhadap pragmatisme dalam diplomasi juga bertentangan dengan prinsip DPM. Realis beranggapan bahwa diplomasi sering kali melibatkan keputusan yang tidak bermoral atas nama kepentingan nasional suatu negara. Prinsip Realis tersebut cukup sulit ditemukan dalam konsep dasar DPM sebab DPM mengedepankan dialog yang mencegah muncul dan berkembangnya persepsi ancaman. Penggunaan diplomasi keras (*coercive diplomacy*) seperti ancaman atau penggunaan kekuatan militer yang diusung oleh pendekatan Realis tidak terwujud dalam kegiatan-kegiatan DPM. Konsep dasar DPM adalah integrasi dan optimalisasi berbagai instrumen diplomatik, bukan dominasi salah satu instrumen diplomatik yang dilakukan pada saat kondisi damai, maupun pada saat terjadinya konflik demi memperkuat pertahanan maritim.

2. Liberalis dan Diplomasi Pertahanan Maritim

Beberapa asumsi Liberalis mengenai prinsip kerja sama internasional tentu sangatlah relevan dengan konsep DPM. Pentingnya pembinaan hubungan baik antarnegara di antaranya melalui mekanisme dialog dan negosiasi untuk menciptakan perdamaian dan mencapai solusi bersama adalah inti dari DPM. Berdasarkan pendekatan Liberalis, faktor pendukung terlaksananya DPM adalah adanya pengaruh sistem internasional yang anarki namun tertib karena adanya dukungan aturan-aturan serta hukum internasional yang berlaku serta dijunjung tinggi oleh institusi internasional serta aktor-aktor DPM.

Berlangsungnya DPM dalam pandangan Liberalis dapat menunjukkan bahwa interaksi antarnegara tidak selamanya kompetitif, tetapi berwujud kerja sama yang didasari nilai demokratis, bahkan dapat menciptakan ketergantungan (interdependensi). Interdependensi biasanya mengarah kepada perdagangan bebas dan ketergantungan ekonomi yang dapat meredam potensi konflik. Dalam konteks DPM, kerja sama dapat dibangun pada sektor-sektor terkait pertahanan maritim yang begitu beragam. Selain itu, DPM dapat berpotensi untuk

melahirkan interdependensi yang menguntungkan secara ekonomi, misalnya keuntungan yang diperoleh dari kesepakatan kerja sama untuk pembangunan industri pertahanan.

Pendekatan Liberalis berasumsi bahwa faktor pendorong terjadinya kerja sama adalah hasil dari dinamika politik domestik. Aktor utama dalam DPM adalah negara namun Liberalis menyatakan bahwa aktor nonnegara dari dalam negeri juga mempunyai pengaruh dan legitimasi dalam berbagai kegiatan DPM. Oleh karena itu, konsep DPM sesuai dengan pendekatan Liberalis karena mempertimbangkan masukan serta keterlibatan aktor nonnegara dalam DPM. Misalnya, individu-individu yang terlibat dalam perumusan dan pelaksanaan berbagai sektor pertahanan maritim negara.

Kritik yang ditujukan kepada Liberalis akibat dianggap terlalu optimis terhadap keberhasilan kerja sama internasional, dapat dipertimbangkan sebagai suatu tantangan dalam penerapan konsep DPM. Dalam hubungan internasional yang penuh dinamika, faktor kekuasaan dan faktor keamanan yang dinamis dapat secara tiba-tiba menjadi ancaman bagi perumusan dan pelaksanaan DPM. Pergantian pemerintahan yang baru atau orientasi keamanan suatu negara yang tiba-tiba bergeser dapat diantisipasi melalui hubungan baik yang terjalin melalui DPM terhadap negara mitra. Oleh karena itu, sebagai suatu bentuk diplomasi, DPM perlu dilakukan secara berkala dan terus diupayakan sehingga hubungan internasional yang berjalan secara dinamis itu dapat selalu ditanggapi secara seksama.

3. Konstruktivis dan Diplomasi Pertahanan Maritim

Asumsi utama Konstruktivis adalah aspek-aspek nonmaterial sebagai aspek penting penentu aksi suatu unit atau aktor. Tujuan akhir dari pelaksanaan DPM tidak hanya sekadar pencapaian kepentingan nasional yang dianggap tetap. Berdasarkan pendekatan Konstruktivis, DPM dapat dianggap mampu menciptakan lahirnya idea, norma, identitas tertentu akibat interaksi sosial yang terjadi antarpara aktor DPM.

Realitas DPM berdasarkan pendekatan Konstruktivis adalah interaksi antaraktor. Interaksi tersebut dapat terjadi dalam berbagai kegiatan DPM di mana para aktor dapat memunculkan sikap saling memahami dan saling pengertian antarsatu dengan yang lainnya. DPM dipandang sebagai suatu kegiatan yang penuh dinamika karena interaksi mampu membentuk struktur sosial dan identitas bagi para aktor.

DPM dapat menjadi saluran bagi interaksi antarnegara dalam bidang pertahanan negara khususnya pertahanan maritim untuk menyatukan pemikiran terkait ide, norma dan identitas. Kegiatan pertukaran perwira militer antarnegara untuk memperoleh pendidikan atau pelatihan militer, dapat menjadi contoh bagaimana DPM terwujud dalam interaksi yang mendukung konstruksi idea tertentu. Interaksi terkait aspek-aspek nonmaterial yang terjadi dalam kegiatan DPM menunjukkan bahwa isu-isu terkait pertahanan maritim dapat dikelola dan didiskusikan tanpa perlu selalu menggunakan kekuatan senjata atau kekuatan militer.

Bahkan, DPM yang terjalin antarnegara tertentu pada akhirnya dapat dipahami dan dikonstruksi oleh aktor-aktor lain yang ada di dalam sistem internasional, sebagai pembentuk realitas di kawasan dan juga di tingkat internasional. Salah satu contoh adalah terselenggaranya diplomasi pertahanan maritim di tingkat regional yang dilakukan oleh *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Negara-negara anggota ASEAN secara rutin mengadakan pertemuan tingkat tinggi menteri pertahanan untuk membicarakan kerjasama keamanan pertahanan dalam forum *ASEAN Defense Ministerial Meeting* (ADMM). Bahkan diselenggarakan pula forum *ADMM plus* yang mengundang keterlibatan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, India, Australia, Korea Selatan dan Selandia Baru.

Selain itu, atas inisiatif Indonesia, negara-negara anggota ASEAN sepakat mewujudkan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Berdasarkan pandangan Konstruktivis, AOIP dapat

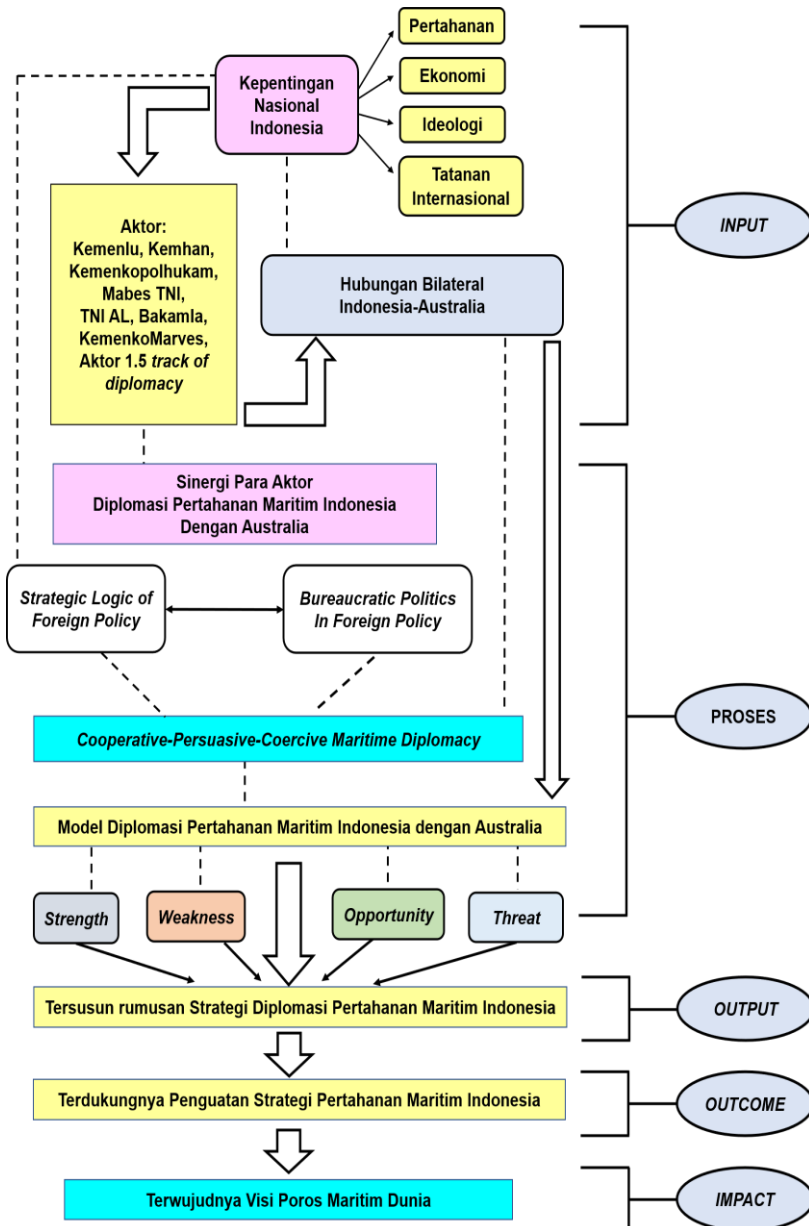
mencerminkan bahwa ASEAN memiliki cara pandangnya tersendiri dalam memandang Indo-Pasifik, tidak tergantung kepada cara pandang yang dimiliki oleh negara-negara lain terutama negara besar. AOIP berhasil pula menunjukkan adanya norma bersama dan identitas kolektif negara-negara ASEAN dalam membangun kerjasama pertahanan termasuk di antaranya kerja sama maritim yang lebih kuat dan koheren.

BAB 4

STUDI KASUS: DIPLOMASI PERTAHANAN MARITIM INDONESIA TERHADAP AUSTRALIA

Bab ini membahas studi kasus yang dapat menjelaskan bagaimana diplomasi pertahanan maritim Indonesia terhadap Australia dijalankan. Konsep dan teori diplomasi yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tertuang dalam studi kasus dalam bab ini.

Diplomasi Pertahanan Maritim (DPM) dapat digambarkan melalui kerangka berpikir yang terkait dengan beberapa konsep lain seperti kepentingan nasional dan konsep-konsep diplomasi lainnya yang terlihat pada Gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan kerangka pemikiran yang diawali oleh faktor kepentingan nasional sebagai *input* dari perumusan strategi kebijakan luar negeri. Kepentingan nasional diramu oleh para aktor yang terlibat dalam diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia. Proses ini memunculkan model diplomasi yang dikaji dari beberapa teori di antaranya teori *strategic logic of foreign policy*, *bureaucratic politics in foreign policy* serta konsep diplomasi maritim oleh Christian Le Mière. Proses pembentukan model diplomasi ini menghasilkan *output* berupa tersusunnya rumusan strategi diplomasi pertahanan maritim Indonesia yang dianalisis menggunakan kerangka SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*). Adanya pelaksanaan diplomasi pertahanan maritim tersebut diharapkan akan menghasilkan *outcome* berupa terdukungnya penguatan strategi pertahanan maritim Indonesia. Dampak (*impact*) yang muncul adalah terwujudnya visi poros maritim dunia.



Gambar 4. 1. Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim

Sumber: Penulis (2024)

A. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Konteks Maritim

Subbab ini akan membahas secara rinci tentang bagaimana kepentingan nasional Indonesia dalam konteks maritim. Analisis ini akan membantu memahami dinamika hubungan antara Indonesia dan Australia dan bagaimana mereka dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama di kawasan Asia-Pasifik.

Tabel 4. 1. Rumusan Kepentingan Nasional Indonesia

No	Jenis Data	Keterangan
1	Undang-undang Dasar Negara RI 1945	Pembukaan UUD 1945
2	Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025	Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun
3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019	Pedoman bagi Kementerian dan Lembaga untuk menyusun rencana strategis
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024	Arahan bagi pencapaian visi misi pemerintahan dan sasaran pembangunan jangka menengah serta titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia Maju 2045
5	Kebijakan Kelautan Indonesia 2017	Visi Poros Maritim Dunia
6	<i>Comprehensive Partnership 2017 and Plan of Action 2018</i>	Hubungan Indonesia-Australia
7	<i>The Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation ("The 2006 Lombok Treaty")</i>	Hubungan Indonesia-Australia
8	Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008	Kepentingan nasional, kebijakan pertahanan 2008
9	Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015	Kepentingan nasional, kebijakan pertahanan 2015
10	Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia 2019	Kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia dalam bidang maritim 2019
11	<i>2017 Foreign Policy White Paper</i>	Kebijakan luar negeri dan diplomasi Australia 2017
12	<i>2020 Defence Strategic Update</i>	Kebijakan pertahanan Australia 2020
13	<i>2020 Defence Factsheet Force Posture and Engagement 2016-2020</i>	Kebijakan postur pertahanan dan hubungan dengan pihak eksternal 2016-2020
14	<i>2016 Defence White Paper</i>	Kebijakan pertahanan Australia 2016
15	<i>2013 Defence White Paper</i>	Kebijakan pertahanan Australia 2013

Konsep kepentingan nasional menurut Donald E. Nuechterlein yaitu kepentingan pertahanan, kepentingan ekonomi, kepentingan tatanan internasional dan kepentingan ideologi (Bakry, 1999). Konsep kepentingan nasional Indonesia juga terwujud dalam buku *Putih Pertahanan Indonesia 2008*, buku *Putih Pertahanan Indonesia 2015* dan dalam Peraturan Presiden No 8. Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024.

Buku *Putih Pertahanan Indonesia 2008* menyatakan bahwa kepentingan nasional terbagi menjadi tiga kategori. Kategori pertama adalah kepentingan bersifat mutlak yaitu menjaga tetap tegaknya NKRI sehingga seluruh daya upaya dilakukan untuk memperjuangkan kepentingan tersebut. Kategori kedua adalah kepentingan nasional bersifat vital yaitu melanjutkan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur dan demokratis. Kategori ketiga adalah kepentingan nasional bersifat penting yaitu upaya menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas nasional.

Konsep kepentingan nasional yang tercantum pada buku *Putih Pertahanan Indonesia 2015* adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Kepentingan nasional Indonesia juga dituangkan dalam Peraturan Presiden No 8. Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024. Dokumen tersebut menyatakan bahwa kepentingan nasional mencakup upaya mengamankan keutuhan wilayah, mengamankan sumber daya ekonomi, dan melindungi keselamatan warga negara yang dilaksanakan dengan upaya pertahanan negara yang dikelola secara sistematis melalui sistem pertahanan negara (Peraturan Presiden No 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2021).

Berdasarkan kajian *literature*, kepentingan nasional Indonesia telah dituangkan dalam wujud berbagai kegiatan diplomasi

pertahanan maritim dengan Australia. DPM ini berjalan dengan cukup baik bahkan tetap berlangsung pada saat pandemi Covid-19 lalu. Diplomasi yang dilakukan antara Bakamla dan *ABF* misalnya, mengubah metode kegiatan agar kegiatan tetap terselenggara meskipun terjadi pengurangan intensitas kegiatan. Dalam hal ini tataran pembangunan rasa saling percaya tetap berlangsung (Prabowo, 2022).

Australia menyatakan bahwa kemitraan Australia dengan Indonesia merupakan kemitraan strategis kawasan yang paling penting. Kemitraan ini semakin mendalam dan meluas karena mendukung kepentingan bersama (2020 *Defence Strategic Update*, 2020). Perwujudan dari kemitraan tersebut salah satunya terlihat dari keterlibatan Australia dalam kerja sama internasional pertahanan, pendidikan, dan pelatihan internasional yang selalu meningkat jumlahnya tiap tahun (2020 *Defence Factsheet Force Posture and Engagement 2016-2020*, 2020).

Analisis lingkungan strategis menjadi dasar bagi perumusan dan kegiatan pertahanan negara. Australia merumuskan analisis tersebut sebagai dasar bagi kegiatan dan perencanaan pertahanan. Terdapat tiga pilar bagi kegiatan dan perencanaan pertahanan Australia yaitu pilar strategi, kemampuan dan pembaruan (Hanggarini & Emanuel, 2023).

Kepentingan pertahanan strategis Australia yang utama adalah melindungi Australia. Namun, hal ini perlu didukung dengan upaya menciptakan dan mendukung kawasan yang aman. Kawasan yang dimaksud adalah kawasan maritim Asia Tenggara dan Pasifik Selatan (mencakup Papua Nugini, Timor-Leste, dan negara-negara Kepulauan Pasifik. Australia berupaya meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia yang dianggap vital. Selain itu, Australia mengupayakan efektivitas kerja sama kawasan untuk menghadapi tantangan keamanan bersama termasuk ancaman terorisme dan peningkatan kapabilitas *Australian Defence Force* (*Defence White Paper*, 2016).

Kebijakan luar negeri Australia memberikan penekanan terhadap upaya menghadapi isu maritim dalam forum-forum kawasan, termasuk dalam *East Asia Summit* dan *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Australia juga berupaya meningkatkan pelaksanaan pelatihan untuk negara-negara kawasan dalam hal *maritime domain awareness*, perlindungan lingkungan laut serta hukum internasional. Dokumen pemerintah Australia menjelaskan bahwa program bantuan pembangunan yang diupayakan oleh Australia merupakan cerminan dari nilai-nilai yang mendukung kepentingan Australia. Investasi yang dilakukan oleh Australia dalam program tersebut merupakan upaya menciptakan stabilitas dan ketahanan bagi negara berkembang yang pada akhirnya dapat meningkatkan keamanan dan kemakmuran Australia. Australia mendorong tindakan-tindakan *confidence-building measures* dan kerja sama antar-*coast guards* di kawasan serta dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penguatan maritim. Australia juga mendukung upaya menghadapi terorisme dan menawarkan dukungan kepada negara-negara pantai (*littoral states*) dalam membangun strategi maritim nasional yang lengkap (2017 *Foreign Policy White Paper, Opportunity, Security, Strength*, 2017).

Kepentingan maritim Indonesia yang sama dengan Australia (*shared maritime interests*) telah mendorong dihasilkannya titik temu *interests* yang dituangkan dalam *Joint Declaration on Maritime Cooperation* pada 2017 dan kemudian *Plan of Action* pada 2018. Namun, faktor perbedaan mendasar antara kedua negara yang perlu dicermati juga adalah faktor perbedaan derajat “*sea blindness*.” Dalam hal ini kedua negara berbeda tingkat dalam mempersepsikan ancaman dari maritim atau kesadaran akan pentingnya maritim yang baru ada setelah terjadi ancaman. Cara pandang yang berbeda ini dapat memengaruhi proses dan hasil diplomasi pertahanan maritim (Laksmana, 2018).

Menurut Kol Laut (K) Dr. Steven Toar Sambouw, SH., S.Kep., MH, MAP, kepentingan nasional Indonesia telah dijalankan dengan baik meskipun belum seluruhnya tercapai dalam konteks diplomasi

pertahanan dengan Australia. Hal ini disebabkan oleh keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan yang sejatinya mengarah pada *Global Maritime Fulcrum*.

Pandangan serupa diutarakan juga oleh Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia, Dr. Siswo Pramono. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya ada kecocokan antara lima pilar dalam visi poros maritim dunia yang dikemukakan oleh Pak Jokowi dengan 15 tujuan dalam Deklarasi dan *Plan of action for the Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation*. Namun, menurut Konsul Gulfan Afero, SH., MA., Indonesia cenderung kurang memahami apa yang menjadi tujuan dalam diplomasinya sehingga hanya fokus kepada langkah yang harus dihindari dan tidak melakukan antisipasi tindakan. Hal serupa juga diutarakan oleh Konsul Jenderal RI, Listiana Operananta, S.IP., Msi., yang mengatakan untuk peningkatan diplomasi ke depannya perlu penetapan *goal* yang *tangible* (nyata).

B. Perwujudan Kepentingan Nasional Indonesia dalam Diplomasi Pertahanan Maritim dengan Australia (2014-2021)

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas perwujudan kepentingan nasional Indonesia dalam konteks hubungan bilateral Indonesia dengan Australia. Berikut ini diuraikan beberapa penelitian yang terkait.

Studi Greenlees (2018) membahas evolusi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia khususnya kebijakan penyelarasan terhadap *great power* (Greenlees, 2018). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan *alignment* Indonesia selama periode tertentu bukan merupakan refleksi *balance power* atau *balance of threat* melainkan *balance of risk* antara tujuan domestik dan tuntutan internasional. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menjadi kerangka berpikir sejauh mana *balance of risk* menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia. Penelitian berdasarkan

dinamika politik internasional dan keamanan regional terkini untuk melanjutkan kajian terhadap evolusi implementasi kebijakan luar negeri Indonesia perlu dilakukan.

Hasil penelitian lain yang disusun oleh Greta Nabbs-Keller dapat menjadi kerangka dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Australia pascapemerintahan Soeharto. Penelitian tersebut berjudul "*Understanding Australia-Indonesia relations in the post-authoritarian era: resilience and respect*" mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman Australia terhadap kedaulatan nasional Indonesia, kepentingan utama Indonesia serta menyinggung perbedaan budaya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap hubungan bilateral kedua negara. Pasca-otoritarian Soeharto, hubungan dianggap rapuh, melupakan adanya *powerful strategic imperatives* yaitu *resilience and respect* (Nabbs-Keller, 2020). Pembahasan mengenai politik domestik Australia dalam penelitian tersebut akan lebih mendalam apabila dikaitkan dengan kajian mengenai sinergi para aktor atau politik birokrasi yang ada di pemerintahan.

Penelitian Phillips dan Hiariej (2016) membahas bagaimana '*Bandung divide*' menjadi faktor yang menghambat hubungan Indonesia-Australia. Ini karena adanya perbedaan kedua negara dalam hal orientasi *normative*, terkait tata aturan internasional liberal dan beragam strategi keamanan di kawasan Asia Tenggara (Phillips & Hiariej, 2016). Kesimpulan dari penelitian ini adalah meskipun kedua negara memiliki orientasi berbeda dan tidak mengadopsi '*Bandung divide*' tetapi kedua negara sama-sama memiliki komitmen normatif mendasar yang sama. Penelitian tersebut membahas dampak '*Bandung divide*' terhadap hubungan kedua negara tetapi belum membahas dampaknya terhadap diplomasi pertahanan maritim Indonesia terhadap Australia, atau sebaliknya.

Penelitian Troath (2019) membahas mengenai *trust* sebagai faktor penting penentu kesuksesan hubungan bilateral Indonesia-Australia. Penelitian tersebut berjudul "*Bonded but Embedded: Trust in Australia-Indonesia Relations, Keating and Suharto to Turnbull and*

Jokowi.” Menurut peneliti, pergantian kepemimpinan politik Australia berjalan dalam siklus yang cepat sehingga dapat memengaruhi hubungan bilateral. Hubungan yang baik antara pemimpin dapat menjelaskan dinamika kerja sama bilateral namun *trust* serta *bonded and embedded trust* merupakan faktor penentu keberhasilan hubungan bilateral. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan kerangka berpikir terutama dalam menjelaskan faktor yang mendukung pelaksanaan diplomasi antara kedua negara yang dijalankan oleh aktor petinggi negara (Troath, 2019).

Penelitian Baldino dan Carr (2016) mengkaji peluang dan kendala dalam melaksanakan diplomasi pertahanan Australia dan penerapannya di kawasan pada masa mendatang. Menurut peneliti, keuntungan dari pelaksanaan diplomasi pertahanan tampak jelas dalam tingkat taktis dan operasional. Dengan demikian, isu keamanan jangka pendek dan menengah namun bukan strategi utama, dapat diatasi melalui diplomasi pertahanan (Baldino & Carr, 2016). Peneliti menyimpulkan bahwa diplomasi pertahanan Australia tidak saja harus berupaya upaya diplomasi dalam pengertian tradisional, tetapi juga menyangkut bagaimana negara-negara di kawasan melakukan penilaian terhadap kapabilitas Australia dan nilai strategisnya. Berdasarkan kenyataan bahwa politik domestik Australia yang sangat menentukan hubungan bilateral dengan Indonesia, maka perlu dilakukan kajian para aktor yang terlibat dalam perumusan strategi dan pelaksanaan diplomasi pertahanan.

Penelitian lain yang terkait dengan perwujudan kepentingan nasional adalah penelitian yang membahas upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Australia khususnya kegiatan program kerja sama pertahanan (Laksmiana, 2018). Peneliti mengusulkan perlunya reformasi terhadap program pendidikan dan program pelatihan agar fokus terhadap tantangan maritim bersama, memformulasikan jangka pendek dan jangka panjang (Laksmiana, 2018). Dengan memahami *working paper* ini maka akan diperoleh gambaran mengenai teknis pelaksanaan hubungan pertahanan kedua negara. Pemahaman ini dapat memperkaya pandangan untuk

peningkatan kualitas hubungan kedua negara khususnya terkait *domain* maritim.

Penelitian lain yang juga relevan adalah penelitian oleh Prabowo (2022). Penelitian tersebut mengkaji bentuk dan tujuan diplomasi maritim antara Bakamla dan *Australian Border Force* (ABF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instansi dapat menyesuaikan kondisi pandemi, dengan mengubah metode kegiatan sehingga diplomasi tetap terselenggara walaupun terjadi pengurangan intensitas kegiatan. Dengan mengacu kepada konsep dari Le Mière, disimpulkan bahwa bentuk diplomasi maritim antara Bakamla-ABF tidak sepenuhnya menyerupai yang disampaikan oleh Le Mière. Tujuan diplomasi maritim Bakamla-ABF adalah pada tataran pembangunan rasa saling percaya (Prabowo, 2022). Penelitian tersebut dapat menjadi contoh diplomasi maritim yang berlaku di antara kedua negara melalui lembaga/institusi negara. Penelitian ini dapat memberikan gambaran sejauh mana diplomasi maritim berhasil dilakukan di masa pandemi antara Indonesia dengan Australia.

Gordyn (2020) membahas faktor-faktor yang berada di bawah faktor negara atau *substate level* yang memberikan pengaruh terhadap kerja sama mengenai *irregular migration* antara Indonesia-Australia dan dalam kondisi apa hubungan tersebut dapat berjalan dengan baik (Gordyn, 2020). Faktor *trust* merupakan hal penting dalam hubungan bilateral yang ditunjang oleh birokratik politik dan bukan saja elite politik atau kepemimpinan. Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa faktor yang dapat mendukung kerja sama bilateral yaitu dari faktor pemimpin (terutama di tingkat bawah), hubungan antarlembaga, peran media, dan konteks politik internasional. Beberapa faktor di *substate level* yang ditemukan perlu menjadi pertimbangan bagi kerangka berpikir untuk menganalisis diplomasi pertahanan maritim Indonesia terhadap Australia secara menyeluruh tidak hanya dalam isu *irregular migration*.

Berdasarkan pemaparan pada penelitian-penelitian sebelumnya terlihat bahwa kepentingan nasional Indonesia telah

diperjuangkan dalam DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021). Kepentingan nasional tersebut terwujud dalam berbagai kegiatan dialog hingga kegiatan yang bersifat teknis. Seluruh kegiatan tersebut mencerminkan upaya-upaya sebagai berikut.

1. Menjaga kedaulatan wilayah,
2. Memperkuat keutuhan wilayah, menjamin tegaknya NKRI,
3. Memperkokoh konektivitas laut, perlindungan terhadap zona ekonomi eksklusif,
4. Menghadapi ancaman dan peluang,
5. Menciptakan keselamatan bangsa dan negara, penanggulangan tindak kejahatan di laut, menunjukkan kehadiran dan melakukan pengawasan di laut, keselamatan transportasi terkait *search and rescue*, melakukan perlindungan dan pelayanan masyarakat Indonesia di luar negeri,
6. Memajukan kesejahteraan umum,
7. Membantu perdamaian dan keamanan di kawasan, pemanfaatan laut untuk meningkatkan kerja sama di kawasan dan tataran global,
8. Menciptakan negara maritim berdaulat maju mandiri dan kuat, *sea projection*, Nawa Cita menjadikan Indonesia sebagai *Center of Asia in the Ocean*,
9. Pengelolaan sumber daya maritim, pengelolaan sumber daya di landas kontinen yang strategis,
10. Meningkatkan diplomasi ekonomi, isu ekonomi dan isu pembangunan, industri maritim, pasar global, pasar regional,
11. Perlindungan lingkungan laut,
12. Melakukan kerja sama pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu kelautan,
13. Menjaga warisan budaya di laut, hewan langka di laut.

Delapan kategori kepentingan yang diperjuangkan yaitu terkait dengan aspek:

1. Wilayah.
2. Keselamatan negara.
3. Kesejahteraan bangsa.

4. Perdamaian.
5. *Power*.
6. Pengetahuan dan teknologi.
7. Lingkungan.
8. Budaya.

Kategori-kategori kepentingan nasional yang dijalankan dalam DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021) tersebut sejalan dengan uraian mengenai kepentingan nasional yang tercantum pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Peraturan Presiden No 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2020-2024). Ada tiga kategori pertahanan dalam dokumen tersebut yaitu:

1. Mutlak: kepentingan keutuhan wilayah.
2. Vital: kepentingan mengamankan sumber daya ekonomi.
3. Penting: kepentingan melindungi keselamatan warga negara.

Pemaparan mengenai konsep kepentingan nasional yang diwujudkan dalam DPM Indonesia dengan Australia telah mencakup seluruh dimensi kepentingan nasional oleh Nutcherlein meskipun dalam porsi yang berbeda. Nutcherlein menyatakan bahwa ada 4 dimensi kepentingan nasional yaitu:

1. Kepentingan pertahanan.
2. Kepentingan ekonomi.
3. Kepentingan tatanan internasional.
4. Kepentingan ideologi.

Dimensi kepentingan pertahanan yang bersinggungan dengan kepentingan ekonomi sangat menonjol diperjuangkan dalam DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021). Kepentingan tatanan internasional juga diwujudkan dalam konteks hubungan bilateral ini. Dimensi kepentingan ideologi juga masih belum terlalu banyak dimanfaatkan. Intensitasnya lebih sedikit dibandingkan dengan perjuangan dimensi kepentingan tatanan internasional dalam konteks hubungan multilateral.

Berdasarkan pemahaman kerangka pemikiran di atas maka disusun Tabel 4.2 berikut ini.

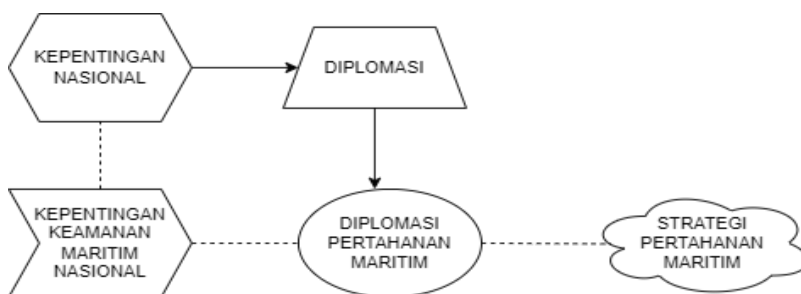
Tabel 4. 2. Perwujudan Kepentingan Nasional dalam DPM Indonesia

Aspek Kepentingan Nasional dalam DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021)	Perwujudan Kepentingan Nasional	Contoh Kegiatan
Wilayah, Keselamatan negara, Kesejahteraan bangsa, Perdamaian, Power, Pengetahuan dan Teknologi, Lingkungan, Budaya	Dialog dan Meeting	<i>Indonesia-Australia Foreign Affairs and Defence Ministers 2+2 Dialogue</i>
		<i>Defence Ministerial Meeting (DMM)</i>
		<i>Indonesia – Australia Defence Strategic Dialogue (IADSD)</i>
		<i>AUSINDO High Level Committee (HLC)</i>
		<i>Navy to Navy Talks</i>
		<i>Ikatan Alumni Pertahanan Indonesia-Australia (IKAHAN).</i>
	Operasi dan Latihan Bersama	<i>Expert Working Group</i>
		Patkor Ausindo
		<i>Cassowary Exercise</i>
		Latihan Penyelamatan Kapal Selam Black Carillion, TNI AL sebagai <i>Observer</i>
	Symposium / Seminar	<i>Kakadu Exercise</i>
		<i>Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEX)</i>
	Pendidikan dan Kursus	<i>Port Visit</i>
		<i>Sea Power Conference (SPC)</i>
		<i>West Pacific Naval Symposium</i>
		Indonesia dan Australia memiliki pertukaran program pendidikan dan pelatihan
Pendidikan setera Sesko Angkatan oleh RAN dan TNI AL		
Alutsista	Pendidikan di Sesko TNI di RAN	
	Kursus Bahasa Inggris di Australia	
Militer	Program <i>Sister Academy Relationship</i> antara AAL dan RAN	
	Pendidikan di <i>Australian Defence Force Academy (ADFA)</i>	
Bantuan alat perlindungan diri	Hibah Alutsista dari Dephan Australia kepada TNI untuk mendukung Satgas TNI dalam misi PBB	
	Penundaan rencana TNI-ADF UN <i>Mission Co-Deployment in Mali</i>	
	Bantuan alat perlindungan diri tenaga kesehatan dan alat Test PCR Covid-19 kepada Kemhan dan TNI	

Sumber: materi diskusi dengan narasumber SH dan informasi tambahan diolah penulis

Berdasarkan beberapa contoh kegiatan DPM yang telah dilakukan muncul beberapa aspek kepentingan nasional yang perlu ditekankan dalam DPM maritim. Konseptualisasi kepentingan yang spesifik ini perlu diuraikan dalam konsep kepentingan keamanan

maritim nasional (KKMN). Tujuan mengkritisi konsep kepentingan nasional yang menurunkan konsep KKMN adalah agar DPM dapat memiliki landasan *output* yang jelas. Kajian kritis terhadap konsep kepentingan nasional yang dikaitkan dengan ketiadaan konsep keamanan maritim nasional masih terhitung sedikit jumlahnya. Padahal dengan adanya konsep yang menjadi dasar DPM maka *output* DPM yang nyata (*tangible*) dan terukur (*measurable*) akan tercapai. Kebutuhan akan konsep tersebut dapat diuraikan melalui Gambar 4.2.



Gambar 4. 2. Konsep Kepentingan Nasional dan DPM

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar tersebut maka terlihat bahwa konsep kepentingan nasional memang perlu dikritisi. Konsep kepentingan nasional dengan konsep kepentingan keamanan maritim nasional (KKMN) harus dibedakan. Konsep kepentingan nasional harus menurunkan konsep KKMN yang menjadi dasar bagi DPM.

Konsep kepentingan nasional perlu dipandang sebagai sumber dari perumusan konsep kepentingan keamanan maritim nasional (KKMN). Konsep KKMN ini penting diuraikan lebih lugas agar DPM juga dapat memiliki sasaran yang jelas sehingga DPM dapat berjalan lebih terarah dan dapat terukur. Konsep KKMN dapat disusun berlandaskan visi PMD serta kebijakan maritim nasional. Selain itu, pengembangan konsep KKMN dapat diselaraskan dengan apa yang telah tertuang dalam RPJP maupun RPJM.

Perumusan konsep tersebut terlihat pada Tabel 4.3. Konsep Kepentingan Keamanan Maritim Nasional. Dalam konsep KKMN terlihat adanya identifikasi terhadap ancaman keamanan tradisional dan nontradisional.

Tabel 4. 3. Konsep Kepentingan Keamanan Maritim Nasional

Kepentingan Nasional Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008)		Aspek Konsep Kepentingan Nasional dalam DPM Indonesia	Konsep Kepentingan Keamanan Maritim Nasional
Mutlak	Tetap tegaknya NKRI sehingga segala daya upaya perlu dilakukan untuk mencapai kepentingan tersebut	Wilayah, Keselamatan negara,	Tetap tegaknya kedaulatan wilayah maritim NKRI berideologi Pancasila melalui pengelolaan sumber daya maritim, kekuatan maritim, pengetahuan, teknologi, budaya maritim untuk menciptakan keselamatan negara dan kesejahteraan bangsa serta
Vital	Tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur dan demokratis	Keselamatan bangsa, Perdamaian, <i>Power</i> ,	
Penting	Upaya menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional	Pengetahuan dan teknologi, Lingkungan,	

Sumber: diolah oleh penulis

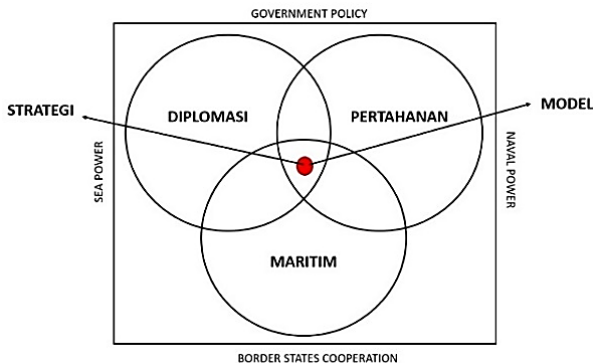
Konsep kepentingan keamanan maritim nasional (KKMN) ini sangat perlu untuk disusun. Jika konsep kepentingan nasional mengenai keamanan maritim nasional lebih terarah dan terukur, maka Indonesia akan dapat menghadapi ancaman keamanan maritim dari Australia yang dilakukan melalui diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia.

C. Sinergi Aktor dalam Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dengan Australia (2014-2021)

Sinergi yang berlangsung antara aktor-aktor DPM Indonesia dalam diplomasinya dengan pihak Australia dapat dikategorikan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya koordinasi, kepemimpinan, komunikasi antara aktor-aktor DPM Indonesia.

Selain aspek kerja sama, sinergi juga ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan kinerja dari masing-masing aktor. Dalam hal

pertahanan, anggaran pertahanan, ketersediaan alutsista merupakan faktor penentu bagi terjadinya sinergi. Sebagai contoh, ketika terjadi musibah di laut, memang telah ada alat yang menyiarkan SOS. Sinergi antaraktor terjadi. Namun, ketika kapal perang telah datang mendekati ternyata kapal yang terkena musibah itu sudah terlanjur tenggelam yang mengakibatkan korban di kapal meninggal dunia. Hal ini dapat terjadi karena kecepatan reaksi yang kurang akibat kurangnya jumlah alutsista yang kita miliki. Oleh karena itu, meskipun kebijakan pemerintah telah baik tetapi apabila *sea power* dan atau *naval power*-nya lemah, maka diplomasi pertahanan maritim tetap tidak dapat berjalan dengan baik. Gambar 5.3 adalah skema yang diusulkan partisipan mengenai pentingnya keterlibatan banyak *stakeholder*, tidak hanya kekuatan AL saja dalam diplomasi pertahanan maritim.



Gambar 4. 3. Konseptualisasi Diplomasi Pertahanan Maritim

Sumber: Materi Diskusi dengan Laksma TNI (Purn) Dr. Ir Benny Rudiawan, SE MSi Han

Berdasarkan gambar yang disusun oleh Laksma TNI (Purn) Dr. Ir Benny Rudiawan, SE., M.Si tersebut terlihat bahwa terdapat 3 lingkaran yang bertautan dan berada di dalam suatu kotak besar. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah merupakan hal utama demikian juga kerja sama antarnegara terkait isu perbatasan. Namun, jangan sampai dilupakan pentingnya *sea power* dan *naval*

power dalam sinergi aktor-aktor diplomasi pertahanan maritim Indonesia.

Potensi untuk sinergi para aktor DPM Indonesia dengan Australia telah ditunjukkan melalui koordinasi yang cukup baik di bawah *leading agent* yaitu Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan. Namun, dalam membangun sinergi antarberagam aktor yang diperlukan bukanlah sekadar koordinator, melainkan aktor yang dapat mengelola beragam tujuan dari tiap *stakeholder*.

Menurut Laksma Bakamla S.H. Kowaas, MSc., CSBA, yang dibutuhkan adalah seorang koordinator, atau dalam istilah musik, seorang pengatur orkestra. Dengan adanya pengatur orkestra, akan tercipta musik yang indah karena semua instrumen dapat dimainkan dengan harmonis. Namun, jika semua orang hanya memainkan terompet, maka bunyinya akan sama dan monoton. Oleh karena itu, seorang pengatur orkestra sangat diperlukan untuk memastikan setiap bagian bekerja bersama dengan baik.

Tidak mudah memang mewujudkan sinergi karena ego sektoral pasti selalu ada bahkan di negara maju sekali pun. Menurut partisipan, untuk menghadapi ego sektoral ini kita perlu meningkatkan kemampuan teknologi dan *sharing information* di tingkat internal khususnya pengetahuan-pengetahuan yang lebih nasionalis sehingga para aktor membentuk opini yang sama. Selain itu, hal mendasar lain yang perlu dibenahi dalam sinergi antara aktor DPM Indonesia dengan Australia adalah mengenai rantai komando (*chain of command*).

Menurut Duta Besar Pribadi Sutiono, Ph.D., setiap aktor atau pemangku kepentingan boleh saja mempertahankan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam pertahanan maritim, namun tetap harus ada rantai komando yang jelas. Sebagai contoh, ketika terjadi kasus penyelundupan di perairan Indonesia atau Australia, setiap organisasi yang menemukan penyelundupan harus melaporkannya terlebih dahulu kepada pihak komando mereka. Idealnya di Indonesia, Bakamla (Badan Keamanan Laut) seharusnya

menjadi pihak yang menerima laporan tersebut. Setelah itu, Bakamla akan menginstruksikan berbagai pihak terkait seperti bea cukai, polisi air, dan imigrasi untuk melakukan pengejaran dan penangkapan.

Indonesia perlu belajar dari Australia yang telah membenahi *chain of command*-nya. Tiap aktor memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing tetapi *command* hanya diberikan oleh satu aktor yaitu *Coast Guard*. Dalam konteks Indonesia tentu semestinya Bakamla yang memegang *command* tersebut. Contoh sinergi yang baik lainnya yaitu antara Kemlu dan Kemenkopolkum dalam mengatasi sengketa Laut Natuna Utara. Kemenkopolkum menyusun suatu juklak yang berfungsi sebagai petunjuk teknis tata cara penangkapan pelaku kejahatan di wilayah laut dalam keadaan damai.

Wewenang dalam pengelolaan maritim sebaiknya disatukan dalam satu lembaga atau setidaknya tidak melibatkan terlalu banyak pihak. Dengan lebih sedikit pihak yang terlibat, pengelolaan akan menjadi lebih efisien dan tidak berbelit-belit, sehingga prosesnya akan lebih cepat dan efektif.

Indikator-indikator penilaian terhadap sinergi tertuang pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4. Sinergi para aktor dalam DPM Indonesia dengan Australia

Kategori	Hasil Analisa
Sangat Baik	<i>Leading actor</i> sudah ada
	Hubungan dan kerjasama Menlu dan Menhan yang sangat baik
	Rapat koordinasi dilakukan untuk menyatukan pandangan aktor yang terlibat secara teknis
Baik	Keterlibatan aktor dari jalur <i>one and a half diplomacy</i>
	Hubungan personal mempermudah komunikasi dan interaksi
Cukup Baik	Efektivitas masih perlu diperbaiki
	Masih ada aktor yang berjalan sendiri padahal harusnya terjadi harmonisasi (<i>orchestracy</i>)
Kurang Baik	Tiap aktor DPM Indonesia memiliki program sendiri-sendiri yang harus dicapai targetnya

Sumber: diolah oleh penulis

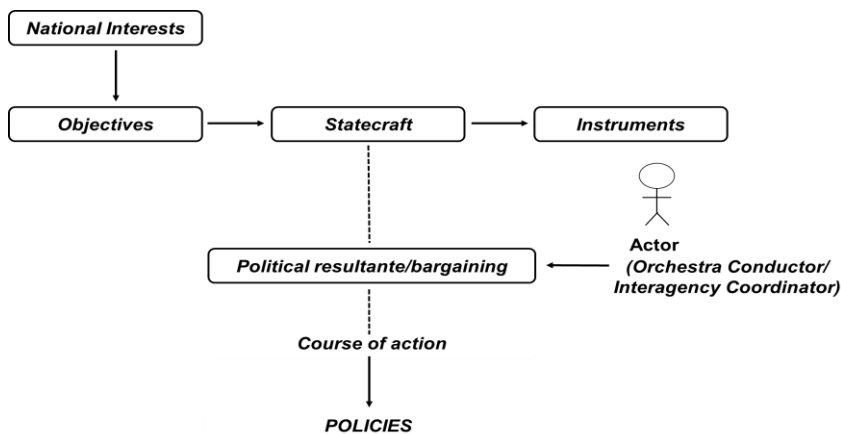
Sinergi antaraktor DPM Indonesia dapat dikategorikan baik dalam melaksanakan DPM dengan Australia. Indikator yang menentukan sinergi yang baik adalah adanya keterlibatan aktor dari *one and a half track of diplomacy* contohnya SAG IKAHAN dalam kegiatan DPM. Selain itu, sinergi internal para aktor DPM Indonesia telah terjalin dengan baik karena terbinanya komunikasi personal antara aktor-aktor DPM Indonesia. Namun, sinergi ini perlu terus dibenahi dengan adanya satu aktor (*single actor*) atau *single agency* yang berperan sebagai koordinator bagi seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan DPM. Lebih lanjut, dalam hal ini, suatu dewan yang dapat menaungi DPM dapat berwujud Dewan Pertahanan Nasional yang mampu membawahi pertahanan darat, udara, laut (menyangkut maritim), dan *cyber*.

Apabila dikaji dari konsep *Maritime Diplomacy* Le Mière maka diplomasi yang terjalin antara Indonesia dengan Australia (2014-2021) merupakan *cooperative maritime diplomacy*. Menurut Le Mière, *cooperative maritime diplomacy* dapat ditunjukkan melalui tindakan yang melibatkan *instrument hard power* hingga *soft power*. Bentuk diplomasi maritim ini dapat berupa pelatihan dan latihan bersama (*training and joint exercise*) hingga tindakan dalam bentuk bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistance*) atau penanggulangan

bencana (*disaster reduction*) (Le Mière, 2014). Konsep tersebut dijalankan dengan baik dalam DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021).

Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam DPM Indonesia dengan Australia yang perlu diatasi. Dengan adanya kekuatan (*strength*) yang dimiliki DPM Indonesia serta adanya peluang (*opportunity*) yang muncul dari pihak mitra yaitu Australia, maka model DPM Indonesia ke depannya diharapkan dapat lebih baik lagi dengan keuntungan maksimal yang dapat kita peroleh.

Namun, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi DPM Indonesia yang lengkap serta secara langsung dapat memberikan pengaruh terhadap penguatan strategi pertahanan maritim. Dengan demikian, diperlukan kerangka kerja bagi sinergi DPM. Berikut perpaduan konsep *Strategic Logic of Foreign Policy* dan *Bureaucratic Politics in Foreign Policy* yang merupakan gambar pola orkestrasi yang baik.



Gambar 4. 4. Pola Orkestrasi Aktor DPM Indonesia dengan

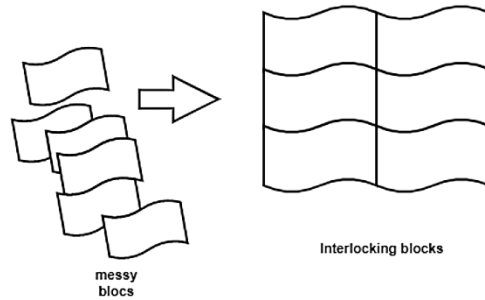
Sumber: diolah oleh penulis

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa kepentingan nasional (*national interest*) merupakan elemen mendasar bagi aktor untuk melaksanakan tindakan (*course of action*) hingga merumuskan

kebijakan-kebijakan (*policies*). Namun, tindakan dan kebijakan bisa terlaksana apabila terdapat aktor yang mendukung dan mampu terlibat dalam proses menghasilkan *political resultante*, setelah melakukan tawar-menawar (*bargaining*). Dengan demikian, *national interest* diperjuangkan oleh *statecraft* dengan menggunakan *instrument* untuk menghasilkan *political resultante*. *Statecraft* dapat berupa kementerian yang menjadi motor bagi DPM.

Sinergi dapat diibaratkan sebagai tatanan yang baik dalam sebuah *orchestra* yang dipimpin oleh seorang *conductor*. Peran aktor dalam DPM begitu banyak jumlahnya dan beragam. Hal ini dapat diibaratkan sebagai suatu *orchestra* yang dapat menghasilkan satu tindakan bersama yang sesuai dengan tujuan. Keberadaan pemimpin dalam hal ini *conductor* tentu tidak saja sebagai pemimpin, tetapi sebagai pemandu utama adanya harmonisasi dari hasil kegiatan seluruh aktor. Selama ini *conductor* DPM Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri yang bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan.

Namun, agar sinergi DPM atau *orchestra* berjalan dengan baik, para aktor yang terlibat merupakan faktor yang paling menentukan. Para aktor harus solid dan terikat antara satu dengan yang lain dalam melakukan tindakan atau menerapkan suatu kebijakan. Keterikatan ini merupakan wujud saling memahami dan saling mendorong pencapaian tujuan bersama. Dengan didasari kebutuhan yang sama yaitu mengejar kepentingan nasional, para aktor ini diharapkan dapat lebih terhubung dalam mencapai tujuan bersama. Modal dasar untuk saling terikat inilah yang dinamakan sebagai daya lekat dalam *orchestra* tersebut. Keseluruhan aktor yang terlibat dalam DPM Indonesia perlu memiliki *orchestra interlocking capacity* seperti yang terlihat pada Gambar 5.5. Para aktor DPM digambarkan sebagai beberapa *block* yang keberadaannya saling tumpang tindih dan tidak teratur dalam menjalankan peran dan posisinya. Namun, dengan dimilikinya kemampuan untuk saling mengikatkan antara satu aktor dengan aktor lainnya di antaranya melalui keterbukaan dan komunikasi maka terbentuklah *interlocking blocks*.



Gambar 4. 5. Orchestra Interlocking Capacity

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan rencana implementasi kerja sama maritim Indonesia-Australia yang disepakati pada tahun 2018, tercantum 9 (sembilan) area utama kerja sama maritim yang melibatkan aktor-aktor yang berbeda. Area kerja sama tersebut adalah:

1. Pembangunan ekonomi, keterhubungan maritim (*maritime connectivity*) dan *blue economy*.
2. Memperkuat keamanan maritim dan mengatasi kejahatan transnasional di laut.
3. Mengatasi pencarian ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai aturan (*illegal, unreported, and unregulated fishing*) serta berbagai jenis kejahatan lainnya pada sektor perikanan.
4. Meningkatkan keamanan maritim dan mencegah serta menanggapi polusi di lingkungan laut.
5. Meningkatkan upaya koordinasi dalam penanggulangan bencana.
6. Melakukan kolaborasi dalam hal ilmu kelautan dan teknologi.
7. Mengelola sumber daya kelautan dan *blue carbon* secara berkelanjutan.
8. Menjaga warisan budaya maritim.
9. Meningkatkan dialog dan keterlibatan dalam kerja sama platform regional dan multilateral.

Kesembilan area kerja sama tersebut tentu tidak dilakukan oleh satu kementerian, tetapi melibatkan banyak kementerian baik di Indonesia maupun di Australia. Sebagai contoh untuk area kerja sama yang kesembilan terkait dengan dialog, terdapat 7 (tujuh) aktor. Aktor dari pihak pemerintah Indonesia adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator bidang Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI AL, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Sementara itu, aktor yang terlibat dalam aspek kerja sama dari pihak pemerintah Australia tercatat 8 (delapan) aktor yaitu ini *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*, *Department of Defense (DoD)*, *Royal Australian Navy (RAN)*, *Australian Maritime Safety Authority*, *Department of Home Affairs*, *Australian Border Force*, *Australian Fisheries Management Authority* dan *Department of Agriculture and Water Resources (Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Australia, 2018)*.

Seluruh aktor DPM Indonesia yang terlibat dalam kerja sama aspek di atas diharapkan dapat bersinergi dengan baik secara internal. Dengan *orchestra interlocking capacity*, para aktor DPM Indonesia dapat bersikap terbuka sehingga berkomunikasi dengan baik dalam mencapai kepentingan nasional. Para aktor harus perlu memiliki kemampuan untuk saling melekatkan diri, mengurangi potensi tumpang tindih dan ketidakteraturan dalam menjalankan perannya. Apabila hal tersebut terjadi, maka terbentuklah gambaran *interlocking blocks*. Selain itu, para aktor DPM Indonesia pun perlu mengembangkan kemampuan bersinergi dengan pihak-pihak eksternal yaitu dengan aktor-aktor dari pihak pemerintah Australia. Sinergi dapat dimungkinkan terjadi apabila komunikasi berjalan lancar. Salah satu faktor penentu keberhasilan tersebut adalah penguasaan aktor-aktor DPM Indonesia dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris.

Dengan demikian, jika sinergi para aktor DPM Indonesia berjalan dengan baik, maka model diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia (2014-2021) juga akan berjalan dengan baik. Namun, untuk mencapai sinergi yang lebih baik, perlu diterapkan dalam konsep *orchestra interlocking capacity*.

D. Model Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dengan Australia untuk Penguatan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia (2014-2021)

Model diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia (2014-2021) memiliki beberapa faktor kekuatan dan kelemahan dari aspek internal. Selain itu, DPM Indonesia dengan Australia juga memiliki beberapa faktor peluang dan ancaman dari aspek eksternal (Australia).

Kekuatan utama yang dimiliki oleh DPM Indonesia adalah telah adanya landasan kuat untuk melakukan DPM yaitu Visi Poros Maritim Dunia yang kemudian tertuang dalam Kebijakan Kelautan Indonesia. Landasan ini juga menguatkan beberapa forum yang dibentuk antara kedua negara baik yang bersifat formal maupun informal. Salah satu forum informal yang telah terbina adalah dengan adanya *Senior Advisory Group (SAG) IKAHAN* yang memiliki anggota para mantan pejabat kemaritiman Indonesia serta alumni pendidikan di Australia. IKAHAN merupakan forum yang didanai oleh pemerintah Australia untuk menjadi wadah komunikasi para pejabat kemaritiman Australia dengan Indonesia. SAG IKAHAN ini dipandang penting dalam menjaga kerja sama pertahanan antara kedua negara. Jika jalur komunikasi formal mengalami kendala, diharapkan SAG dapat menjadi jalur alternatif untuk memperbaiki hubungan tersebut. Meski akhirnya ini bisa masuk dalam kategori diplomasi karena berlatar belakang dari TNI, sebenarnya diplomasi ini sangat tidak formal dan lebih bersifat spontanitas. Namun, isu-isu yang dibicarakan tetap terkait langsung dengan ancaman keamanan.

Namun, ada beberapa kelemahan juga muncul dari sisi aktor. Misalnya, kurangnya pemahaman aktor DPM Indonesia terhadap

pentingnya sifat resiprokal (timbang balik) dalam melaksanakan hubungan bilateral. Inisiatif dari pihak Australia perlu dibalas dengan inisiatif dari pihak Indonesia yang dapat meningkatkan intensitas hubungan bilateral. Selain itu, dirasakan pula kurang jelasnya rumusan sasaran diplomasi. Pelaksanaan diplomasi juga sering kali tidak ditentukan siapa yang berperan untuk mengendalikan atau merencanakan kegiatan.

Sementara telah cukup banyak indikator peluang yang berasal dari pihak Australia yang mendorong peningkatan DPM-nya dengan Indonesia. Menurut narasumber Bambang Dharmawan SE., M.Sc, aktor DPM Australia selama ini bersifat terbuka dan mengakomodasi kepentingan Indonesia sehingga membuka ruang untuk Indonesia. Pelaku diplomasi Australia juga cukup memahami Indonesia, bisa bahasa Indonesia bahkan bisa bahasa Jawa. Mereka juga menjadi siswa Lemhanas, bahkan kuliah di UGM.

Dari indikator ancaman, DPM Indonesia dengan Australia ditandai dengan mispersepsi yang terjadi antara *first track diplomacy* atau antarpublik Indonesia dengan publik Australia. Persepsi ancaman muncul akibat kurangnya informasi, tidak ada rasa percaya antara kedua belah pihak dan aliansi Australia dengan sekutunya terutama AS yang semakin erat, misalnya melalui pembentukan AUKUS. Persepsi ancaman yang dimiliki Indonesia atas Australia menyiratkan perlu adanya *trust* sebagai dasar membangun *chemistry* antara kedua belah pihak.

Dengan dibangunnya *chemistry* antara kedua belah pihak, potensi hubungan harmonis sebagai negara bertetangga akan terwujud. Pembinaan hubungan baik memang diperlukan karena suka tidak suka, Australia adalah negara tetangga yang berbatasan wilayah maritim langsung dengan Indonesia.

Model DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021) telah memiliki beberapa aspek kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) untuk peningkatan hubungan yang lebih baik lagi. Namun, masih ada kelemahan (*weakness*) dari sisi internal yang perlu

diperbaiki untuk memanfaatkan peluang dan dalam menghadapi ancaman (*threat*) dari lingkungan eksternal.

Tabel 4. 5. Model DPM Indonesia dengan Australia

Komponen	No	Indikator DPM	Keterangan
Kekuatan	1	Perjanjian	Telah ada <i>Comprehensive Partnership</i> dan <i>Action Plan</i> sebagai dasar pengikat kerjasama dan pelaksanaan DPM
	2	Kedekatan Geografis	Faktor kedekatan secara geografis mengarahkan kepada kesadaran menjaga keamanan maritim bersama
	3	Forum Kerjasama	Dibentuknya berbagai forum kerjasama strategis serta teknis di berbagai tingkat memungkinkan beragam kerjasama maritim oleh berbagai aktor
	4	Komunikasi Formal dan Informal	Komunikasi dua arah berjalan baik karena komunikasi formal didukung oleh komunikasi informal (personal)
Kelemahan	1	Tata Keamanan Maritim	Aktor yang terlibat banyak sehingga perlu penataan dalam menciptakan keamanan maritim. Misalnya siapa yang membuat strategi, apakah suatu Dewan yang menetapkannya, atau siapa yang menerapkannya.
	2	Timbal Balik	Pembinaan hubungan dengan mitra harus bersifat timbal balik, kita tidak selalu menerima inisiatif tetapi juga perlu melakukan inisiatif untuk kepentingan pertahanan.
	3	Isu Batas wilayah	Penyelesaian masalah perbatasan wilayah yang belum tuntas dapat menjadi ganjalan bagi perumusan kerjasama dalam hal lain
	4	Sarana Prasarana	Kemampuan militer, kemampuan ekonomi, kemampuan teknologi yang menunjang DPM
	5	Anggaran	Anggaran pertahanan perlu menunjang kegiatan-kegiatan DPM.
	6	Aktor	Ketibadaan <i>government at sea</i> atau kewenangan di laut (misalnya apabila ada pelanggaran siapa yang akan langsung bertindak) serta masih adanya ego sektoral para aktor DPM
Peluang	1	Antusiasme Australia	Sikap Australia sangat terbuka dan mengkomodifikasi kepentingan Indonesia, antusiasme dalam bekerjasama dengan Indonesia dan antusiasme dalam memahami budaya Indonesia dengan Indonesia sangat tinggi
	2	Dukungan terhadap peran Indonesia	Sebagai sesama negara <i>middle power</i> , Australia mendukung kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global
	3	Kemajuan Australia	Australia dapat menjadi mitra bagi kemajuan dalam bidang maritim terutama terkait dengan teknologi
	4	Peran Australia di kawasan	Australia terlibat dalam upaya penciptaan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara melalui kemitraan dengan negara-negara anggota ASEAN. Australia juga membina hubungan yang baik dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan sehingga hubungan baik Indonesia dengan Australia dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk merangkul negara-negara Pasifik
Ancaman	1	Mispersepsi	Kesenjangan atau kekaburan informasi serta pengalaman masa lalu, seringkali menciptakan mispersepsi di kalangan pejabat pemerintah maupun publik Indonesia terhadap pemerintah dan masyarakat Australia.
	2	Isu Keamanan Maritim	Pengawasan dalam menghadapi ancaman dari illegal fishing, illegal migrant dan refugee serta dampaknya
	3	Aliansi Australia	Kerjasama yang intens dengan Amerika Serikat serta aliansi Australia dengan negara-negara sekutunya memberikan kecurigaan negara tetangga sebagai bentuk <i>arms race</i>

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bawah komponen-komponen DPM Indonesia dengan Australia yang terbanyak adalah pada indikator kelemahan (*weakness*). Sementara itu, komponen-komponen DPM Indonesia dengan Australia yang paling sedikit adalah pada indikator ancaman (*threat*).

Indikator kelemahan (*weakness*) ditunjukkan dengan kondisi tata keamanan maritim yang tidak terarah, pembinaan hubungan dengan Australia yang kurang bersifat timbal balik, masih adanya isu batas wilayah maritim yang belum selesai, sarana prasarana yang kurang, anggaran yang masih belum maksimal untuk menunjang kegiatan DPM, serta permasalahan sinergi pada aktor DPM Indonesia. Sementara itu, indikator ancaman (*threat*) ditunjukkan melalui adanya mispersepsi berupa kesenjangan atau kekaburan informasi yang dimiliki oleh pejabat pemerintah atau publik Australia. Selain itu, masih perlu ditingkatkannya pengawasan terhadap beberapa isu maritim yang melibatkan kedua negara dan aliansi Australia dengan negara besar seperti AS. Ini berpotensi menciptakan *security dilemma* bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia sebagai negara tetangga yang dekat.

Model DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021) ditunjukkan melalui indikator kekuatan (*strength*) berupa perjanjian yang kuat sebagai landasan kerja sama, kedekatan geografis yang mendorong kesamaan kepentingan, telah terbentuknya forum kerja sama strategis di berbagai tingkat, serta telah terjalinnya komunikasi antara aktor DPM kedua negara baik secara formal maupun informal. Sementara itu, peluang (*opportunity*) yang muncul dalam DPM Indonesia dengan Australia ditunjukkan dalam bentuk tingginya antusiasme Australia untuk bekerja sama dengan Indonesia, adanya dukungan dari Australia terhadap peran Indonesia sebagai *middle power*, kemajuan Australia terkait teknologi dalam aspek maritim, serta peran Australia dalam menciptakan stabilitas di kawasan.

Setelah tahapan SSM dan analisis SWOT dilakukan maka terlihat model DPM berada pada kuadran III. Dengan demikian,

strategi prioritas yang perlu dipilih Indonesia adalah WO atau pertemuan antara *weakness* dan *opportunity*. Indonesia perlu meminimalisasi kelemahan dalam memaksimalkan peluang. Lebih lanjut, berdasarkan analisis SWOT *adaptive*, Indonesia dapat memiliki 2 (dua) pilihan strategi yaitu *strategi* dominan dan strategi menyertai seperti tercantum pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6. Pilihan Strategi dalam Model DPM Indonesia- Australia

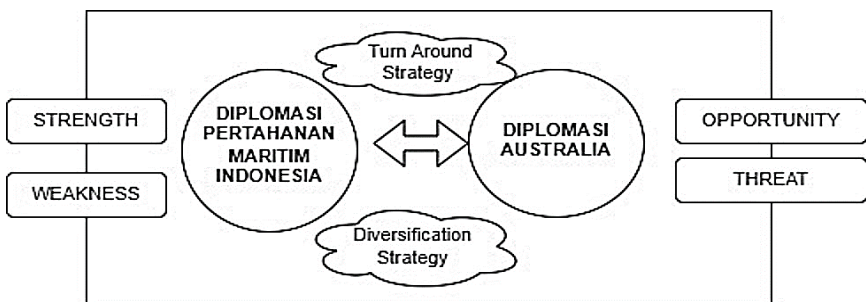
Analisa SWOT	Pilihan Strategi	Keterangan
Posisi	<i>Turnaround Strategy</i>	Meminimalkan kelemahan dalam memanfaatkan maksimal peluang dengan prioritas strategi misalnya WO (Min-Max)
<i>Adaptive Analysis</i>	Strategi Dominan: <i>Turnaround Strategy</i>	Meminimalkan kelemahan dalam memanfaatkan maksimal peluang, dengan tetap memperhatikan maksimalisasi kekuatan untuk mengatasi ancaman, dengan prioritas strategi, misalkan WO (Min-Max) dan ST (Max-Min)
	Strategi Menyertai: <i>Diversification Strategy</i>	

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan analisis SWOT posisi, pilihan strategi bagi DPM Indonesia adalah *turnaround strategy* atau strategi putar haluan. Strategi tersebut bertujuan merumuskan rencana bagi upaya meminimalkan kelemahan (*weakness*) untuk memanfaatkan maksimal peluang (*opportunity*). Contoh yang dapat dilakukan adalah meminimalkan salah satu komponen kelemahan (*weakness*) DPM Indonesia yaitu anggaran kegiatan. Kita perlu menjaga agar kegiatan DPM tidak menghabiskan dana anggaran yang terbatas, melalui upaya memaksimalkan peluang (*opportunity*) yang dimiliki oleh pihak mitra yaitu Australia. Salah satu komponen bagi indikator peluang dari Australia adalah tingkat pengetahuan dan kemampuan teknologi yang berada di atas Indonesia. Dalam menjalankan *turnaround strategy* ini, Indonesia dapat menyusun anggaran kegiatan latihan militer bersama dengan menekankan kepada area kerja sama. Indonesia dapat memanfaatkan peluang kemajuan teknologi Australia dalam aspek maritim.

Pilihan strategi lainnya dapat ditemukan melalui analisis SWOT *adaptive*. Berdasarkan analisis ini maka pilihan strategi dapat berupa strategi dominan yaitu *turnaround strategy* dan strategi menyertai berupa *diversification strategy*. Ketika DPM Indonesia menekankan penerapan strategi dominan maka di saat yang sama pun dapat melakukan strategi menyertai. Strategi yang dilakukan adalah upaya memaksimalkan kekuatan (*strength*) untuk mengatasi ancaman (*threat*). Salah satu kekuatan dalam DPM Indonesia dengan Australia adalah telah terbangunnya komunikasi antara para aktor DPM Indonesia dengan Australia baik secara formal maupun informal (*personal*). DPM Indonesia perlu melakukan upaya maksimal dalam membangun komunikasi agar komponen kekuatan ini dapat mengatasi ancaman dari Australia bagi DPM yaitu meniadakan kesenjangan atau kekaburan informasi di antara pejabat maupun publik Australia terhadap pemerintah dan publik Indonesia.

Pilihan-pilihan strategi bagi DPM Indonesia berdasarkan model DPM Indonesia dengan Australia terlihat pada Gambar 4.6. Pilihan strategi dipengaruhi oleh indikator-indikator yang berasal dari lingkungan internal yaitu indikator kekuatan (*strength*) dan faktor kelemahan (*weakness*). Sementara itu, indikator-indikator yang berasal dari lingkungan eksternal merupakan indikator peluang (*opportunity*) dan indikator ancaman (*threat*).



Gambar 4. 6. Model DPM Indonesia dengan Australia

Sumber: diolah oleh penulis

Diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia telah berjalan dengan baik. Model dan strategi DPM Indonesia (2014-2021) merupakan model dan strategi yang terbaik, namun masih berada di kuadran III. Ini menunjukkan bahwa model DPM Indonesia belum mencapai model terbaik yaitu di kuadran I sehingga Indonesia masih perlu merumuskan dan melakukan *turn around strategy* dan atau *diversification strategy*.

E. Strategi Diplomasi

Implementasi visi Poros Maritim Dunia semakin menurun setelah visi tersebut diluncurkan pada 2014. Salah satu perspektif mengenai penurunan nilai penting visi ini adalah faktor idiosinkretik dari Presiden Jokowi yang tidak mendukung visi PMD. Pendekatan yang digunakan berupaya menerapkan visi PMD namun, sayang penerapan visi tersebut cenderung tidak terarah.

Agar penerapan visi PMD dapat terus ditingkatkan, maka narasumber menyatakan perlunya generasi muda untuk membangkitkan visi tersebut. Visi Poros Maritim Dunia tetap harus ada. Ini merupakan tugas generasi-generasi penerus untuk membangkitkan lagi visi itu. Namun, pelaksanaan DPM yang mengarah kepada kerja sama perlu memerhatikan langkah koordinasi dalam tataran organisasi, di mana birokrasi kita mempertimbangkan isu keamanan yang semakin rumit, canggih, dan mahal. Sementara itu, Australia telah melangkah lebih jauh dengan mengedepankan konsep *inter agency* atau lintas lembaga. *Agency* juga perlu memahami keamanan nasional ditunjang kepemilikan manajemen para petinggi keamanan yang unggul. Hal ini diterapkan secara konsisten dan terpadu agar terhindar dari kerja sama pertahanan yang semu.

Hal yang perlu dicermati dalam penyusunan strategi DPM Indonesia dengan Australia adalah terkait indikator ancaman. Penyusunan strategi DPM Indonesia bukan merupakan isu-isu invasi atau isu rebutan pulau atau pelanggaran kedaulatan. Namun, yang

perlu dicermati adalah *management of navigation*. Selain itu, area potensial untuk konflik adalah *Indian Ocean* (Samudera Hindia).

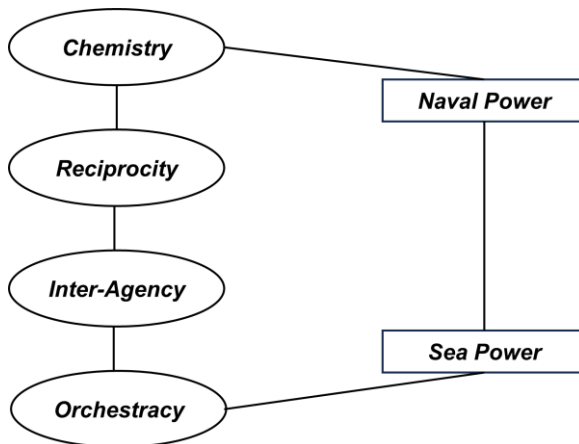
Terkait dengan penguatan strategi pertahanan maritim, DPM Indonesia perlu memerhatikan 2 elemen penting dalam Teori Mahan yaitu *character of the people* dan *character of the government* selain elemen lainnya yaitu *geografi, land, population, dan character*. Menurut narasumber, elemen-elemen ini dapat mendukung implementasi dari suatu strategi. Masyarakat Indonesia masih belum memiliki budaya maritim dan melihat laut sebagai suatu area yang berkonotasi negatif. Walaupun demikian, *character of government*, sudah mendukung strategi pertahanan maritim yang baik karena presiden dan menteri telah memegang visi PMD. Namun, arsitektur maritim tetap memerlukan rumusan yang jelas mengenai doktrin maritim, strategi maritim, kebijakan kelautan Indonesia yang berbasis maritim, strategi keamanan maritim nasional, serta strategi pertahanan maritim.

Definisi baku tentang strategi pertahanan maritim kita memang belum ada namun, strategi tersebut perlu mengombinasikan beberapa elemen penting. Elemen tersebut adalah *ends, means* atau sumber daya yang kita miliki serta *ways*, satu pendekatan dalam rangka kita mencapai tujuan nasional secara umum. Kemudian, kita juga perlu melibatkan berbagai potensi maritim yang lain untuk memperkuat kapabilitas, kekuatan pertahanan maritim Indonesia, menyangkut komando laut, penguatan, pengendalian dan komunikasi maritim melibatkan pertahanan militer dan juga pertahanan nirmiliter yang tidak kalah pentingnya.

DPM Indonesia dengan Australia pada periode 2014-2021 terbukti mengarah kepada sasaran dalam membantu mewujudkan visi sebagai Poros Maritim Dunia dengan terjalannya kerja sama pengamanan dan patroli maritim bersama. Ini menambah rasa aman untuk melakukan program-program dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia. Namun, model yang muncul tidak dapat langsung menjadi *template* bagi diplomasi pertahanan maritim Indonesia yang

dilakukan dengan negara lain, karena memerlukan modifikasi berdasarkan karakteristik dan kepentingan nasional negara mitra, tanpa mengorbankan kepentingan nasional Indonesia.

Penulis merumuskan strategi yang perlu mendasari strategi DPM Indonesia dengan negara mitra lain. Kerangka strategi DPM Indonesia mengandung konsep adanya ikatan atau kecocokan (*chemistry*), timbal balik (*reciprocity*), antarlembaga (*interagency*), dan keterpaduan atau orkestrasi (*orchestracy*). Konsep tersebut terintegrasi dengan *naval power* dan *sea power* yang diuraikan pada Gambar 4.7. Kerangka tersebut tetap perlu diintegrasikan dengan konsep utama DM, DP, dan DPM.

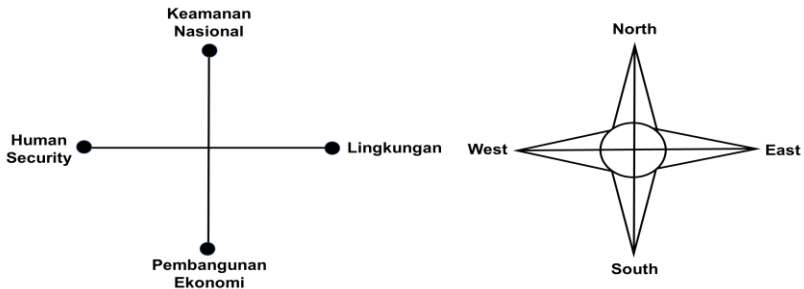


Gambar 4. 7. Kerangka Strategi DPM Indonesia

Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan pemahaman mengenai konsep diplomasi maritim dan konsep keamanan maritim yang diungkapkan oleh Bueger (2015). Ini dapat disimpulkan bahwa ada 4 dimensi utama dalam konsep keamanan maritim yaitu keamanan nasional, lingkungan, pembangunan ekonomi, dan *human security*. Seperti terlihat pada Gambar 4.8 terdapat 4 titik konsentrasi bagi pelaksanaan DM. Titik konsentrasi tersebut mengarah kepada visualisasi 4 arah mata angin yang bisa kita temui pada petunjuk arah mata angin utama atau

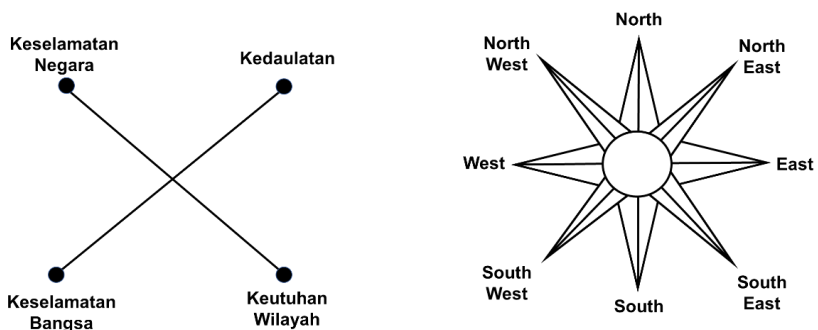
primer pada penunjuk arah (*compas*): utara (*north*), selatan (*south*), timur (*east*), dan barat (*west*).



Gambar 4. 8. Bagan Konsep Strategi Diplomasi Maritim

Sumber: Dimensi keamanan maritim (Bueger, 2015)
dan informasi tambahan diolah oleh penulis

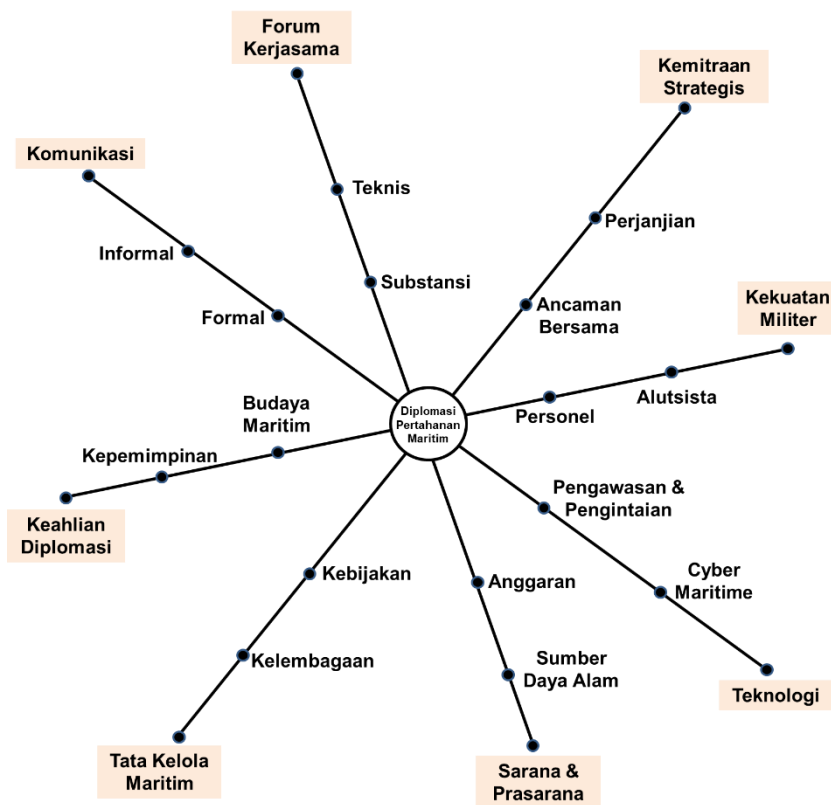
Sementara itu, dalam diplomasi pertahanan mengandung paling tidak 4 titik penting atau arah yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan negara dan bangsa. Gambar 4.9 menguraikan konsep strategi diplomasi pertahanan yang dapat mengarah kepada visualisasi 4 arah mata angin sekunder yang terletak di antara 4 arah mata angin pertama atau ketiga yaitu timur laut (*north east*), barat laut (*north west*), barat daya (*south west*), dan tenggara (*south east*).



Gambar 4. 9. Bagan Konsep Strategi Diplomasi Pertahanan

Sumber: Konsep Diplomasi Pertahanan (Winger, 2014)
dan informasi tambahan diolah oleh penulis

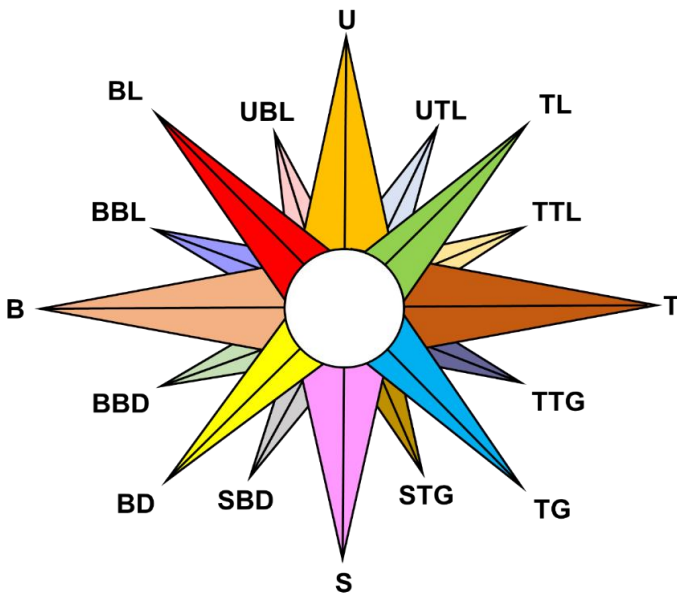
Oleh karena konseptualisasi diplomasi pertahanan maritim yang merupakan arsiran dari konsep diplomasi maritim dan diplomasi pertahanan, maka konsep tersebut dapat dituangkan dalam visualisasi 8 arah mata angin tersier. Konsep tersebut digambarkan di antara arah mata angin primer dan arah mata angin tersier. Visualisasi konsep strategi DPM terlihat dalam strategi DPM 8 arah yang setiap arah atau fokusnya memiliki subarah atau subfokus tersendiri. Visualisasi tersebut dapat terlihat pada gambar 5.10.



Gambar 4. 10. Bagan Konsep Strategi DPM Indonesia 8 Arah

Sumber: diolah oleh penulis

Seluruh strategi DM, DP, dan DPM, dapat dipetakan menjadi satu kesatuan. Visualisasi seluruh arah penting dalam diplomasi dapat terlihat dalam 16 arah mata angin atau dikenal dengan nama arah interkardinal sekunder (*secondary intercardinal directions*). Arah mata angin mencakup utara, utara timur laut, timur laut, timur-timur laut, timur, timur tenggara, tenggara, selatan tenggara, selatan, selatan barat daya, barat daya, barat-barat daya, barat, barat-barat laut, barat laut dan utara barat laut seperti terlihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4. 11. Enam Belas Arah Mata Angin

Sumber: diolah oleh penulis

Konsep 16 arah mata angin dapat menjadi referensi bagi rumusan DPM Indonesia. Dalam konsep strategi DPM Indonesia dari DPM guna penguatan strategi pertahanan maritim Indonesia dalam mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia memiliki 16 arah utama yang masing-masing memiliki subfokus seperti terlihat pada Gambar 4.12.



Gambar 4. 12. Bagan Konsep Strategi DPM Indonesia 16 Arah
 Sumber: diolah oleh penulis

Berdasarkan gambar 4.12, DPM Indonesia perlu mencakup sasaran utama DM yang digambarkan terdapat pada sumbu primer, sasaran utama DP yang digambarkan terdapat pada sumbu sekunder dan sasaran utama DPM yang berada terdapat pada sumbu tersier.

Pada sumbu primer, sub-arah dari DM mencakup 4 hal utama yaitu keamanan nasional, lingkungan, pembangunan ekonomi, dan *human security*. Pada sumbu sekunder, sub-arah dari DP mencakup 4 hal utama yaitu kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan keselamatan negara. Pada sumbu tersier, sub-arah dari DPM terdiri dari 8 hal utama:

1. Kemitraan strategis yang ditentukan oleh:
 - Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak misalnya dalam wujud perjanjian atau kesepakatan.
 - Adanya pemahaman akan ancaman bersama.
2. Kekuatan militer mencakup:
 - Adanya alutsista yang memadai.
 - Adanya personel militer yang memadai.
3. Teknologi yang dapat digunakan pada:
 - *Instrument* bagi *cyber maritime*.
 - pengawasan dan pengintaian maritim.
4. Sarana dan prasarana yang mencakup:
 - Adanya sumber daya alam.
 - Adanya anggaran bagi kegiatan DPM.
5. Tata kelola maritim dalam hal:
 - Kelembagaan terkait pertahanan maritim di bawah *single actor/agency* sebagai *conductor* dalam orkestrasi pertahanan maritim yaitu Dewan Maritim. Sedangkan untuk kegiatan DPM, Kemlu sebagai aktor terdepan dalam diplomasi luar negeri dapat terus berperan sebagai pintu utama yang mengkoordinasi DPM dengan arahan dan kerja sama Kementerian Pertahanan.
 - Adanya kebijakan maritim yang mendukung pencapaian kepentingan nasional dalam DPM.
6. Keahlian diplomasi ditunjang oleh:
 - Kepemimpinan yang baik dalam merumuskan strategi dan melaksanakan DPM.
 - Budaya maritim yang dikembangkan kepada seluruh masyarakat Indonesia.
7. Komunikasi mencakup kemampuan dalam berinteraksi dan saling memahami aktor-aktor mitra negara lain secara:
 - Formal.
 - Informal.
8. Forum kerja sama yang dibangun mengarah kepada upaya pencapaian kepentingan nasional sebagai dasar dari DPM. Forum

kerja sama dengan aktor-aktor dari negara mitra dilakukan dalam aspek:

- Teknis.
- Substansi.

BAB 5

PENUTUP

Buku ini telah membahas secara komprehensif peran diplomasi dalam konteks pertahanan maritim. Pertahanan maritim merupakan elemen penting dalam membangun stabilitas kawasan dan melindungi kepentingan nasional negara maritim. Pencapaian ini membutuhkan koordinasi yang solid antara berbagai aktor, baik pemerintah maupun lembaga terkait, serta penetapan strategi yang jelas untuk menghadapi tantangan global dan regional.

Pembahasan pada bab 2 dimulai dengan konsep dasar diplomasi, termasuk definisi, fungsi, tujuan, serta hubungan antara power dan diplomasi. Selain itu, buku ini menjelaskan pentingnya sinergi dalam diplomasi, jenis-jenis diplomasi serta peran diplomasi sebagai alat (*instrument*) kebijakan luar negeri. Pada bab ini juga diuraikan gambaran menyeluruh tentang peran diplomasi dalam hubungan internasional.

Bab 3 mengulas lebih lanjut tentang konsep pertahanan negara, teori keamanan nasional, dan spesifikasinya dalam konteks diplomasi maritim dan diplomasi pertahanan maritim (DPM). Diplomasi pertahanan maritim, yang menjadi fokus utama buku ini, dijelaskan sebagai bagian dari strategi negara untuk menjaga keamanan maritim dan memperkuat posisi geopolitiknya, baik secara bilateral maupun multilateral.

Bab 4 menyoroti studi kasus diplomasi pertahanan maritim Indonesia terhadap Australia, yang mencakup analisis mendalam tentang kepentingan nasional Indonesia dalam konteks maritim, serta bagaimana kepentingan tersebut terwujud dalam diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia selama periode

2014-2021. Buku ini juga membahas sinergi antara berbagai aktor yang terlibat dalam diplomasi tersebut dan mengusulkan model diplomasi yang dapat menguatkan strategi pertahanan maritim Indonesia di masa depan.

Konsep kepentingan keamanan maritim nasional mengacu kepada tetap tegaknya kedaulatan wilayah maritim NKRI berideologi Pancasila melalui pengelolaan sumber daya maritim, kekuatan maritim, pengetahuan, teknologi, budaya maritim untuk menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Sinergi para aktor DPM Indonesia berjalan dengan baik dalam proses pembentukan model diplomasi pertahanan maritim Indonesia dengan Australia (2014-2021). Indikator sinergi yang berjalan baik adalah keterlibatan banyak aktor termasuk aktor dari jalur *one and a half diplomacy* yang mendukung keberhasilan diplomasi serta adanya hubungan personal di antara para aktor sehingga mempermudah komunikasi dan interaksi.

DPM Indonesia memiliki kelemahan dari sisi internal yang perlu diperbaiki namun ada peluang dari sisi eksternal (Australia) bagi peningkatan hubungan dan kerja sama maritim yang lebih baik lagi. Pilihan strategi yang dapat digunakan agar DPM dapat bergerak menuju kondisi ideal adalah dengan menerapkan *turnaround strategy* (putar haluan). Model DPM Indonesia dengan Australia (2014-2021) dapat menggunakan strategi utama dan strategi menyertai. Strategi dominan adalah *turnaround strategy* (putar haluan) dan strategi menyertai adalah *diversification strategy* atau penganekaan kegiatan guna menghindari ketergantungan pada satu kegiatan tunggal. Dengan demikian *grand strategy* yang diusulkan adalah meminimalkan kelemahan dalam memanfaatkan maksimal peluang, dengan tetap memperhatikan maksimalisasi kekuatan untuk mengatasi ancaman.

Pola orkestrasi aktor DPM Indonesia dengan Australia dapat dilihat pada gambar 4.4. Bab 4. Sementara itu, pola *Orchestra Interlocking Capacity* dapat pada gambar 4.5. Kerangka Strategi DPM Indonesia 8 arah guna Penguatan Strategi Pertahanan Maritim

Indonesia dalam Mewujudkan Visi PMD Gambar 4.10. Adapun konsep strategi DPM 16 arah guna penguatan strategi pertahanan maritim Indonesia dalam visi PMD dapat dilihat pada gambar 4.12.

Sistem internasional yang selalu dinamis dapat mendorong adanya pergeseran struktur dan pola hubungan antarnegara. Sebagai bagian dari sistem tersebut maka pola hubungan bilateral Indonesia dengan Australia juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada dalam sistem selain faktor yang berada dari lingkungan internal kedua negara. Meski sistem internasional cukup dinamis namun hubungan bilateral Indonesia dengan Australia (2014-2021) telah mengarah kepada kondisi kerja sama yang baik termasuk dalam hal kerja sama pertahanan maritim.

Berdasarkan kesepakatan kedua negara, Indonesia dan Australia telah merancang dan melaksanakan kegiatan yang telah bertujuan untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan baik yang sifatnya tradisional, dan nontradisional. Jumlah aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut juga cukup banyak sehingga mendorong perlunya sinergi antara aktor di tingkat nasional maupun sinergi antara aktor-aktor DPM Indonesia dengan aktor-aktor dari Australia.

Namun, sebagai suatu bentuk negosiasi dan upaya saling memengaruhi, DPM Indonesia dengan Australia perlu merupakan interaksi yang *win-win* atau saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, DPM Indonesia dengan Australia perlu sejalan dengan Visi PMD yang menjadi landasan kokoh bagi upaya pencapaian kepentingan nasional.

Beberapa rekomendasi praktis dari penulis untuk peningkatan kualitas Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia yaitu sebagai berikut:

1. Kementerian Pertahanan RI perlu melakukan konseptualisasi kepentingan keamanan maritim nasional yang tertuang dalam kebijakan pertahanan negara. Konseptualisasi ini dapat merupakan pengembangan dari identifikasi kepentingan nasional sebagaimana tercantum pada Kebijakan Umum Pertahanan

Negara Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden No 8 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, 2021).

2. Kementerian Pertahanan RI sebagai unsur pelaksana fungsi pemerintah dalam bidang Pertahanan, sebagaimana tercantum pada Permenhan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan (Kemhan RI, 2018), perlu membentuk *leading actor* dalam DPM yang dapat terwujud dalam suatu Dewan Pertahanan Nasional. Dewan ini berperan sebagai *conductor* yang menjalankan fungsi koordinasi dalam orkestrasi DPM Indonesia selain membawahi aspek pertahanan darat, udara, laut (mencakup maritim), dan *cyber*. Melalui Dewan ini diharapkan adanya pembinaan dan peningkatan sinergi antara aktor-aktor DPM yaitu Kemhan, Kemlu, dan aktor-aktor lainnya dalam melaksanakan kerja sama internasional bidang pertahanan maritim guna membangun rasa saling pengertian, pembangunan kapasitas, dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai kebijakan pemerintah.
3. Kementerian Pertahanan RI perlu melakukan formalisasi kelembagaan *Senior Advisory Group* (SAG) IKAHAN sebagai *actor one and a half diplomacy*. Langkah ini merupakan langkah yang tepat bagi peningkatan hubungan baik kedua negara mengingat hubungan keduanya sering kali mengalami *up and down*. Formalisasi kelembagaan ini akan dapat meningkatkan lahirnya inisiatif baru dan pembinaan kegiatan-kegiatan personal menjadi kegiatan formal yang lebih mendorong keharmonisan hubungan bilateral.
4. Kementerian Luar Negeri RI perlu bekerja sama dengan Universitas Pertahanan RI selaku lembaga pendidikan tinggi untuk mengembangkan pengajaran materi diplomasi pertahanan. Pengajaran dapat ditujukan kepada para aktor diplomasi pertahanan maritim sehingga dapat memahami lebih mendalam apa, bagaimana dan mengapa perlu memperjuangkan kepentingan keamanan maritim nasional dalam DPM.

5. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri RI perlu merumuskan strategi DPM berdasarkan “16 arah prioritas DPM” atau arah interkardinal sekunder sebagai acuan bagi peningkatan kualitas DPM Indonesia dengan negara-negara mitra yang dapat dilakukan melalui berbagai platform kerja sama.

Daftar Pustaka

- Adamy, M. I. R. (2022). AUKUS and Australia's Nuclear-Powered Submarine: A Reinforced Strategic Culture. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15 (1), 148–165.
- Agastia, I. (2021). Joko Widodo's Fleeting Maritime Ambitions: An Actor-Specific Analysis of Indonesia's Global Maritime Fulcrum. *Journal of Asian Security and International Affairs*, 8 (3), 304–323.
- Agastia, I. G. B. D., & Perwita, A. A. B. (2016). *Maritime Security in the Indo-Pacific*. Graha Ilmu.
- Alfeini, Y. (2017). Kegagalan Diplomasi Pemerintah Australia Dalam Pembebasan Terpidana Hukuman Mati Kasus Bali Nine Di Indonesia. *Journal of International Relations*, 3 (1), 19–29.
- Alfiansyah, V., & Prakoso, H. A. (2022). Upaya Amerika Dalam Menghadapi Ancaman China di Laut China Selatan Melalui Pengaktifan The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (5), 1847–1858.
- Anugerah, B. (2022). Pemberdayaan Angkatan Laut Nasional Indonesia Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Nasional. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17 (1), 151–166.
- Asrudin, A. (2014). Thomas Kuhn dan teori hubungan internasional: realisme sebagai paradigma. *Global South Review*, 1(2), 107–122.
- Bakry, U. S. (1999). *Pengantar Hubungan Internasional*. Jayabaya University Press.
- Balzacq, T., Charillon, F., & Ramel, F. (2020). *Global Diplomacy, An Introduction to Theory and Practice*. Palgrave Macmillan Switzerland.
- Baldino, D., & Carr, A. (2016). Defence diplomacy and the Australian defence force: smokescreen or strategy? *Australian Journal of International Affairs*, 70 (2), 139–158.

- Bandur, A. (2019). Penelitian Kualitatif, Studi Multi-Disiplin Keilmuan dengan NVivo 12 Plus. Mitra Wacana Media.
- Belt and Road Research Platform. (2022). *The BRI and China's International Trade Map*. <https://www.beltroadresearch.com/the-bri-and-chinas-international-trade-map/> diakses pada 25 Mei 2022.
- Bidang Kemaritiman RI, K. (2017). *Kebijakan Kelautan Indonesia*.
- Bidang Kemaritiman RI, K. (2019). *Buku Putih Diplomasi Maritim Indonesia*.
- Booth, K. (2014). *Navies and Foreign Policy*. Routledge.
- Bueger, C. (2015). What is maritime security? *Marine Policy*, 53 (March), 159–164.
- Bungin, B. (2021). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Ket). Kencana.
- Baldwin, D. A. (1997). The concept of security. *Review of International Studies*, 23(1), 5–26.
- Buzan, B. (1983). *People, States, and Fear, The National Security Problem in International Relations*. Wheatsheaf Books Ltd.
- Capella, Y. (2023). Pendekatan Liberalisme dalam Hubungan Internasional untuk Menangani Isu Perubahan Iklim. URL: <https://www.kompasiana.com/yhesacapella8839/66f797e8c925c433fa497852/pendekatan-liberalisme-dalam-hubungan-internasional-untuk-menangani-isu-perubahan-iklim>. Diakses 7 November 2024.
- Chairil, T., Wicaksono, G. A., & Nurbaitty, M. A. (2022). Establishing Maritime Power Competitiveness Index: Benchmarking Indonesian Navy's Aspiration to Become World-Class Sea Power. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7 (1), 343-364.
- Checkland, P., & Poulter, J. (2006). *A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology and its use for Practitioners, Teachers and Students*. Wiley, Hoboken.

- Choong, W., & Storey, I. (2021). Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing , Non Proliferation and Regional Stability. ISEAS Perspective, 134, 1–12.
- Covey, S. R. (2005). *The 8th Habit: From Effectiveness to Greatness (The Covey Habits Series)*. Simon & Schuster.
- Cranie, Kevin. (2021). *Mahan, Corbett and The Foundations of Naval Strategic Thought*. Naval Institute Press.
- Deibel, T. L. (2007). *Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft*. Cambridge University Press.
- Departemen Pertahanan RI. (2008). *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008*.
- Dorani, S. (2018). The Bureaucratic Politics Approach: Its Application, Its Limitations, and Its Strengths. *Political Reflection Magazine*, 17, 36–46.
- Drab, L. (2018). Defence Diplomacy – an Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of the State. *Security and Defence Quarterly*, 20 (3), 57–71.
- Drab, L., & Zakowska, M. (2024). *Defence Diplomacy in the War in Ukraine - Cooperation and Challenges*. Smallwarsjournal.Com. <https://smallwarsjournal.com/2024/06/11/defence-diplomacy-war-ukraine-cooperation-and-challenges/>
- Emzir. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Rajawali Press.
- Fathun, L. M. (2019). ASEAN Contemporary Security: Maritime Diplomacy in Handling of Maritime Security Threats in Malaka Strait. *Insignia: Journal of International Relations*, 6 (1), 50-63.
- Ghozali, I. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data Kualitatif dengan Program NVivo 12*. Yoga Pratama.
- Gordyn, C. (2020). *A Bridge over Turbulent Waters: The Australia-Indonesia Relationship Through the Lens of Irregular Migration*. Australian National University.
- Greenlees, D. (2018). *The Origins of Nonalignment: Great Power Competition and Indonesian Foreign Policy 1945-1965*. Australian National University.

- Hadiningrat, J. K. (2020). Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Maritim Indonesia*. Juni, 8 (1), 98–109.
- Hastedt, G. P., & Felice, W. F. (2020). *Introduction to International Politics, Global Challenges and Policy Responses*. Rowman & Littlefield.
- Halkis, M. (2020). *Filsafat Ilmu Pertahanan, Suatu Pengantar*. Unhan Press.
- Halperin, M. H., Clapp, P. A., & Kanter, A. (2006). *Bureaucratic Politics and Foreign Policy*. Brookings Institution Press.
- Hanggarini, P. (2022). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Round Table Discussion (RTD) 2 Program S3 Ilmu Pertahanan, Konsentrasi Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI*.
- Hanggarini, P., & Emanuel A., B. (2023). Bunga Rampai Strategi Pertahanan Negara-negara dalam Konstruksi Geopolitik Indo-Pasifik (P. Hanggarini & B. Emanuel A. (eds.)). Unhan RI Press.
- Hardjosoekarto, S. (2012). *Soft Systems Methodology (Metode Serba Sistem Lunak)*. Universitas Indonesia (UI-Press).
- Heriamsal, K., & Manurung, F. B. (2024). Strategi Diplomasi Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian Pada Konflik Terbaru Hamas-Israel. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 19-48.
- Hidayat, S., & Sidhha, A. (2018). Indonesia's Maritime Defence Paradigm Sine Qua Non Global Maritime Fulcrum. *Jurnal Pertahanan*, 4 (3), 136-144.
- Holmes, K. R. (2014). *What is National Security?* The Heritage Foundation.
- Joint Declaration on Maritime Cooperation between the Government of Republic of Indonesia and the Government of Australia, (2017). <https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2017-0233.pdf>
- Jones, C. M. (2010). *Bureaucratic Politics and Organizational Process*

- Karim, M. F. (2021). Role legitimation in foreign policy: The case of indonesia as an emerging power under yudhoyono's presidency (2004-2014). *Foreign Policy Analysis*, 17 (3), 1-19.
- Kelton, M., & Willis, D. (2019). US-Australia-Indonesia Trilateral Security? Conditions for Cooperation. *Australian Journal of International Affairs*, 73 (3), 289–311.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*.
- Kemhan RI. (2018). *Permenhan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Diplomasi Pertahanan*.
- Kemhan. (2023). *Pertemuan 2 + 2 di Australia , Menhan Prabowo Tegaskan Keinginan Indonesia jadi Jangkar Perdamaian di Kawasan*.
<https://www.kemhan.go.id/2023/02/09/pertemuan-22-di-australia-menhan-prabowo-tegaskan-keinginan-indonesia-jadi-jangkar-perdamaian-di-kawasan.html> diakses pada 15 April 2023.
- Kusumawardhani, I., & Arie Afriansyah. (2019). Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim. *Kertha Patrika*, 41 (3), 251-282.
- Laksmana E. A. (2018). Reinforcing Indonesia-Australia Defence Relations: The case for maritime recalibration. *Lowy Institute for International Policy* (Issue October).
- Laksmana, E. A., Gindarsih, I., & Mantong, A. W. (2018). Menerjemahkan Visi Poros Maritim Global ke dalam Kerangka Diplomasi Pertahanan Maritim dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Era Jokowi. *CSIS Working Paper Series*.
- Le Mière, C. (2014). Maritime Diplomacy in the 21st Century, Drivers and Challenges. In *Maritime Diplomacy in the 21st Century, Drivers and Challenges*. Routledge/Taylor & Francis.
- Legionosuko, T., Widjayanto, J., Apriyanto, I. N. P., & Wibowo, K. (2020). Analisis Adaptif, Dinamisasi Metode Analisis SWOT. Universitas Pertahanan RI.

- Ma'ruf, A. (2022). Analisis Strategi, Panduan Praktis SWOT, GE-McKinsey, Space, FFA, QSPM, AHP Menggunakan Microsoft Excel. Penerbit Andi.
- Maarif, S. D. (2023). Apa Itu Perspektif Liberalisme dalam Hubungan Internasional? URL: <https://tirto.id/apa-itu-perspektif-liberalisme-dalam-hubungan-internasional-gPwq>. Diakses 7 November 2024.
- Maarif, S. D. (2023). Konsep Teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. URL: <https://tirto.id/konsep-teori-konstruktivisme-dalam-hubungan-internasional-gPwQ>. Diakses 7 November 2024.
- Manan, M. (2017). Foreign Policy and National Interest: Realism and Its Critiques. *Jurnal Global & Strategis*, 9 (2), 175-189.
- Mardhani, D., Josias, A., & Runturambi, S. (2020). Keamanan dan Pertahanan Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10 (3), 279–298.
- Marsetio. (2019). *Kepemimpinan Nusantara*. Universitas Pertahanan RI.
- Models. In *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semester*, 4 (2), 17–36.
- Nabbs-Keller, G. (2020). Understanding Australia-Indonesia relations in the post-authoritarian era: resilience and respect. *Australian Journal of International Affairs*, 74 (5), 532–556.
- News, M. (2017). *Sang Nakhoda Agung Negara Maritim itu Bernama Soekarno*. *Maritime News*.
<http://maritimnews.com/2017/09/sang-nakhoda-agung-negara-maritim-itu-bernama-soekarno/>
- Octavian, A., Asmara, R., & Hidayat, A. S. (2020). Means of Indonesian Maritime Defense Strategy in Sea Control on the

- Indonesian Strategic Straits to Support Total Defense and Security System. *Jurnal Pertahanan*, 6 (3), 507-514.
- Paquin, S. (2020). Paradiplomacy. In *Global Diplomacy* (pp. 49–61). <https://doi.org/10.1007/978-3-030-28786-3>
- Palar, A. M. K., Prakoso, L. Y., & Aries, S. (2021). Strategi Pertahanan Laut Badan Keamanan Laut RI dalam Mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut*, 7 (2), 143–158.
- Pengaturan Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia bagi Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja sama Keamanan dan Rencana Aksinya Tentang Kerja sama P, (2019).
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024, (2021).
- Perwita, A. A. B. (2020). *Visi “ Poros Maritim Dunia ” Joko Widodo : Respons terhadap Dinamika Kawasan Indo- Pasifik*.
- Phillips, A., & Hiariej, E. (2016). Beyond the ‘Bandung divide’? Assessing the scope and limits of Australia–Indonesia security cooperation. *Australian Journal of International Affairs*, 70 (4), 422–440.
- Plan of Action for The Implementation of the Joint Declaration on Maritime Cooperation between The Government of the Republic of Indonesia and The Government of Australia, (2018).
- Prabowo, A. R. (2022). Diplomasi Maritim Indonesia-Australia di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kerja sama Bakamla-Australian Border Force. *Bappenas Working Papers*, 5 (2), 176–195.
- Pramitha, D. A. (2017). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dengan Australia Dalam Hubungan Comprehensive Partnership Di Bidang Keamanan Maritim. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Volume 3 (2), 17–32.

- Pratiwi, F. I., Puspitasari, I., Hikmawati, I., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia's Middle Power Strategy Between Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 15 (3), 30–54.
- Prayoga, A., Mahroza, J., & Waluyo, S. D. (2021). Indonesian Defense Strategy to Encounter Challenges in the Indo-Pacific (Case Study: Hegemonic War of China and the United States of America in the South China Sea). *International Journal of Social Science and Human Research*, 04 (10), 2880–2889.
- Pudjiastuti, Putra, & Susilo. (2021). Vision of the World Maritime Axis of Indonesia as a Maritime Country in Alfred Thayer Mahan's Perspective. *Journal of Defense Resources Management*, 12 (2), 211–218.
- Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS. (2017). Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek. In *Pusat P2K-OI Kemenlu dan CSIS*.
- Qunuri, R., & Pradjoko, D. (2021). Australian Foreign Policy Towards Indonesia Related East Timor 1975-1991. *International Review of Humanities Studies*, 6 (1), 573–593
- Rachmawati, I., Dewi, M. A., & Kurniawati, E. (2021). *Diplomasi Publik Digital*. Graha Ilmu.
- Rachmawati, I. (2018). Konstruktivisme sebagai Pendekatan Alternatif dalam Hubungan Internasional. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan*, 16(1).
- Rangkuti, F. (2014). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2021). Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Penghitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Gramedia Pustaka Utama.
- Rendi, P., & Rio, S. (2019). Diplomasi dan Power: Sebuah Kajian Analisis. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2(01).

- Reynolds, M., & Holwell, S. (2010). *Systems Approaches to Managing Change: A Practical Guide*. Springer.
- Rijal, N. K. (2019). Smart Maritime Diplomacy: Diplomasi Maritim Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Jurnal Global & Strategis*, 13 (1), 63-78.
- Riska, E. (2017). Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna. *Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan*, 3 (2), 33-47.
- Ritonga, R. (2016). *Kesadaran Baru Maritim, Biografi Laksamana TNI Dr. Marsetio*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rogers, J. (2022). *AUKUS: Strategic Drivers and Geopolitical Implications*. <https://www.geostrategy.org.uk/britains-world/aucus-strategic-drivers-and-geopolitical-implications/>
- Rose, J. (1997). Soft systems methodology as a social science research tool. *Systems Research and Behavioral Science*, 14 (4), 249-258.
- Rosyidin, M. (2022). Realisme versus liberalisme: suatu perbandingan paradigmatis. *Indonesian Perspective*, 7(2), 134-144.
- Salim. (2021). Maritime Domain Awareness (MDA): A Profound Concept for Indonesia Maritime Security. In *Joint Publication Indonesian Navy - Royal Australian Navy*.
- Samy, M., & Kusumadewi, J. A. (2021). Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Nontradisional Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14 (1), 45-62.
- Sarjito, A., & Perwita, A. A. B. (2024). *Safeguarding The Nations, Sasaran dan Strategi Diplomasi Pertahanan*. Indonesia Emas Group.
- Setkab.go.id. (2014). *Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014 Read*. <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november->

2014/0A

- Sharp, P. (2019). *Diplomacy in the 21st Century, A Brief Introduction*. Routledge, Oxon UK.
- Shoelhi, M. (2018). *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Simbiosis Rekatama Media.
- Singh, Y. (2019). *Strategy Formulation an Alternatve to Lykke's Model* (Issue June). College of Defense Management.
- Sobarini, E. (2021). Peluang Potensial dan Dampak Visi Poros Maritim bagi Hubungan Indonesia-Australia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 7, 95–112.
- Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1996). *Manajemen*. Prenhallindo.
- Subagyo, A., & Ginanjar, Y. (2020). Sinergi Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dalam Politik Luar Negeri Indonesia. *Indonesian Perspective*, 5 (1), 72–91.
- Sugiharto, A., & Shafwatullah, P. (2021). Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, 9 (2), 121–131.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suropati, U., Sulaiman, Y., & Montratama, I. (2016). *Arungi Samudra Bersama Sang Naga, Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21*. PT Elex Media Komputindo.
- Suryatama, E. (2020). Lebih Memahami Analisis SWOT dalam Bisnis, Menggunakan Kekuatan untuk Mengatasi Kelemahan, Menggunakan Peluang untuk Mengatasi Ancaman. Kata Pena.
- Suseto, B., Othman, Z., & Razalli, F. M. (2019). The need to reform Indonesia's maritime strategy: A review. *Indonesian Journal of Geography*, 50 (2), 145–154.
- Tarjuki. (2022). Optimalisasi Smart Maritime Diplomacy Guna Mendukung Keamanan Maritim Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (2), 754–761.

- Till, G. (2009). *Seapower, A Guide for the Twenty-First Century*. Routledge.
- Troath, S. (2019). Bonded but not embedded: trust in Australia-Indonesia relations, Keating & Suharto to Turnbull & Jokowi. *Australian Journal of International Affairs*, 73(2), 126–142.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Vinsensio, D. (2016). Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik. *Cakra Studi Global Strategis (CSGS)*.
- Widodo, P., Samudro, E., Parlina, N., Nugrahani, H., Siscawati, M., & Wasitova, L. (2023). The Pasir Island Ownership Dispute between Indonesia and Australia Perspective from the Aspect of State Defense. *Res Militaris*, 13 (2), 4179-4188.
- Winger, G. (2014). The Velvet Gauntlet: A Theory of Defense Diplomacy. *What Do Ideas Do?*, 3, 1-14
- Wu, C. C.-H. (2017). Understanding the Structures and Contents of National Interests: An Analysis of Structural Equation Modeling. *The Korean Journal of International Studies*, 15 (3), 391–419.
- Yadav, A. S. (2022). Indo-Pasifik Sebuah Konstruksi Geopolitik. *Elex Media Computindo*.
- Yudilla, A. (2019). Kerja sama Indonesia Cina Dalam Belt And Road Initiative Analisa Peluang Dan Ancaman Untuk Indonesia. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 2 (1), 52–65.
- Zaheer, Z. (2022). *What is the Quad Aiming to do in the Asia Pacific Region?* <https://www.chinausfocus.com/peace-security/what-is-the-quad-aiming-to-do-in-the-asia-pacific-region>

Indeks

A

Anarki, 50, 70, 71
ASEAN, xii, 12, 14, 15, 40, 62,
73, 121

B

Bahari, 3, 6
Bilateral, 8, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 32, 33, 40, 41, 42, 48,
67, 68, 70, 79, 82, 83, 84,
86, 99, 114, 116, 117, 132
Birokrasi, 45, 55, 82, 105
Borjuis, 42

D

Demokrasi, 26, 31, 49
Dialog, 9, 27, 40, 51, 57, 58,
71, 85, 96, 97
Digital, 38, 39, 40, 132
Diplomasi, v, vi, 3, 6, 7, 9, 13,
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
48, 55, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 75, 78, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 89, 90,
91, 93, 98, 99, 106, 107,
108, 109, 110, 112, 114,
115, 117, 132, 134

Diplomat, 23, 24, 26, 27, 32,
33, 42, 58, 61
Doktrin, 4, 66, 106
Duta besar, 17, 23, 132

E

Embargo, 31

F

Forum, 9, 34, 35, 57, 73, 80,
98, 102

G

Geostrategis, 1, 2, 5

I

Inovasi, 28
Integrasi, 11, 13, 55, 66, 71
Interdependensi, 48, 50, 71,
133
Investasi, 10, 28, 36

K

Kompetitif, 46, 70, 71
Kompromi, 42
Konferensi, 34
Konflik, 7, 8, 13, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 38, 40, 48,
49, 51, 66, 70, 71, 106
Konsepsi, 19, 25
Konstelasi, 46

L
Legitimasi, 25, 72

M
Maritim, v, vi, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 41, 45, 53, 54, 55,
56, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 77, 79, 80, 81,
82, 83, 84, 85, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 96, 98, 99,
102, 103, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 112, 114,
115, 116, 117, 124, 132
Media sosial, 39, 132
Militer, 7, 8, 9, 16, 17, 19, 22,
31, 47, 48, 50, 51, 57, 58,
59, 61, 66, 70, 71, 73, 103,
106, 112
Misi, 4, 9, 26, 53, 58
Mitra, 5, 12, 14, 33, 70, 72,
73, 94, 103, 107, 112, 113,
118
Modernisasi, 2
Multilateral, 8, 13, 17, 34, 35,
36, 40, 42, 48, 67, 68, 70,
86, 96, 114, 132

N
Nasionalisme, 42
Negosiasi, 21, 22, 23, 27, 29,
30, 35, 36, 42, 61, 71, 116

O
Otoritas, 36, 47, 70
Otoriter, 16

P
Paradiplomasi, 34, 36, 40
Platform, 39, 49, 96, 118
Pragmatisme, 71

R
Revolusi, 25

S
Sipil, 17, 25, 42
Stabilitas, vi, 12, 13, 20, 27,
29, 38, 44, 48, 58, 66, 70,
78, 80, 102, 114, 115, 133

T
Trilateral, 8, 12, 42

V
Visi, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 19,
53, 55, 62, 67, 70, 75, 81,
89, 105, 106, 116

Glosarium

- Diplomasi : Metode yang digunakan untuk menyesuaikan dan mengelola hubungan antarnegara, yang dilakukan oleh duta besar dan utusan.
- Diplomasi bilateral : Hubungan yang dijalin antara dua negara, yang memiliki fokus utama pada kepentingan bersama dan saling pengertian di antara keduanya.
- Diplomasi digital : Bentuk baru dari diplomasi publik yang menggunakan internet, memanfaatkan teknologi informasi serta media sosial sebagai sarana untuk memperkuat hubungan diplomatik.
- Diplomasi multilateral : Bentuk institusional yang mengoordinasikan hubungan antara tiga negara atau lebih berdasarkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam hubungan internasional.
- Diplomasi pertahanan maritim (DPM) : Kegiatan diplomasi dengan tujuan memperkuat pertahanan maritim yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla dan TNI AL serta aset-aset strategis lainnya.
- Diplomasi regional : Interaksi antarnegara yang berada dalam suatu kawasan tertentu.
- Diplomat : Individu yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangani

- hubungan antara kelompok-kelompok tersebut.
- Diplomat supranasional : Para birokrat yang bekerja untuk dan mewakili organisasi internasional.
- Hard Power* : Penggunaan kekuatan untuk memaksa dan mengarahkan tindakan negara lain agar sesuai dengan keinginan negara yang bersangkutan.
- IKAHAN : Forum yang didanai oleh pemerintah Australia untuk menjadi wadah komunikasi para pejabat kemaritiman Australia dengan Indonesia.
- Liberalis : Paradigma utama yang menekankan pentingnya kerja sama, institusi internasional, dan interdependensi ekonomi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian dan stabilitas global.
- Realis : Paradigma dalam hubungan internasional yang meyakini bahwa negara merupakan aktor paling dominan dalam sistem internasional.
- Soft power* : Kemampuan suatu negara untuk memengaruhi dan meyakinkan negara lain melalui daya tarik informasi, budaya, nilai-nilai, dan ide-ide.

Profil Penulis



Peni Hanggarini adalah Dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina Jakarta atau *Paramadina Graduate School of Diplomacy*. Ia memperoleh gelar Doktor dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia dan gelar *Master of Arts* dalam Ilmu Hubungan Internasional dari Australian National University Canberra, Australia. Pendidikan Sarjana Strata 1 ditempuh di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Peni juga merupakan *Fellow* pada *Center for Geopolitics and Geostrategy Studies Indonesia (CGSI)* dan *Women in Foreign Policy Fellow* pada *Foreign Policy Community Indonesia (FPCI)*. Minat utamanya adalah topik terkait diplomasi pertahanan, kebijakan luar negeri dan politik internasional.